



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM
SANITASI DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI
KABUPATEN SUKAMARA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ARIF RAHMAN HAKIM

NIM. 500873505

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019

ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL SANITATION AND HEALTH PROGRAM IN SUKAMARA DISTRICT

ARIF RAHMAN HAKIM

NIM : 500873505

acasukma888@gmail.com

Post Graduate School Program
Universitas Terbuka

Sanitation and environmental health development activities in Sukamara district based on the phenomenon still found by some people to defecate carelessly (BABS) amounting to 29.26 percent of the family head of a total of 14,584 heads of households in Sukamara District. the fact that participation is still relatively low. This study aims: (1) Knowing and Analyzing Community Participation in the Sanitation and Environmental Health Program in Sukamara District? (2) Knowing and Analyzing the Drivers and Inhibitors of Community Participation in the Sanitation and Environmental Health Program in Sukamara District.

informant sources in this study were: (1) Head of Division in the Environment of Public Housing and Settlement Areas (2) Citizens / Beneficiary Community groups, (3) Working Groups (POKJA), (5) Regional Device Organizations (SOPD). The technique of taking informants using snowballsampling, while the data analysis technique uses technical qualitative analysis with data reduction, data display and conclusion.

The results of this study indicate that participation in the planning stage, participation seen when conducting meetings decides to accept or reject the program to be rolled out, decides which party has the right to receive benefits and manage it by forming KSM which then makes plans and the action plan, at the implementation stage, the self-help group (KSM) carried out the construction of the project by involving beneficiary residents, preparing land, places, providing energy with relatively inexpensive wages affordable, empowering most local personnel, providing food and beverage assistance when there are community work in turns and groups utilizing women's participation in each activity in accordance with the division of labor, at the stage of utilization of the results, community participation is not optimal, this is indicated by the presence of damage to facilities the infrastructure because it is not used, related to the behavior habits of chapters that are difficult to change, has not yet fully provided the means of support and ignorance in the use of sanitation facilities. In the evaluation phase, the participation of residents of beneficiaries was marked receiving programs with awareness high.

Keywords: Community participation, Sanitation Program and Supporting, Obstacles Factors

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM SANITASI DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SUKAMARA

ARIF RAHMAN HAKIM

NIM : 500873505

acasukma888@gmail.com

**Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka**

Kegiatan pembangunan sanitasi dan kesehatan lingkungan di kabupaten Sukamara berdasarkan fenomena masih ditemukan sebagian masyarakat membuang air besar secara sembarangan (BABS) sebesar 29,26 persen Kepala Keluarga dari total 14.584 Kepala Keluarga di Kabupaten Sukamara. Kenyataan bahwa partisipasi masih relative rendah. Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui dan Menganalisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Sukamara? (2) Mengetahui dan Menganalisis Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Sukamara.

Sumber informan dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2) Warga/kelompok Masyarakat Penerima Manfaat, (3) Kelompok Kerja (POKJA), (5) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Teknik pengambilan informan menggunakan *snowball sampling*. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknis analisis kualitatif dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi tahap perencanaan, partisipasi terlihat ketika melakukan rapat memutuskan menerima atau menolak program yang akan digulirkan, memutuskan pihak yang berhak menerima manfaat dan mengelolanya dengan membentuk KSM yang selanjutnya membuat perencanaan dan rencana aksi, pada tahapan pelaksanaan, kelompok swadaya masyarakat (KSM) melaksanakan pembangunan proyek dengan melibatkan warga penerima manfaat, menyiapkan lahan, tempat, memberikan tenaga dengan upah yang relatif murah terjangkau, memberdayakan sebagian besar tenaga lokal, memberikan bantuan makanan dan minuman ketika ada kerja bakti warga secara bergiliran dan berkelompok memanfaatkan partisipasi kaum wanita dalam setiap kegiatan sesuai dengan pembagian kerja, pada tahapan pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat kurang optimal, hal ini ditandai terdapatnya kerusakan sarana prasarana karena tidak dipakai, terkait dengan kebiasaan perilaku bab yang sulit dirubah, belum sepenuhnya menyediakan sarana pendukung dan ketidaktahuan dalam pemanfaatan sarana sanitasi, pada tahapan Evaluasi, partisipasi warga penerima manfaat ditandai menerima program dengan kesadaran tinggi.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Program Sanitasi Dan Faktor Pendukung, Penghambat

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi Dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Sukamara adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, 2019

**METERAI
EMPEL** yang Menyatakan
TGL. 20
58AFF321993380
0000
RUBURUPIAH



(ARIF RAHMAN HAKIM)
NIM. 500873505

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM
MAGISTER (TAPM)**

Judul TAPM : Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Sukamara
 Penyusun TAPM : ARIF RAHMAN HAKIM
 NIM : 500873505
 Program Studi : Administrasi Publik
 Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II

Pembimbing I

Prof. Dr. HOLTEN SION, M.Pd
NIP. 19581221 198303 1 008

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P
NIP. 197503171999031005

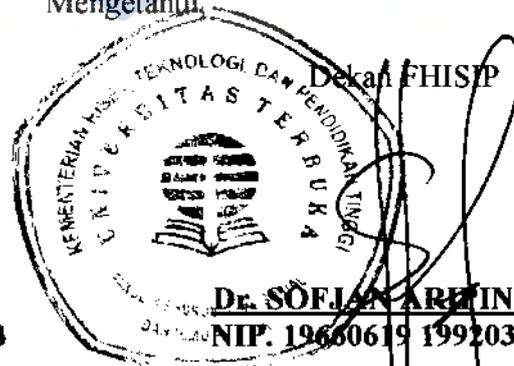
Penguji Ahli

Dr. ROY VALIANT SALOMO, M.Soc.Sc
NIP. 19570302 198807 1 001

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum,
Sosial, dan Politik

Dr. DARMANTO, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003



Dr. SOFIAN ARIFIN, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya selaku pembimbing TAPM dari mahasiswa:

Nama : **ARIF RAHMAN HAKIM**
 NIM : 500873505
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul TAPM : Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi dan
 Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Sukamara

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal :
 Waktu :

Dan telah dinyatakan LULUS.

Palangka Raya,

2019

PANITIA PENGUJI TAPM

Tanda Tangan

Ketua Komisi Penguji
 Nama : **Dr. DARMANTO, M.Ed**

Penguji Ahli
 Nama : **Dr. ROY VALIANT SALOMO, M.Soc.Sc**

Pembimbing I
 Nama : **Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P**

Pembimbing II
 Nama : **Prof. Dr. HOLTEN SION, M.Pd**

RIWAYAT HIDUP

Nama : Arif Rahman Hakim
NIM : 500873505
Program Studi : Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Sukamara, 14 Agustus 1968
Riwayat Pendidikan :

- 1) Lulus SD di SDN 2 Sukamara Pada Tahun 1981
- 2) Lulus SMP di SMPN 1 Sukamara Pada Tahun 1984
- 3) Lulus SLTA di SMA Negeri 8 Semarang Pada Tahun 1987
- 4) Lulus D3 di Universitas Antakusuma Semarang Pada Tahun 2009
- 5) Lulus S1 di Akuntansi Universitas Antakusuma Pada Tahun 2012

Riwayat Pekerjaan :

- 1) Tahun 1988 s/d 1989 sebagai CPNS Pelaksana di Bidang Sarana Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
- 2) Tahun 1989 s/d 2002 sebagai PNS Pelaksana di Bidang Sarana Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
- 3) Tahun 2003 s/d 2007 sebagai PNS Pelaksana di Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara pada
- 4) Tahun 2008 s/d 2011 sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan di Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara
- 5) Tahun 2011 s/d 2013 sebagai Kepala Bidang di Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara
- 6) Tahun 2013 s/d 2016 sebagai Sekretaris Dinas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara
- 7) Tahun 2016 s/d Sekarang sebagai Kepala Dinas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara

Palangka Raya,

2019

Arif Rahman Hakim

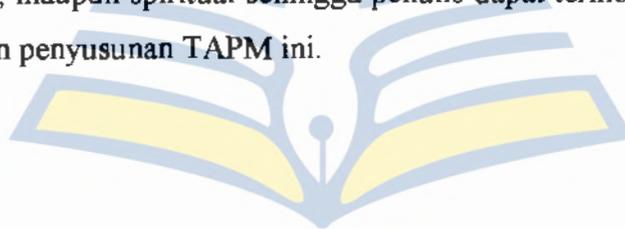
NIM. 500873505

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan anugerah-Nya penulis mendapat kesempatan menyelesaikan studi di Program Pascasarjana (PPs) Universitas Terbuka dan atas pertolongan-Nya pula penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini sesuai jadwal. Salawat dan salam dihaturkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan kebenaran.

TAPM ini merupakan salah satu syarat wajib bagi setiap mahasiswa Program Pascasarjana (PPs) Universitas Terbuka. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa mendapatkan gambaran langsung tentang ilmu yang diperoleh saat kuliah dan menambah bekal pengalaman yang berhubungan dengan ilmu kebijakan publik secara khusus.

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan TAPM yang berjudul ***“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SANITASI DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SUKAMARA”***, penulis dibantu oleh banyak pihak. Bantuan tersebut berupa materi, moril, maupun spiritual sehingga penulis dapat termotivasi menyelesaikan penelitian dan penyusunan TAPM ini.



Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, diantaranya kepada:

1. Kepala UPBJJ Palangka Raya dan Pengelola PPS yang memberi fasilitasi sarana prasarana, dan kesempatan belajar kepada penulis
2. Bapak Dr. Fauzi Rahman, S.Sos. M.AP, selaku Dosen Pembimbing I untuk membimbing dan memberi petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan TAPM (Tesis) ini.
3. Bapak Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II untuk membimbing dan memberi petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan TAPM (Tesis)
4. Bapak Bupati Sukamara yang telah memberikan ijin belajar untuk melanjutkan studi pada program pasca sarjana Universitas Terbuka.
5. Bapak H. Sutrisno, S.Pd. MM, selaku Plt. Sekda Kabupaten Sukamara.
6. Teristimewa dan terkasih buat Almarhum kedua orang tua, Isteri dan Anak Anaku yang telah memberikan banyak kasih sayang, doa dan dorongan moril yang tak pernah henti kepada penulis, Insya Allah Penulis akan sekuat tenaga untuk selalu membuat mamak sama bapak bangga..
7. Buat Kolega, Rekan Sejawat, Teman - temanku yang selalu mendukung, penulis berterima kasih karena sudah bersama-sama dengan penulis melalui tahapan perkuliahan.
8. Dan banyak lagi pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Proposal TAPM (Tesis) ini tapi tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terima kasih banyak.

Dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa TAPM ini masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karenanya penulis mengharapkan adanya masukan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak, guna penyempurnaan penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palangka Raya, 2019

Penulis

Arif Rahman Hakim

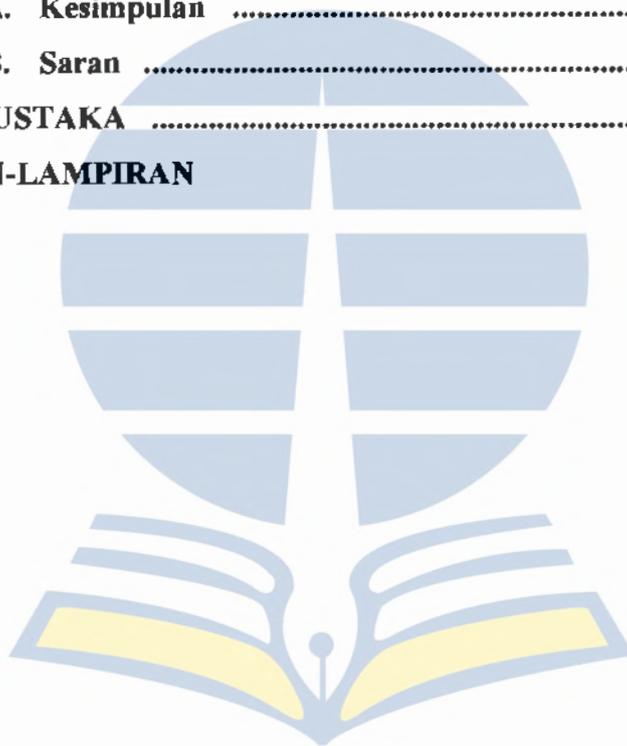


DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR LAYAK UJI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Pustaka.....	13
1. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	13
2. Definisi Pembangunan.....	25
3. Pembangunan Fisik.....	29
4. Perencanaan Pembangunan Partisipatif.....	31
5. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.....	33
6. Hygine dan Sanitasi Lingkungan.....	36
7. Bentuk Pelayanan Publik	41
8. Standar Pelayanan Publik.....	42
9. Pengertian Kebijakan Publik.....	45

	10. Kaitan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik	49
	B. Penelitian Terdahulu.....	55
	C. Kerangka Berpikir.....	58
	D. Operasionalisasi Konsep.....	59
BAB III	METODE PENELITIAN.....	61
	A. Jenis Penelitian	61
	B. Sumber Data Informasi	61
	C. Instrumen Penelitian.....	62
	D. Prosedur Pengumpulan Data	63
	E. Keabsahan Data	64
	F. Teknik Analisis Data	67
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
	A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian	72
	1. Letak Geografis	72
	2. Jumlah Penduduk.....	75
	3. Profil Masyarakat Penerima Bantuan Program Sanitasi dan penyehatan Lingkungan Kabupaten Sukamara..	78
	B. Hasil Penelitian	79
	1. Tahap Perencanaan.....	80
	2. Tahap Pelaksanaan.....	89
	3. Tahap Pemanfaatan.....	94
	4. Tahap Evaluasi.....	102
	C. Pembahasan	109
	1. Participation in Decision Making (partisipasi dalam pengambilan keputusan)	113
	2. Participation in Implementation (partisipasi dalam pelaksanaan)	118
	3. Participation in Benefits (partisipasi dalam pengambilan manfaat)	120

4. Participation in Evaluation (Partisipasi Dalam Evaluasi)	
.....	123
5. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan	
.....	125
a. Faktor Pendukung	125
b. Faktor Penghambat	127
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	59
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles and Huberman.....	70
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Sukamara	73
Gambar 4.2 Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten.....	75



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Data Jumlah Penduduk dan Perilaku BABS serta SPAL-S Per Kecamatan	7
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	55
Tabel 4.1.	Jumlah Desa / Kelurahan dan Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Sukamara 2017	74
Table 4.2	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Sukamara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017	75
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk menurut Rumah Tangga dan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Sukamara Berdasarkan Usia Tahun 2017	76
Tabel 4.4	Persentase Penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2017.....	76
Tabel 4.5	Banyaknya Sekolah Menurut jenis sekolah di Kabupaten Sukamara Tahun 2017	77
Tabel 4.6.	Jenis Sanitasi dan Bangunan Sanitasi Per Kecamatan Sukamara Tahun 2018	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting untuk mendukung kualitas kehidupan manusia selama hidupnya. Kesehatan dapat dicapai dengan berbagai macam hal, salah satunya adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Manusia dapat hidup dengan sehat apabila lingkungan di sekitarnya pun sehat. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah perilaku buang air besar sembarangan yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara dengan sanitasi terburuk. Sebab, sebagian besar masyarakat melakukan BAB sembarangan di berbagai tempat. (<https://news.detik.com/berita/d-3671789/kepala-bappenas-indonesia-peringkat-2-sanitasi-terburuk-di-dunia>).

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) menyebutkan Hasil Studi *Indonesia Sanitation Sector Development Program* (ISSDP) tahun 2006, bahwa masyarakat Indonesia yang berperilaku buang air besar sembarangan adalah sebesar 47%. Masyarakat membuang kotorannya ke sungai, kolam, sawah, kebun, dan tempat terbuka lainnya.

Tinja merupakan salah satu bahan buangan sebagai akibat dari adanya kehidupan manusia, hasil dari proses pencernaan makanan pada sistem pencernaan makanan manusia. Pembuangan tinja manusia yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya akan menimbulkan berbagai macam dampak negatif, di antaranya adalah pencemaran permukaan tanah serta air tanah, yang berpotensi menjadi sumber penyebab berbagai macam penyakit. Tinja pun merupakan salah satu bahan makanan yang disukai oleh lalat, tikus, ayam, anjing, dan hewan lainnya, karena tinja mengandung berbagai macam zat yang dibutuhkan oleh hewan tersebut (Soeparmin 2002). Saat ini, diperkirakan sebesar 70 persen air tanah di wilayah perkotaan telah tercemar oleh bakteri tinja, sedangkan sebagian besar masyarakat perkotaan masih menggunakan air tanah sebagai sumber air. Dampak tersebut disebabkan sebagian besar oleh kebiasaan masyarakat buang air besar sembarangan dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Dampak buruk yang dihasilkan oleh pengelolaan tinja manusia secara umum disebabkan oleh fasilitas dan pengetahuan masyarakat yang minim. Selain itu budaya masyarakat hingga saat ini masih terbiasa dengan buang air besar sembarangan. Permasalahan sanitasi, khususnya perilaku buang air besar sembarangan berhubungan langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga jika kekurangan yang terjadi tidak diatasi, akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Terlebih tinja yang dibuang sembarangan akan mencemari air sebagai sumber utama kehidupan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah telah menyusun berbagai program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program-program tersebut di antaranya adalah Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (program

pendukung PNPM), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan sanitasi di daerah, terutama untuk menghindari dampak dari kondisi buruknya sanitasi di Indonesia. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah termasuk: (i) Konferensi Sanitasi Nasional, yang menghasilkan kesepakatan mengenai langkah-langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan yang juga sejalan dengan pencapaian sasaran MDGs; (ii) pertemuan *International Year of Sanitation (IYOS)*, yang menghasilkan komitmen pemerintah dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi; dan (iii) Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan.

Pada event ini telah pula diidentifikasi permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi ke depan serta menyepakati pendekatan Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai dasar pembangunan sanitasi di daerah. Selain itu, Untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase permukiman diperlukan Kebijakan Pemerintah sebagai terobosan, yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat dan pihak swasta. Untuk mendukung kebijakan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta persamaan persepsi tentang mekanisme kerjasama pemerintah-swasta.

Dengan demikian semua stakeholder yang terkait dengan penanganan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta yang beminat dapat melihat adanya peluang kerjasama ini

sebagai peluang investasi. Indonesia sangat tertinggal dalam akses sanitasi sehingga diperlukan percepatan peningkatan akses maupun kualitas sanitasi di seluruh pelosok tanah air. Dengan terpenuhinya kebutuhan sanitasi masyarakat dengan baik, maka akan menentukan kualitas hidup masyarakat tersebut, karena sanitasi merupakan salah satu hajat hidup dasar dari seluruh masyarakat.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah program untuk meningkatkan dan mempercepat perencanaan dan investasi sektor sanitasi yang dilaksanakan selama periode tahun 2015 - 2019. PPSP bertujuan meningkatkan kondisi sanitasi permukiman di kabupaten/kota yang menghadapi masalah serius di salah satu atau beberapa subsektor sanitasi.

Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja Sanitasi Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/18B/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Sukamara yang diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung, baik dalam pokja yang terstruktur maupun sebagai mitra-mitra pendukungnya.

Kelompok Kerja Sanitasi Pemerintah Kabupaten Sukamara secara struktural dibentuk dan berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara, yang terdiri dari tim koordinasi dan Kelompok Kerja Sanitasi Pemerintah Kabupaten Sukamara. Kelompok Kerja Sanitasi Pemerintah Kabupaten

Sukamara mempunyai tugas antara lain ; a). Menyusun buku putih sanitasi; b). Menyusun SSK dan c). Melakukan koordinasi pembangunan sanitasi.

Kelompok Kerja Sanitasi Pemerintah Kabupaten Sukamara ini diharapkan juga harus mampu memberikan penyadaran pentingnya sanitasi, menyampaikan keputusan Pokja ke SKPD dan mengawal program pembangunan di bidang sanitasi. Ada tiga indikator yang menjadi sasaran PPSP itu yaitu, masalah persampahan, drainase dan limbah domestik atau rumah tangga.

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase permukiman adalah bagaimana melakukan penanganan secara lebih baik, sehingga diperoleh: (1) Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan air limbah, persampahan, dan drainase yang dapat mengiringi peningkatan pertumbuhan penduduk yang pesat terutama di daerah perkotaan; (2) Penurunan angka sakit dan kematian yang disebabkan oleh *waterborne diseases* terutama pada bayi dan anak-anak; (3) Pemenuhan sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs) oleh pemerintah, yaitu : untuk dapat melayani separuh dari populasi penduduk yang belum mendapatkan akses sanitasi (air limbah dan sampah) sampai tahun 2015 secara bertahap; (4) Terciptanya lingkungan hidup yang bersih, sehat, nyaman, dan layak huni.

Program-program tersebut berjalan dengan berbagai cara dalam upaya mencapai keberhasilan. Masing-masing program memiliki indikator keberhasilan. Dalam mencapai keberhasilan program, terdapat faktor-faktor pendukung yang membantu tercapainya indikator-indikator keberhasilan program. Program yang berdasarkan basis masyarakat maka akan mengutamakan peranan masyarakat dalam

pelaksanaan program. Setiap indikator, faktor, dan peranan masyarakat akan menentukan bagaimanakah keberhasilan program yang dicapai.

Masyarakat sebagai salah satu unsur subyek pelaku pembangunan selain pemerintah dan swasta mempunyai kewajiban merespon setiap program pembangunan dari dan untuk masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Siswanto (2012:32) bahwa Kunci keberhasilan pengelolaan pembangunan tergantung pada tingginya motivasi dan keswadayaan sebagai buah dari adanya peluang yang lebih terbuka dalam berpartisipasi dan dibebaskannya masyarakat memutuskan pilihan kegiatan sesuai kebutuhannya secara demokratis.

Adanya gejala partisipasi masyarakat di Kabupaten Sukamara pada kegiatan pembangunan sanitasi dan kesehatan lingkungan termasuk masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan masih ditemukan pada sebagian masyarakat yang membuang air besar secara sembarangan (BABS) sebesar 29,26 persen Kepala Keluarga dari total 14.584 Kepala Keluarga di Kabupaten Sukamara. Kecenderungan perilaku yang telah menjadi kebiasaan yaitu membuang tinja di ladang dengan cara ditimbun, walaupun pada sebagian besar masyarakat sudah dibantu pemerintah dalam pemasangan wc rumah tangga dan wc komunal, namun sulitnya merubah *mindset* masyarakat tersebut mengakibatkan bantuan sarana prasarana pembuangan tinja tersebut mengalami kerusakan, karena tidak dirawat dan terpakai dengan baik. Selain itu pula adanya kecemburuan dalam pengelolaan bersama wc komunal menjadi salahsatu penyebab tidak terpeliharanya sarana-prasarana pembuangan tinja bantuan dari pemerintah.

Sebagai gambaran masyarakat Kabupaten Sukamara mengenai penggunaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S) dan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) terlihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk dan Perilaku BABS serta SPAL-S Per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jlh Penduduk	Jlh KK	Jlh Penduduk Miskin	BABS	Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S)		
					Jlh KK	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama
1	Kecamatan Sukamara (8 Kel/desa)	23.821	6.743	396	1.181	2.651	2.823	3
2	Kecamatan Balai Riam (8 Kel/Desa)	7.641	2.038	279	332	660	991	0
3	Kecamatan Jelai (5 Kel/Desa)	4.951	1.356	176	520	77	630	20
4	Kecamatan Permata Kecubung (7 Desa)	11.217	2.956	363	1.983	606	346	9
5	Kecamatan Pantai Luncl (4 desa)	5.439	1.493	340	304	323	819	16
Total		53.069	14.584	1.554	4.320	4.317	5.609	48

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara 2018 (diolah)

Sementara itu, dukungan program sanitasi dan lingkungan yang didanai oleh APBD Kabupaten Sukamara dibawah alokasi anggaran 2,5% dari yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berkisar 2,5% sampai 5%. Dilain pihak alokasi bantuan sosialisasi program sanitasi yang disediakan oleh pemerintah pusat berkurang seiring dengan selesainya program sanitasi pada tahun 2019. Dengan dana yang minim tersebut disinyalir dukungan pelaksanaan

program tidak berjalan optimal, selain sosialisasi yang kurang optimal juga minimnya pengetahuan tentang PHBS sehingga ada sebagian masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak mau menerima bantuan. Selanjutnya pada tataran *grassroot* belum ditemukan komunitas masyarakat peduli lingkungan padahal dengan terbentuknya komunitas ini akan sangat berperan dalam mendukung program sanitasi dan membantu merawat dan menjaga lingkungan.

Menurut Informasi dari Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara bahwa target program sanitasi pada tahun 2019 mencapai 100 persen, namun ternyata dalam pelaksanaannya masih mencapai 40 persen. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena dengan tidak tercapainya program maka berhubungan dengan pencapaian kualitas pemenuhan kebutuhan dasar menjadi terhambat. Padahal masalah perumahan telah diatur dalam bab III pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman yang berbunyi "*Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur*"

Undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa adanya peran pemerintah dalam menciptakan sanitasi dan kesehatan lingkungan yang baik dan tentunya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Sukamara. Maka dari itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara sebagai salahsatu penanggung jawab dalam hal pembangunan sanitasi dan kesehatan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dan kesehatan lingkungan harus mampu

memberikan pelayanan serta menyediakan sarana dan prasarana sanitasi dan kesehatan lingkungan yang layak bagi masyarakat terutama yang kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

Dalam suatu masyarakat bagaimanapun sederhananya, selalu ada suatu mekanisme untuk bereaksi terhadap suatu stimulasi. Mekanisme ini disebut mekanisme pemecahan atau proses pemecahan masalah. Mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat sebenarnya tidak lain merupakan upaya mengembangkan mekanisme atau proses pemecahan masalah tersebut agar terdapat kesesuaian antara keinginan pemrakarsa dengan keinginan masyarakat.

Terdapatnya perbedaan persepsi menyebabkan hambatan dan berkembangnya mekanisme atau proses pemecahan masalah tersebut, sehingga berpengaruh pula terhadap perkembangan dan pembinaan partisipasi masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan tahap-tahap pemecahan masalah, maka tahap-tahap partisipasi dapat dikelompokkan menjadi (Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2001):

1. Partisipasi dalam tahap pengenalan dan penentuan prioritas masalah.
2. Partisipasi dalam tahap penentuan cara pemecahan masalah (tahap perencanaan).
3. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan, termasuk penyediaan sumber daya.
4. Partisipasi dalam tahap penilaian dan pematapan.

Dari tahap-tahap partisipasi tersebut, jelas bahwa pada setiap tahapan, bentuk partisipasi masyarakat berbeda, namun pada dasarnya partisipasi yang ideal mencakup semua tahap, yaitu dalam pengenalan masalah, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pematapan. Tahap-tahap partisipasi masyarakat tergantung pada persepsi masing-masing, yang paling banyak kita jumpai adalah bahwa partisipasi

masyarakat dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kelompok Swadaya masyarakat (KSM).

Dalam suatu kegiatan, umumnya masyarakat menyumbangkan tenaga dan atau sumber daya masyarakat lainnya seperti biaya, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Ini merupakan partisipasi masyarakat hanya pada tahap pelaksanaan dan penyediaan sumber daya, sedangkan tahap pengenalan masalah dan perencanaan, sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak KSM. Keadaan seperti ini jelas sulit untuk menciptakan rasa turut memiliki dan bertanggung jawab di lingkungan masyarakat, karena mereka tidak terlibat sejak permulaan. Masyarakat menduga bahwa kegiatan ini adalah demi kepentingan KSM, bukan untuk kepentingan masyarakat.

Beberapa hal penting dalam tinjauan partisipasi masyarakat dalam peningkatan sanitasi lingkungan adalah bahwa partisipasi masyarakat tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui berbagai pendekatan dan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan yang harus menjadi perhatian adalah seberapa jauh keinginan masyarakat akan sarana yang akan dibangun, apakah aspirasi-aspirasi yang muncul menjadi keinginan perorangan, kelompok, ataupun masyarakat secara umum, ketersediaan biaya dari masyarakat, bahan dan tenaga lokal, waktu yang dapat disediakan masyarakat, keterampilan masyarakat yang dapat dimanfaatkan, tingkat penerimaan masyarakat tentang teknologi yang akan diterapkan.

Berkaitan dengan fenomena tersebut diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian "***PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM SANITASI DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SUKAMARA***".

B. Perumusan Masalah

Program Sanitasi dan penyehatan lingkungan yang diluncurkan oleh pemerintah menghendaki keterlibatan semua pihak terutama masyarakat selain sebagai penerima manfaat juga sebagai pelaku atau subjek dari pembangunan, maka berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Sukamara?
- b. Faktor-Faktor apa sajakah yang menjadi Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Sukamara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1 Mengetahui dan Menganalisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Sukamara?
- 2 Mengetahui dan Menganalisis Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Sukamara?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian digunakan dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya memperkaya khasanah Ilmu Kebijakan Publik terutama implementasi kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian partisipasi masyarakat dalam program pemerintah dapat memberikan sumbangan pemecahan masalah terkait dengan masalah sanitasi dan kesehatan lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Pemerintah dalam bahasa Inggris yaitu “*government*” diartikan sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota dan sebagainya, sedangkan istilah pemerintahan atau *governance* yaitu *the act, fact, manner of governing* (tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. (Sedarmayanti, 2004:2)

Pemerintahan adalah suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang kompleks sebagai jalan bagi warga negara (*citizens*) dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya, dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan diantara mereka. (Widodo, 2011:108)

Pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tak dapat dihindarkan dalam hidup setiap warga Negara, memiliki banyak arti bagi mereka, secara perorangan atau secara bersama-sama. Pemerintah adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warga Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya ada tantangan dan kendala, bahwa memang benar dinyatakan tidak ada model yang sempurna dalam pemerintahan maka diperlukan perbaikan dan pengembangan (Hamdi, 2014: 144) sebagaimana pula harapan terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan

berwibawa (*clean and good governance*) telah lama menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa (Widodo 2011:107). Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan lingkup hubungan pusat dan daerah telah terjadi perubahan besar sebagaimana diungkapkan Pasalong (2015: 124) bahwa paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari *rule government* menjadi *good governance* atau *from government to governance*, menggeser peran sentralistik menjadi desentralisasi dan tumbuh kembangnya masyarakat kearah pemberdayaan (*empowering*)

Istilah “Kepemerintahan” (*Governance*) berarti tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan (Mustafa, 2018: 184). Selanjutnya Rochman dalam Widodo (2011;107) *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Hal yang sama Mardiasmo dalam Mustafa (2018:185) mengartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik, yaitu urusan hajat hidup orang banyak sebagaimana tercantum dalam pasal 33 konsitusi atau Undang-undang dasar Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut UNDP dalam Widodo (2011:109) menyatakan sistem pemerintahan mencakup dalam proses dan struktur masyarakat yang mengarahkan hubungan-hubungan sosio-ekonomi dan politik untuk melindungi budaya, keyakinan agama, dan nilai-nilai, serta menciptakan dan memelihara suatu lingkungan yang sehat, bebas, aman, dan memberikan kesempatan melatih kapabilitas tiap indivindu yang mengarah pada suatu kehidupan yang lebih baik bagi setiap manusia.

Selanjutnya Rewansyah dalam Mustafa (2018:185) *governance* (keperintahan) yang merujuk kepada proses yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara dengan melibatkan bukan saja Negara diwakili oleh pemerintah tetapi juga semua stakeholder yang ada, baik itu dunia usaha/bisnis dan masyarakat madani (*civil society*).

UNDP membagi penyelenggaraan pemerintahan. (Widodo 2011: 110-112) sebagaimana Sedarmayanti (2004:4) juga mengungkapkan unsur-unsur pemerintahan (*governance*) menjadi tiga yakni : *the state, the private sector, dan civil society organizations* sebagai berikut :

1. Negara/Pemerintahan (*The State*)

Dimana dalam implementasinya kegiatan penyelenggaraan Negara mengikutsertakan swasta dan masyarakat. Tugas terpenting negara pada masa ke depan yang diciptakan oleh lingkungan politik yakni mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dengan meredefinisi peran pemerintahan dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi, dan melindungi lingkungan, melindungi kerentanan dalam masyarakat, menciptakan komitmen politik mengenai infrastruktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintah, memperkuat finansial dan kapasitas administratif pemerintah lokal, kota dan metropolitan. Institusi pemerintah juga perlu memberdayakan rakyat. Dimana eksistensi pemerintahan dikehendaki memberikan layanan untuk menyediakan kesempatan yang sama dan menjamin inklusivitas sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan hanya dapat terjadi dalam suatu lingkungan institusi yang kondusif yang terdiri atas sistem fungsi legislasi dan proses pemilihan yang tepat, legal, dan yudisial.

2. Sektor Swasta (*The Private Sector*)

Dimaksudkan sebagai pelaku sektor swasta berperan aktif dalam hubungannya dengan sistem pasar. Maka dalam pendekatan pasar, swasta –pasar memainkan peran yang sangat penting dalam penciptaan kondisi pengelolaan kegiatan jasa, produksi dan distribusi yang berjalan baik

3. Masyarakat Madani (*Civil Society Organization*)

Kelompok masyarakat berada diantara antara pemerintah dan individu, tergantung kepada organisasi masyarakat sipil, yang memfasilitasi interaksi sosial politik dan yang memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Organisasi masyarakat sipil tidak hanya melakukan check and balance terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta.

Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan, dan praktik terbaiknya dinamakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Mustafa (2018:185)

Selanjutnya Sedarmayanti (2004:3) menyatakan bahwa secara konseptual pengertian kata “baik (*good*), dalam istilah *good governance* mengandung dua pemahaman : *pertama*, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua* dari

aspek fungsional dari pemerintah secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.

Good governance menurut LAN dalam Widodo (2011) adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, yakni dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Sistem pemerintahan yang baik adalah partisipasi yang menyatakan bahwa semua anggota institusi governance memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan.

Secara sederhana *good governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik, yaitu mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. (Mustafa, 2018: 186). Selanjutnya *United Nation Development Program* (UNDP) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (Widodo, 2011:116-117) dan Mardiasmo dalam Mustafa (2018:190) menyatakan karakteristik *good governance* sebagai berikut.

1. *Participation* (Partisipasi). Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi (lembaga perwakilan) sesuai kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi seperti itu, dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Organisasi masyarakat sipil dapat menyalurkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonomi dan mengorganisasikan mereka ke dalam suatu kelompok yang lebih potensial mempengaruhi kebijakan publik.

- Masyarakat terdiri atas individu maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Society meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain (LAN, 2000:6).
2. Aturan Hukum (*Rule of law*). Kerangka aturan hukum harus berkeadilan, dipatuhi dan ditegakkan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
 3. Keterbukaan (*Transparency*). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Organisasi sipil dapat membantu memonitor lingkungan, penipisan sumber daya, polusi dan kekejaman sosial, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dengan membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat dan menawarkan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki standar hidup mereka.
 4. Daya tanggap (*Responsiveness*). Lembaga-lembaga dan proses-proses diarahkan dalam rangka untuk melayani setiap yang berkepentingan (*stakeholders*).
 5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus orientation*). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang luas, baik dalam halm kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
 6. Berkeadilan (*Equity*). Pemerintahan yang baik berkewajiban memberi kesempatan bagi semua warga negara, baik pria maupun wanita dalam meningkatkan, memelihara kualitas atau menjaga kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and efficiency*). Setiap Proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuai kebutuhan dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (*Accountability*). Para pembuat atau pengambil keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (*civil society*) bertanggung jawab kepada masyarakat luas dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung kepada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. Visi Strategis (*Strategic vision*). Para pemimpin dan masyarakat harus mempunyai perspektif tentang *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan, sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Ada empat prinsip mengenai deskripsi administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu (Sedarmayanti:2004:7) :

1. Akuntabilitas: adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi : pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan: menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

4. **Aturan Hukum** : Kepemerintahan yang baik mempunyai jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Good governance berorientasi pada dua hal. Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional (Widodo, 2011) yakni meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, pemerintahan yang baik (*good governace*) dapat disimpulkan sebagai pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, dan kebijakan yang dibuat, baik secara politik hukum maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik. Selanjutnya membuka kesempatan publik melakukan kontrol (pengawasan) dan mempertanggungjawabkan secara hukum serta menerima tindakan hukum bila terjadi pelanggaran.

2. Konsep Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi dan Istilah Gotong Royong

Pengertian secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. (Mardikanto dan Soebiato : 2017:81).

Selanjutnya Dusseldorf dalam Siswanto (2012:27) menyatakan bahwa partisipasi diartikan kegiatan atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktivitas

untuk mencapai suatu kemanfaatan secara optimal.

Pendefinisian partisipasi dari Bornby dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:81) adalah sebagai tindakan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Dari sini dapat terungkap bahwa partisipasi merupakan aktivitas bersama, dengan meminjam istilah Koentjaraningrat (1981) merupakan kegiatan gotong royong yang mempunyai makna dan istilah berbeda, di daerah Karanganyar-Kebumen dulunya kegiatan gotong royong dilaksanakan untuk kegiatan bercocok tanam yang melibatkan orang banyak berhubung luasnya sawah yang ingin ditanam. Kompensasi yang diberikan berupa menyediakan makanan saat kegiatan berlangsung, tanpa upah dan bilamana ada petani lain melakukan hal serupa maka ada kewajiban moral untuk turut serta.

Dalam perkembangannya sejak masuknya alat pertukaran ekonomi berupa uang, seiring dengan berkurangnya lahan pertanian dan adanya penawaran jasa untuk pekerjaan bercocok tanam, maka lebih praktis membayar jasa dengan upah harian.

Lebih lanjut dikemukakan Koentjaraningrat (1981) selain *sambatan* istilah adat desa yang dipakai di Jawa Tengah yang mulai ditinggalkan berarti "minta bantuan" dengan sopan santun adat dan kewajiban menjamu yang merepotkan, ada aktivitas tolong menolong lainnya yang tampak dalam kehidupan masyarakat antara lain :

5. Aktivitas tolong menolong antara tetangga yang tinggal berdekatan untuk pekerjaan kecil sekitar rumah dan pekarangan, di daerah karanganyar-Kebumen dinamakan *guyuban*, misalnya mengecat rumah, memperbaiki atap rumah atau

menggali sumur.

6. Aktivitas tolong menolong antara kaum kerabat (termasuk didalamnya adalah tetangga yang terdekat), hal ini dilakukan untuk menyelenggarakan pesta adat berupa khitanan, mandi tujuh bulanan, pemberian nama dan kegiatan adat lainnya. didaerah Karanganyar-Kebumen disebut *njurung*.
7. Aktivitas Spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untuk membantu secara spontan pada waktu penduduk desa mengalami kejadian bencana, didaerah Karanganyar-Kebumen disebut *tetulung layat*.

Dari uraian diatas maka makna aktivitas gotong royong cenderung bersifat ekonomis, ada kompensasi atau imbalan yang diterima seperti terlihat dalam *sambatan, guyuban, njurug*. Disisi lain kegiatan gotong royong tanpa pamrih, spontan dan tanpa imbalan terlihat dalam kegiatan *tetulung layat*.

Mengulang pendapat Koentjaraningrat (1981) bahwa masih ada kegiatan yang disebut gotong royong adalah kerja bakti yaitu pengerahan massa dalam kegiatan proyek program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas bersifat sukarela, tanpa bayaran.

Dari beberapa definisi diatas, karakteristik partisipasi sejalan dengan kegiatan kerja bakti yang melibatkan orang secara sukarela melakukan dan mengambil manfaat secara bersama-sama dalam suatu program pemerintah atau yang lahir dari masyarakat itu sendiri, .

b. Partisipasi Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat (1981) partisipasi rakyat dalam pembangunan menyangkut dua tipe yaitu (1) partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam

proyek-proyek pembangunan yang khusus; (2) partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

Menyangkut yang *pertama* rakyat diajak, dilibatkan atau dipaksa oleh aparat terkait dengan pembangunan untuk menyetujui proyek-proyek pembangunan yang bersifat fisik. Rakyat diajak menyumbangkan tenaga juga dana atau dengan upah yang minim, misalnya adalah pelebaran jalan, pembuatan jembatan, irigasi desa. Bila sesuai dengan keinginan dan menyentuh kebutuhan mereka maka partisipasi rakyat dengan semangat dan spontanitas yang besar, sebaliknya bila tidak sesuai maka semangat yang lebih didominasi oleh keadaan terpaksa atau rodi.

Selanjutnya tipe partisipasi yang *kedua*, karena tidak ada proyek aktivitas bersama, biasanya partisipasi tidak bersifat fisik tetapi menyangkut kemauan atau kesadaran dari dalam diri sendiri, misalnya adalah menyangkut memelihara sarana prasarana yang telah dibangun pemerintah, ikut serta dalam gerakan masyarakat sehat, menabung ataupun menjadi akseptor keluarga berencana.

Menurut Arnstein (1969) dalam "*A Ladder of citizen Participation*" mengemukakan tingkatan partisipasi dari yang paling bawah adalah sebagai berikut (1) *Manipulasi* dan (2) *Terapi*. Pada kedua tingkatan ini menggambarkan tingkat "*non-partisipasi*" karena masyarakat bersifat pasif, hanya sebagai penerima sesuatu dari pihak eksternal, Tingkatan ke (3) *pemberian informasi* dan (4) *Konsultasi*. berkembang ke tingkat "*diarahkan*" yang memungkinkan orang untuk memperhatikan dan memiliki suara dalam menentukan pengambilan keputusan Tingkatan yang ke (5) *Placation/penetapan pilihan*, pada tingkatan ini walaupun masih ada "*arahan/penggiringan* dari pihak eksternal yang lebih tinggi (pemerintah)

namun masih memungkinkan masyarakat menentukan pilihan. Tingkatan yang ke (6) *Kemitraan* adalah tingkatan yang memungkinkan mereka untuk bernegosiasi dan terlibat dalam pertukaran pandangan dengan elit masyarakat setempat. Pada tingkatan teratas, (7) *Delegasi kekuasaan*, telah terjadi negosiasi antara warga negara dan elit dapat mengakibatkan warga negara mencapai otoritas pengambilan keputusan yang dominan atas rencana dan program tertentu dan (8) *Kontrol Masyarakat*, rakyat memiliki andil besar dalam pengambilan keputusan untuk memilih pemimpinnya, dan rakyat berkuasa penuh.

Bersamaan dengan pendapat diatas Cohen dan Uphoff (dalam Siswanto 2012) membedakan empat jenis partisipasi yaitu : *pertama* partisipasi dalam mengambil keputusan, *kedua* partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga* partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi.

Penjabaran selanjutnya menurut Siswanto (2012:29-32), dari keempat jenis partisipasi sebagai berikut:

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang berkaitan dengan rencana pembangunan.hal ini sangat penting karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Koentjaraningrat (1981) menyatakan bahwa kalau rakyat ikut serta berdasarkan keyakinannya maka partisipasi atau spontanitas akan meningkat tinggi. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil seseorang menurut Pasolong (2008:162) adalah posisi, masalah, situasi, kondisi, tujuan dan kepribadian. Adapun wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menurut Cohen dan

- Uphoff (dalam Siswanto 2012: 30) meliputi: keikutsertaan dalam rapat, tukar pendapat, memberi masukan, menolak atau menerima suatu kegiatan program.
- (2) Dalam pelaksanaan atau implementasi kegiatan, partisipasi masyarakat merupakan lanjutan rencana kegiatan yang telah disepakati sebelumnya . Dalam teori kebijakan pada tahapan implementasi melibatkan serangkaian kegiatan meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrument kegiatan yang digunakan, staf yang melaksanakan program, anggaran yang telah disiapkan dan laporan-laporan yang akan dievaluasi (Suharto:2007:36). Sedangkan ruang lingkup partisipasi menurut Ndraha, Cohen dan Uphoff (dalam Siswanto, 2012) dalam pelaksanaan suatu program meliputi : *pertama*, menggerakkan sumber daya dan dana. *Kedua*, kegiatan administrasi dan kordinasi. *Ketiga*, penjabaran program.
- (3) Partisipasi dalam mengambil manfaat. Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Siswanto, 2012) partisipasi dalam mengambil manfaat dibedakan menjadi empat yaitu manfaat materi dalam pendapatan, manfaat sosial seperti dibidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan masyarakat, keuntungan pribadi dalam system dan keuntungan dalam politik dan control sosial. Menurut Ndraha (dalam Siswanto 2012) juga dikatakan bahwa partisipasi dalam mengambil manfaat meliputi hal-hal sebagai berikut : (1) menggunakan sesuatu barang yang diberikan dari pihak eksternal seperti milik pribadi. (2) menjadikan sesuatu lapangan usaha, mengeksploitasikan. (4) memelihara secara rutin dan sistematis serta tidak membiarkannya rusak.
- (4) Partisipasi dalam evaluasi, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah

program yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau menyimpang (Siswanto, 2012). Lebih jauh dikatakan bahwa tugas evaluasi, penilaian atau pengawasan bukan hanya tugas perorangan akan tetapi meliputi tugas lembaga formal dan seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya kontrol pengawasan maka dapat menjadi bahan perbaikan program dimasa mendatang.

Pada penelitian ini maka yang menjadi fokus adalah partisipasi masyarakat diluar aktivitas bersama dalam pembangunan, yang meliputi tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi .

c. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat/kelompok terdapat beberapa wujud dari partisipasi :

1. Vaneklasen dan Miller dalam Handayani (2006) membagi partisipasi atas:

a. Partisipasi Simbolis

Masyarakat duduk dalam lembaga resmi tanpa melalui proses pemiliban dan tidak mempunyai kekuasaan yang sesungguhnya. Contohnya berupa partisipasi dari Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD) / Lembaga Masyarakat Desa (LMD) / Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh Sastropetro (1988:13) adalah Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau

pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok.

b. Partisipasi menerima hasil (Pasif)

kegiatan warga negara yang mendukung kelancaran pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

c. Partisipasi dalam pemberian saran/masukan (konsultatif)

Masyarakat didikte untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari pihak eksternal pemberi manfaat, sedangkan pihak eksternal mendengarkan, menganalisa masalah dan pemecahannya, peluang keputusan masih dari pihak pemberi Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

d. Partisipasi dengan Insentif Material

Memiliki karakteristik masyarakat memberikan korbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak

dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan. Masyarakat menyumbangkan tenaganya untuk mendapatkan makanan, uang, atau imbalan lainnya. Masyarakat memberikan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan. Masyarakat menyediakan sumber daya, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga mereka tidak memiliki keterikatan untuk meneruskan partisipasinya ketika masa pemberian insentif selesai.

e. Partisipasi Fungsional

Masyarakat berpartisipasi karena adanya permintaan dari lembaga eksternal untuk memenuhi tujuan. Mungkin ada keputusan bersama tetapi biasanya terjadi setelah keputusan besar diambil.

f. Partisipasi Interaktif

Masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan dan menganalisa rencana kerja, memiliki karakteristik masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang di sepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya. Dari sini perlahan-lahan terlihat

masyarakat bertindak sebagai aktor penentu dan memiliki kesiapan dalam pelaksanaan program.

g. **Pengorganisasian Diri**

Masyarakat berpartisipasi dengan merencanakan aksi secara mandiri. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga eksternal untuk sumber daya dan saran-saran teknis yang dibutuhkan, tetapi kontrol bagaimana sumber daya tersebut digunakan berada di tangan masyarakat sepenuhnya.

3. **Kendala dan Pendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Proses pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat merupakan keniscayaan di era demokrasi sekarang ini. Pola interaksi yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat adalah setara, masyarakat tidak lagi sebagai obyek melainkan berperan aktif dalam pembangunan dengan kata lain peran serta masyarakat adalah hal yang utama. Namun dalam proses nya partisipasi masyarakat mengalami kendala seperti diungkapkan oleh Soetrisno dalam Mardikanto dkk (2017:95) ada beberapa masalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat yaitu :

1. Belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan.
2. Sikap otoriter aparat, menimbulkan reaksi budaya diam, yang pada gilirannya menurunkan gairah masyarakat untuk berpartisipasi.
3. Banyaknya peraturan yang meredam masyarakat untuk berpartisipasi.

Sejalan dengan pendapat diatas Siswanto (2012:50-51) mengungkapkan bahwa kurang berdayanya masyarakat dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya

adalah aspek politik, dimana disini dijelaskan kuatnya peran pemerintah dan organisasi politik yang tidak disadari justru telah menekan hak dan kemandirian masyarakat, pembatasan hak masyarakat dalam menyampaikan hak berpendapat dan berorganisasi, kurangnya akses keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik yang menyangkut kehidupan masyarakat secara langsung.

Sedangkan dari aspek sosial yaitu kemiskinan structural akibat pengaruh lingkungan sosial budaya, faktor pengetahuan, keterampilan dan informasi, kelembagaan kurang berkembang, kurang kuatnya kelembagaan melindungi kepentingan/kebutuhan dasar akibat krisis ekonomi, belum mampunya kelembagaan menjadi corong untuk mensosialisasi kan terhadap keadilan sosial, kurangnya kepedulian atas perilaku pejabat publik yang ada disekitar mereka.

Selanjutnya Slamet dalam Mardikanto dkk (2017:91) menyatakan bahwa tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat yang dapat dijadikan pendorong berupa (1) adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat (2) adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan (3) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat merupakan perubahan pola paradigma pembangunan yang menghendaki masyarakat bukan lagi sebagai obyek melainkan sebagai aktor pembangunan yang sangat menentukan karena lebih mengenal karakteristik kebutuhan di daerahnya. Disisi lain adanya kemauan masyarakat lebih cenderung kepada sikap perilaku masyarakat yang berupaya merubah kehidupannya kearah yang lebih baik. Sedangkan kemampuan untuk berpartisipasi berkaitan dengan kemampuan dalam memahami, melaksanakan dan

memecahkan masalah yang dihadapinya.

4. Kelompok Swadaya Masyarakat Sebagai Sumber Daya Berbasis Komunitas Lokal

Salahsatu perbedaan penting antara pembangunan yang memihak rakyat dengan pembangunan yang memihak rakyat dengan pembangunan yang mementingkan produksi adalah, bahwa pembangunan yang memetingkan produksi produksi secara terus-menerus memempatkan kebutuhan rakyat dibawah kebutuhan system produksi, sedangkan pembangunan yang memihak rakyat dengan teguh berupaya agar system produksi tunduk pada kebutuhan rakyat (Korten dalam Soetomo 2013;393-394). menyandarkan pada pendapat Siswanto (2012) pembangunan yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat akan mengurangi kebergantungan kepada yang memberi dalam hal ini pemerintah, maka dari itu paradigma pembangunan diarahkan bagi terciptanya pemerataan pembangunan disegala bidang kehidupan. Masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang diusahakan dan dikelola sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut pola interaksi yang dibangun lebih mengedepankan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat yakni gotong royong, solidaritas kelompok.

Perubahan paradigma tersebut lebih menjanjikan kemungkinan yang cukup luas bagi proses pembangunan masyarakat yang benar-benar manusiawi yang menempatkan inisiatif atau prakarsa dan kreatifitas rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama.

Paradigma ini memanfaatkan individu sebagai aktor yang menentukan tujuan, mengontrol atau mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mengakomodasi perbedaan dan prakarsa lokal, karena itu mendukung bahkan mendorong tumbuhnya proses yang bersifat swakelola sebagai bentuk kemandirian masyarakat lokal dalam melakukan aktivitas pembangunannya. (Soetomo, 2013:395).

Long dalam bukunya Sosiologi Pembangunan Pedesaan menjabarkan perbedaan teori modernisasi dan teori ketergantungan, dimana kesamaan keduanya pada pembangunan sosio ekonomi umum dengan pusat analisa peran faktor eksternal dalam menimbulkan perubahan. Negara barat berevolusi dalam industrinya dalam term internal, sementara dunia ketiga berevolusi pada term eksternal, oleh karenanya keterbelakangan dan tradisional menjadi hambatan yang memerlukan penyebaran perubahan yang dimulai dari pusat kota menjalar ke desa (Sukidin, 2009:211). Usman (1998:3) menambahkan kegiatan ekonomi suatu bangsa yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan internasional akan menumbuhkan apa yang lazim disebut *global governance*. Dengan demikian permasalahan ekonomi dan politik suatu Negara bukan hanya menjadi milik negara tersebut tetapi menjadi bagian persoalan Negara-negara lain.

Dari pandangan tersebut menjadi jelaslah peran Negara sangat sentral dalam menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya, yang selanjutnya adanya stimulan sebagai sarana pihak eksternal (pemerintah) dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan dari bawah (*local community*) .

Siswanto (2012:58) menyatakan bahwa ciri utama memberdayakan ekonomi lokal adalah dengan menitikberatkan pada kebijakan "endogenous development" menggunakan potensi sumber daya manusia, lembaga dan fisik setempat (lokal). Berkaitan dengan pendapat tersebut diatas Soetomo (2013: 384) dalam bukunya yang berjudul Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat menerjemahkan istilah pemberdayaan masyarakat lokal Pengelolaan sumber daya berbasis komunitas (*community Based Resources Management*) sebagai strategi pembangunan masyarakat yang memberi peran dominan kepada masyarakat pada tingkat komunitas untuk mengelola proses pembangunan, khususnya dalam mengontrol dan mengelola sumber daya produktif. Strategi pengelolaan sumber daya berbasis komunitas ini peranan prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan menjadi sangat sentral.

Asumsi diatas menurut Usman (1998:23) beranjak dari kondisi buruk daerah permukiman, perumahan, sanitasi lingkungan, tingkat nutrisi dan rendahnya penghasilan bukan sekedar atribut kemiskinan, melainkan juga karena sumber ekonomi yang terbatas sehingga orang kurang memperhatikan kesehatan, dan dalam kondisi yang lama akan membuat masyarakat tidak berdaya dan miskin.

Lebih lanjut dikemukakan Soetomo (2013) dalam strategi ini masyarakat terlibat dalam seluruh proses pembangunan sejak indentifikasi masalah dan kebutuhan serta perumusan program. Selanjutnya yang terpenting menurut Mardikanto dan Soebiato (2017:31) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam strategi ini pengelolaan pembangunan, khususnya sumber daya, tidak berada pada pihak pemerintah secara terpusat, tetapi berada pada masyarakat lokal. Untuk maksud tersebut diperlukan kapasitas masyarakat lokal dalam melakukan identifikasi kebutuhan, identifikasi sumber daya merumuskan tujuan, dan mengelola serta mendayagunakan sumber daya manusia.

Korten dalam Soetomo (2013) mengemukakan tiga hal yang dapat menjadi dasar mengapa pelaksanaan pembangunan masyarakat tidak dapat dilakukan secara seragam dan dikelola secara terpusat yaitu:

1. Adanya variasi lokal ditunjukkan oleh kenyataan bahwa kehidupan komunitas secara substansial diwarnai oleh variasi dilihat dari lingkungan alam dan sosialnya.
2. Sumber daya lokal, pada tingkat komunitas masih kental dengan kesadaran kolektif, solidaritas sosial dan kepentingan bersama, komitmen tentang suatu gagasan sebagai bentuk prakarsa dan kreativitas dari dalam, mereka berusaha untuk memobilisasi sumber daya yang ada melalui tindakan bersama guna merealisasikan gagasan tersebut.
3. Tanggung jawab lokal, idealnya menggunakan prinsip bahwa kontrol terhadap suatu tindakan semestinya berada pada pihak yang akan menanggung akibat dari tindakan tersebut. Untuk meningkatkan kapasitas control masyarakat lokal terhadap keputusan tindakan yang akan dijalankan, diperlukan suatu organisasi dan pendekatan yang dapat mendorong inisiatif lokal, tanggungjawab lokal dan pengelolaan secara mandiri yang dapat memperkuat proses belajar sosial.

Komunitas masyarakat (*local community*) merupakan lembaga organisasi tingkat masyarakat paling bawah dalam program sanitasi penyehatan lingkungan yang dituju dalam penelitian ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang mana disebutkan dalam buku petunjuk PANSIMAS 2015 bahwa Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif dan oleh karenanya juga berperan sebagai representasi warga yang berhimpun dalam suatu "himpunan masyarakat warga setempat" yang bersifat organisasi anggota atau bertumpu pada anggota, sehingga keputusan tertinggi ada di tangan anggota. (Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian PUPR, 2015:3)

Strategi pengelolaan sumber daya berbasis komunitas memiliki karakteristik utama diantaranya adalah desentralisasi, pemberdayaan, proses belajar sosial dan keberlanjutan. (Soetomo, 2013:395)

1. Desentralisasi

Dalam prinsip otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik (Siswanto, 2012:58), maka strategi dalam desentralisasi terutama dilakukan dalam pengambilan keputusan yang meliputi keseluruhan proses pembangunan, mulai dari identifikasi persoalan dan kebutuhan, penyusunan dan pengelolaan program. Strategi ini dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan swakelola, dengan pengertian masyarakat lokal yang terwujud dalam KSM mendapat peluang yang seluas-luasnya untuk mengelola kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Selain

itupula pada dasarnya masing-masing masyarakat lokal memang memiliki kondisi, persoalan dan potensi yang berbeda.

Desentralisasi perlu diikuti dengan perubahan metode dan mekanisme dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan wewenang kepada masyarakat, karena masyarakatlah yang akan menanggung akibat keputusan itu, bukannya pada pemimpin lokal.

Terselenggaranya desentralisasi dalam bentuk swakelola diperlukan beberapa prasarat (Soetomo, 2013:399) yaitu :

- a. Mekanisme baru dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perlu difasilitasi dalam bentuk institusi yang cukup mengakar dalam masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pemberian kewenangan kepada masyarakat local dalam pengambilan keputusan yang didukung oleh kapasitas masyarakat, karena tanpa didukung kapasitas untuk melakukannya tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Kapasitas didapat kan dari pengalaman dan proses belajar sosial.
- c. Desentralisasi mengandung makna pendelegasian wewenang kepada level yang lebih rendah yaitu kepada masyarakat local. Dalam praktiknya pelaksanaan pembangunan masyarakat, tidak jarang dijumpai kehadiran institusi bentukan baru dari atas, yang secara formal diberi fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dan memfasilitasi pengambilan keputusan dari bawah. Oleh karena itu program yang sebetulnya bersifat *top down* kemudian secara formal dan

procedural dikondisikan sebagai seolah-olah bersifat *botton up* melalui mekanisme dalam institusi ini.

2. Pemberdayaan

Aspek sumber daya manusia sebagai aktor utama dalam proses pembangunan, maka pemberdayaan berarti proses untuk mengaktualisasikan potensi manusia, meliputi kelestarian hidup, harga diri dan kebebasan (Goulet, korten dalam Soetomo, 2013). Dengan bekerjanya KSM yang salahsatu bentuknya tercermin dalam partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan menikmati hasil. Oleh karena itu suatu mekanisme pengelolaan pembangunan yang lebih bertumpu pada pendayagunaan kemampuan lokal serta memberikan peluang bagi berkembangnya kreativitas lokal yang perlu ditingkatkan (Siswanto, 2012:72)

3. Proses Belajar Sosial

Proses belajar sosial yang menggambarkan kemampuan manusia dan kelompok manusia sebagai mahluk belajar yang berperilaku demi mengubah dan merencanakan kembali perilaku tersebut. Proses belajar ini berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus bukan melalui jalur pendidikan formal melainkan melalui pengalaman dalam kehidupan bersama.

Salah satu prinsip dasar dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) diperlukan proses belajar, hal ini dalam rangka membuka peluang dan pengalaman individu atau komunitas bertujuan peningkatan kapasitas (Siswanto (2012:76). Hampir sama diungkapkan proses belajar sosial diartikan sebagai proses

interaksi sosial diantara warga masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui kegiatan-kegiatan pemecahan masalah yang seringkali dilakukan melalui *trial and error* (Tjokrowinoto dalam Soetomo, 2013: 411),.

Dalam perkembangannya proses belajar sosial seharusnya melibatkan tidak saja bagi warga komunitas KSM tetapi juga pihak lain yang terlibat dalam upaya pembangunan ditingkat komunitas baik pemerintah, non pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan sama-sama belajar atas bagaimana memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Factor penghambat yang sering dijumpai bagi orang luar untuk belajar dari pengetahuan dan kearifan lokal adalah masih adanya kesenjangan komunikasi antara pihak eksternal tersebut dengan masyarakat, sehingga kurang mampu memahami kerangka berpikir masyarakat, termasuk masih adanya prasangka bahwa masyarakat local khususnya masyarakat desa memiliki pengetahuan yang rendah disisi lain masih adanya anggapan bahwa pihak luar yang melaksanakan program desa sebagai pihak yang lebih menguasai pengetahuan. Dengan demikian pola hubungan antara masyarakat local dan pihak luar stakeholder bersifat kemitraan (Soetomo, 2013:414)

Dalam pendekatan proses belajar program-program pembangunan sekalipun berasal dari luar tetapi diusahakan agar tetap sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan local. (2013:415).

4. Keberlanjutan (Suistainability)

Hasil belajar dari proses sosial adalah peningkatan kapasitas baik pada tingkat warga masyarakat maupun pada tingkat komunitas KSM untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan komunitasnya secara lebih mandiri. (Soetomo, 2013: 419). Sebagaimana pendapat Siswanto (2012:65) bahwa pada umumnya kelompok masyarakat (pokmas) dibentuk berdasarkan kesamaan dan kepentingan, yang selanjutnya sebagai pengembangan sikap tanggungjawab bermasyarakat dan peningkatan mental wirausaha.

Maka apabila tindakan bersama tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan bersifat mandiri, maka dalam komunitas yang bersangkutan telah terjadi keberlanjutan pembangunan (*sustainability*).

Honadle dan Van Sant dalam Soetomo (2013:421) menyebutkan kriteria agar suatu program dari luar dapat melahirkan institusi yang dapat menjadi sarana berkelanjutan adalah :

1. Dapat menjadi saluran yang meningkatkan arus komunikasi dua arah.
2. Mereduksi factor resiko sampai minimal;
3. Mengadaptasikan aktivitas program dengan kondisi local;
4. Mengembangkan sumber daya local
5. Mendorong idependensi keputusan ekonomi politik masyarakat local
6. Mengoordinasikan dan mendistribusikan keuntungan dan kemanfaatan berbagai bentuk bantuan dari luar.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat peneliti :

Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Joko Purwo Aditya, Fakultas Teknik Unesa, 2013	Penurunan Salinitas Air Payau Dengan Proses Denerlisasi Sebagai Sumber Air Baku Penyediaan Air Bersih	Berdasarkan hasil penelitian kesehatan rumah tangga yang dilakukan pada tahun 2000, diketahui bahwa baru sekitar 38% penduduk pedesaan menggunakan jamban, sedangkan selebihnya masih membuang tinja (kotoran) di kali. Baru sekitar 60% penduduk kota dan 30% penduduk di pedesaan yang mendapatkan penyediaan air bersih.
2	Sri Utami, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 2014	Peran Masyarakat Dalam Penyehatan Lingkungan Di Kota Malang	Hasil penelitian yang lain pada tahun yang sama menunjukkan bahwa 41% rumah tangga di perkotaan membuang sampahnya di tempat pembuangan sampah 18% dengan cara mengubur sampah, 21% membakar sampahnya, dan sisanya membuang sampah secara sembarangan.
3	Muhammad Mujibul Fiqri, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2014.	Pelaksanaan Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Di Kota Surabaya	Keadaan perumahan adalah salah satu faktor yang menentukan keadaan higiene dan sanitasi lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh WHO bahwa perumahan yang tidak cukup dan terlalu sempit mengakibatkan pula tingginya kejadian penyakit dalam masyarakat. Rumah yang sehat dan layak huni tidak harus berwujud rumah mewah dan besar namun

			rumah yang sederhana dapat juga menjadi rumah yang sehat dan layak dihuni. Rumah sehat adalah kondisi fisik, kimia, biologi didalam rumah dan perumahan sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
4	Maman Purwanto, Universitas Tanjung Pura, Pontianak 2015	Hubungan Perilaku Pengguna Air Sumur dengan Keluhan Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Sumur Pada Pondok Pesantren di Bandung Barat	Kadar air tubuh manusia mencapai 68 persen, dan untuk tetap hidup air dalam tubuh tersebut harus dipertahankan. Kebutuhan air minum setiap orang bervariasi mulai dari 2,1 liter hingga 2,8 liter per hari, tergantung pada berat badan dan aktivitasnya. Namun, agar tetap sehat, air minum harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis. Peningkatan kualitas air minum dengan jalan mengadakan pengolahan terhadap air yang akan diperlukan sebagai air minum dengan mutlak diperlukan terutama apabila air tersebut berasal dari air permukaan. Air dengan Kualitas baik adalah air yang berasal dari sumber mata air pegunungan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan yaitu rasanya segar, dingin, tidak berbau, tidak berwarna, Ph normal dan TDS (<i>Total Dissolved Solid</i>) rendah.
5	Sumaryana Wibawa, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2015	Pola Dan Perilaku Penyemprotan Pestisida Terhadap Keluhan Kesehatan Petani Jeruk Di Kabupaten Kendal	Dampak buruk dari pestisida, para petani lebih dianjurkan menggunakan sistem pertanian organik yang tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Tetapi pertanian dengan metode ini juga memiliki resiko yaitu rentan untuk terserang hama. Tetapi hasil dari pertanian ini sangat sehat dan tidak

			akan mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, para petani diharapkan tidak terlalu banyak menggunakan pestisida dan melakukan pertanian organik. Pertanian organik ini sangat bermanfaat dan tidak memiliki efek samping yang membahayakan bagi lingkungan maupun tubuh.
6	Rizal Andreeyan, Universitas Mulawarman, 2014	Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda	Partisipasi masyarakat ditunjukkan dalam bentuk fisik berupa tenaga dan sumbangan, pemanfaatan hasil pembangunan, mengevaluasi dan yang mendukung adalah kesadaran dan inisiatif warga, sedangkan penghambat adalah kurangnya sosialisasi dan kurangnya peran tokoh masyarakat terutama RT.
7.	Ferdinand, Kalesaran dkk e-journal "Acta Diurna" Volume IV. No.5. Tahun 2015	Partisipasi Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado	Masyarakat lokal (KSM) dalam program PNPM Mandiri Perkotaan membagi BLM berdasarkan prioritas dan tidak sama tiap-tiap lingkungan, KSM sebagai lembaga yang dibentuk mengorganisir warga untuk turut serta dalam semua tahapan kegiatan, dalam pemanfaatan adanya iuran warga untuk pemeliharaan sarana prasarana yang dibangun, sedangkan dalam evaluasi partisipasi sebagai kontrol masyarakat rendah

C. Kerangka Pikir

Program sanitasi dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Sukamara merupakan program dari pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kondisi sanitasi permukiman di kabupaten/kota yang menghadapi masalah serius di salah satu

atau beberapa subsektor sanitasi, Terutama program yang sedang digulirkan adalah menyangkut system pembuangan air limbah (SPAL).

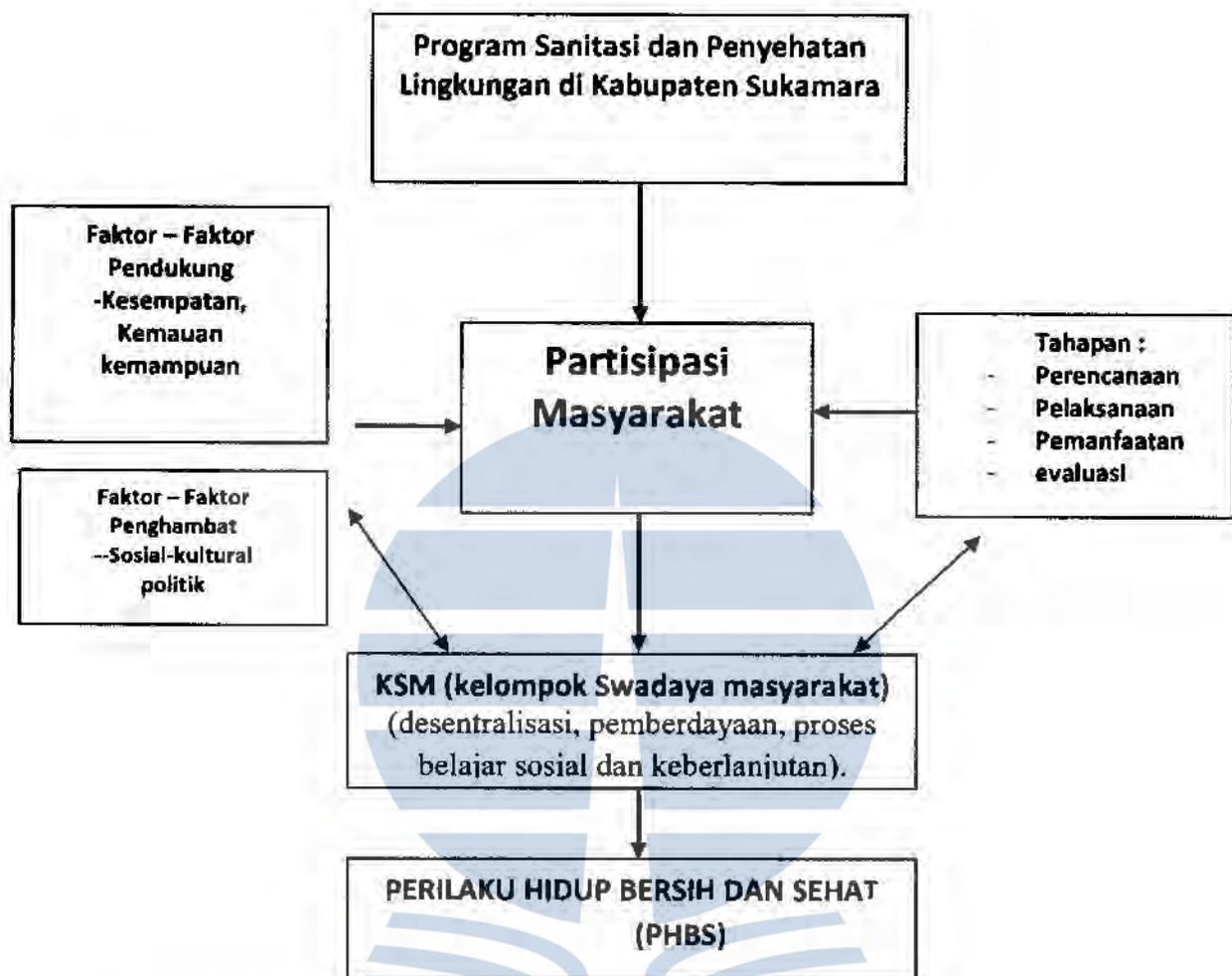
Program sanitasi dan penyehatan lingkungan yang didasarkan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan tidak akan berarti apa-apa tanpa keterlibatan komponen masyarakat yang dapat mengambil manfaat sebagaimana ada rasa memiliki, memanfaatkan sesuai fungsinya, mengusahakan dan memelihara secara rutin dan sistematis serta tidak membiarkan rusak.

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait mendorong kesuksesan program dengan melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan, membangun sarana prasarana fisik dan mengevaluasi serta menuntaskan program sanitasi di Kabupaten Sukamara hingga selesai. Sementara itu masyarakat yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM) diberdayakan dengan memberikan bantuan stimulan untuk merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, mengevaluasi proyek dengan strategi desentralisasi, pemberdayaan, proses belajar sosial dan keberlanjutan, agar terciptanya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kurangnya partisipasi dalam memanfaatkan output program sanitasi dan penyehatan lingkungan berdampak pada ketidakberhasilan program. Beberapa faktor yaitu sosial dan politik masyarakat, faktor sosial lebih cenderung kepada kuatnya penetrasi yang dilakukan oleh pusat terhadap masyarakatnya, kelembagaan organisasi dan lemahnya sosial kontrol, disisi lainnya dari aspek sosial berkenaan minimnya keikutsertaan dalam pengambilan keputusan publik.

Sebaliknya adanya dukungan kesempatan partisipasi, adanya kemampuan , dan kemauan dapat menjadi pendorong dalam peningkatan partisipasi.

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



D. Operasionalisasi Konsep

Sebagai penunjuk arah dalam penelitian maka semua konsep yang berhubungan dengan penelitian partisipasi masyarakat dalam program sanitasi dan penyehatan lingkungan sebagai berikut :

- a. Partisipasi adalah pola sikap seseorang atau kelompok terlibat dalam program kegiatan sanitasi dan penyehatan lingkungan bersifat fisik dan non fisik.
- b. Masyarakat miskin yaitu suatu masyarakat yang tidak mampu memenuhi

kebutuhan dasar yang dalam penelitian ini adalah kebutuhan sanitasi di daerah Kabupaten Sukamara.

- c. Partisipasi Masyarakat dalam program sanitasi dan penyehatan lingkungan adalah keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan dan mengevaluasi proyek pembangunan sanitasi berupa system pembuangan air limbah rumah tangga .
- d. KSM adalah kelompok Swadaya Masyarakat yang merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat untuk melaksanakan pekerjaan swakelola meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan komunitas masyarakat, memanfaatkan hasil dan kontrol sosial (evaluasi/pemantauan) program
- e. Faktor pendukung program sanitasi dan penyehatan lingkungan merupakan upaya mendukung program baik berasal dari pemerintah maupun masyarakat
- f. Faktor penghambat program sanitasi dan penyehatan lingkungan adalah keadaan yang menghambat keberlanjutan dan pemanfaatan fisik program sanitasi yang dapat berupa hambatan Sosial politik atau kultural maupun structural.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghendaki suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan lebih menghendaki makna yang berada dibalik deskripsi data tersebut. Menurut Moleong (2010:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan maka deskripsi yang dimaksudkan adalah berupa data – data atau gejala mengenai partisipasi masyarakat dalam program sanitasi dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Sukamara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi.

B. Sumber Data Informasi

Menurut Sugiyono (2008:215) dalam sebuah penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi atau sampel. Populasi dalam penelitian kualitatif adalah *social situation* yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktivitas yang saling bersinergis. Dan sampel bukan responden akan tetapi narasumber atau partisipan

yang dapat membantu peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian.

Hendrarso (dalam Usman 2009:56) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian inilah yang akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian yaitu dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu, kita memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita (Martono: 2011:79).

Adapun sumber data atau informan penelitian ini adalah meliputi unsur pemerintah yang mengeluarkan program, masyarakat lokal, tokoh masyarakat.

C. Instrumen Penelitian

Salah satu keunikan dalam penelitian kualitatif adalah bahwa peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, sedangkan instrumen non insani bersifat sebagai data pelengkap. Kehadiran peneliti merupakan tolok ukur keberhasilan atau pemahaman terhadap beberapa kasus. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data atau instrumen kunci.

Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama (Moleong, 2010), hal itu dilakukan karena jika



memanfaatkan alat yang bukan manusia maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu hanya manusialah yang dapat berhubungan dengan informan dan yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.

Selain itu pula kedudukan peneliti menurut Moleong (2010; 168) dalam penelitian kualitatif sangat rumit, karena ia sekaligus perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data dan akhirnya sebagai pelapor hasil penelitiannya.

Dalam penelitian ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian guna menggali informasi dengan cara melakukan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara, pengamatan dengan menggunakan pedoman pengamatan sebagaimana menurut Guba dan Lincoln (dalam Busrowi dan Suwandi, 2008), Moleong (2010) data yang didapat dicatat dalam buku catatan pengalaman dilapangan ataupun dengan foto-foto dan video-kamera handphone mengenai aktivitas masyarakat, mata pencaharian, suasana rumah, taraf hidup, kebiasaan membuang air besar/limbah rumah tangga, cara penggunaan air untuk mandi, cuci,kakus (MCK) serta pemanfaatan output program sanitasi dan penyehatan lingkungan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi serta bahan-bahan lain untuk mendukung dan menyelesaikan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Teknik pengumpulan data primer. Merupakan data yang langsung dari objek penelitian, terdiri dari :
 - a. Metode wawancara yaitu cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan (menggunakan pedoman wawancara) yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian secara mendalam . dengan waktu yang digunakan antara bulan Maret- April 2018 di tempat domisili penerima bantuan program sanitasi dan lingkungan yaitu wilayah Kabupaten Sukamara.
 - b. Metode observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung oleh peneliti ke lokasi objek penelitian. Dengan periode waktu sebelum pelaksanaan dan setelah pelaksanaan program sanitasi dan penyehatan lingkungan.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder. Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer, terdiri dari : Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan literatur seperti buku, jurnal, dan laporan-laporan program kegiatan sanitasi dan penyehatan lingkungan sebagainya yang mendukung data.

E. Keabsahan Data

Data hasil penelitian yang didapatkan di lapangan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Moleong (2010: 324) mengemukakan empat kriteria dalam teknik pemeriksaan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Derajat Kepercayaan (*kredibilitas*) mempunyai dua kriteria yaitu melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada realitas yang sedang diteliti.

Keteralihan (*transferability*) menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar keterwakilan sampel.

Kebergantungan (*dependability*) , jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara essensial sama maka dapat dikatakan sah atau *realiabel*.

Kepastian (*confirmability*), objektivitas tergantung dengan data yang dihasilkan, jika komunitas masyarakat yang dituju dalam penelitian ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai lembaga kepemimpinan kolektif dan oleh karenanya juga berperan sebagai representasi warga lokal yang bersifat organisasi anggota atau bertumpu pada anggota, sehingga keputusan tertinggi ada di tangan anggota, maka penelitian alamiah menekankan kepada data berdasarkan ciri-ciri data yang akurat

Selain itu Creswell (2010:286) merekomendasikan delapan strategi dalam validitas data sebagai berikut :

1. Mentransfer sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber dimaksud untuk membangun konstruksi tema-tema secara koheren.

2. Melakukan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian, dengan membawanya kembali kepada sumber data atau informan.
3. Deskripsi yang kaya dan padat, harus menggambarkan setting penelitian dan membahas salahsatu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
4. Refleksivitas , melakukan evaluasi diri akan mampu membuat narasi yang valid dan menjunjung tinggi kejujuran serta keterbukaan.
5. Menyajikan informasi yang berlawanan atau berbeda menambah kredibilitas penelitian.
6. Perpanjangan waktu (*prolonged time*), harapan yang diinginkan adalah peneliti lebih memahami fenomena yang diteliti.
7. Diskusi teman sejawat (*peer de briefing*), mengajak rekan peneliti untuk berdiskusi menambah wawasan dan hasil penelitian dapat pula dirasakan, dan diinterpretasi dalam perspektif yang berbeda.
8. Menyerahkan kepada auditor (*external auditor*) untuk mereview keseluruhan hasil penelitian dapat memberikan penilaian objektif terhadap penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Moleong (2006:247), teknik analisis kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, menyusunnya dalam satu kesatuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan dan serta menafsirkannya dengan analisis

dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Jadi analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data dan melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti kemudian menarik kesimpulan.

Teknik analisis data kualitatif dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat *pengumpulan data* berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh.

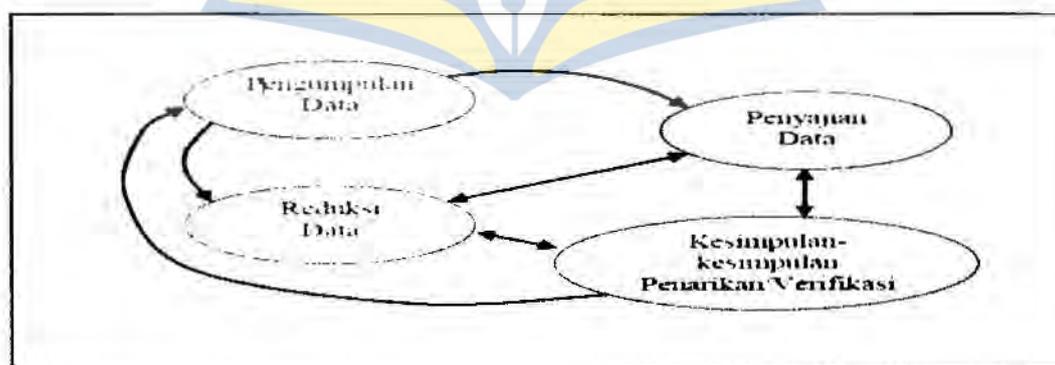
Reduksi Data, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo).

Penyajian Data/Display Data, Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data juga berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami..

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal / interaktif dan hipotesis / teori.

Gambar. 3.1 Model Analisis Interaktif
(Milles dan Huberman, 2009:20)



Menurut Diagram hubungan antar komponen model interaktif, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

Proses seperti tersebut sesungguhnya tidak lebih rumit, berbicara secara konseptual, daripada jenis-jenis analisis yang digunakan oleh para peneliti kuantitatif. Peneliti kualitatif pun harus terpaku perhatiannya pada reduksi data (menghitung mean, standar deviasi, indeks), penyajian data (tabel korelasi, cetakan angka-angka regresi), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (derajat signifikansi, perbedaan eksperimental/ kontrol). Soalnya ialah bahwa kegiatan itu dilakukan melalui batasan-batasan yang jelas, metode yang sudah dikenal, patokan-patokan yang memberi pedoman, dan kegiatannya lebih berupa peristiwa berturutan jika dibandingkan dengan kegiatan yang berulang atau siklus. Di sisi lain, para peneliti kualitatif menempati posisi yang lebih bersifat longgar, dan juga lebih bersifat perintis.

Bagan analisis data model interaktif Miles dan Huberman di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

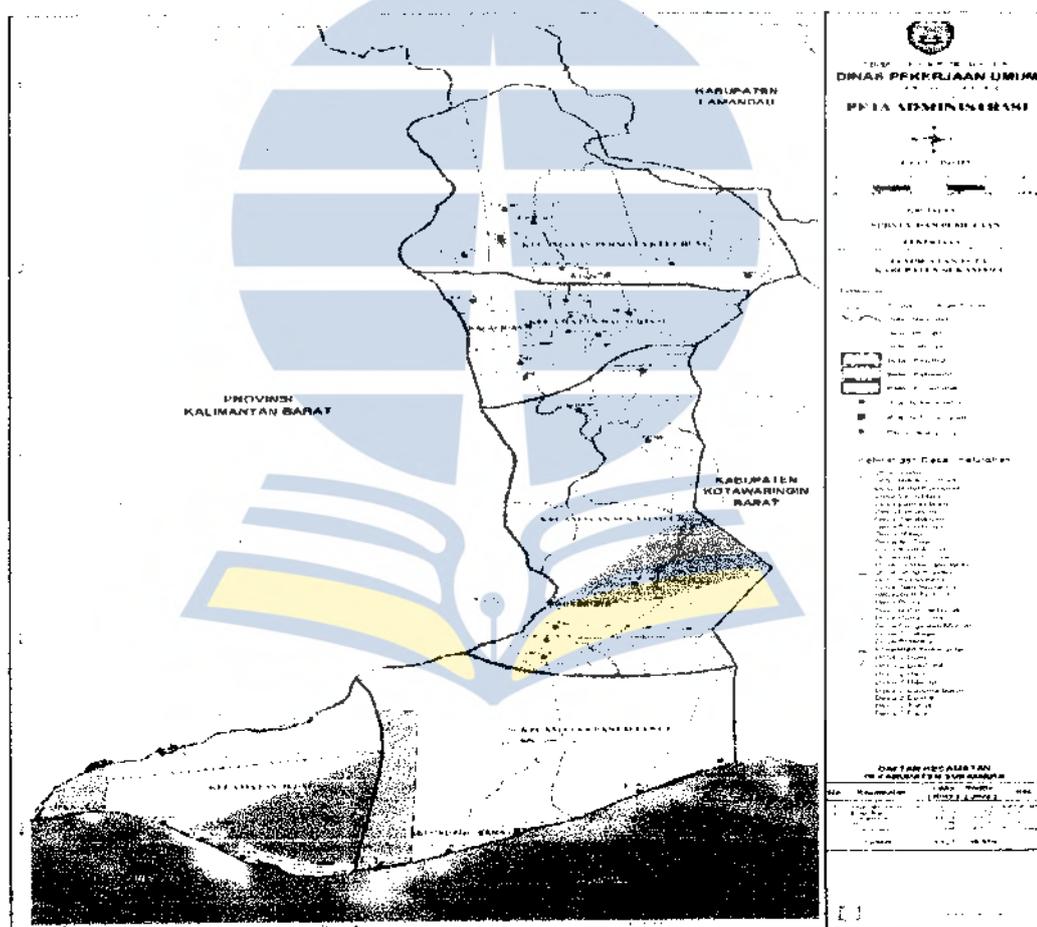
Kabupaten Sukamara merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam konsep Kabupaten Sukamara dalam *Sukamara Metropolitan. Urban Development Project* (SMUDP). Terletak pada perbatasan Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Kotawaringin Barat. Jarak Kabupaten Sukamara dengan Kabupaten Kotawaringin Barat hanya sekitar 22 km dan jarak Kabupaten Sukamara dengan Kabupaten Lamandau juga sekitar 21 km atau dengan kata lain jarak tempuh ke Kabupaten Kotawaringin Barat dari Sukamara maupun dari Lamandau sekitar 20 menit perjalanan.

Luas wilayah Kabupaten Sukamara adalah 3.827 Km² atau 382.700 Ha atau kurang lebih 2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari hutan, rawa, sungai, danau, genangan air, pantai dan tanah lainnya. Secara geografis Kabupaten Sukamara terletak pada 2°19' sampai dengan 3°07' Lintang Selatan (LS) dan 110°25' sampai dengan 111°9' Bujur Timur (BT), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Berbatasan dengan Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;

- **Sebelah Timur** : Berbatasan dengan Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- **Sebelah Selatan** : Berbatasan dengan Laut Jawa; dan
- **Sebelah Barat** : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kabupaten Sukamara



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Sukamara terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu : Kecamatan Sukamara, Kecamatan Jelai, Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Pantai Lunci (diresmikan tanggal 15 Juni 2006) dan Kecamatan Permata Kecubung (diresmikan tanggal 17 Juni 2006). Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Permata Kecubung merupakan kecamatan baru sesuai Perda Kabupaten Sukamara Nomor 03 Tahun 2006 tanggal 12 April 2006 tentang pembentukan Kecamatan Permata Kecubung dan Pantai Lunci yang selanjutnya diundangkan pada tanggal 05 Mei 2006. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 3 kelurahan dan 29 desa. Jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah menurut kecamatan disajikan dalam tabel berikut :

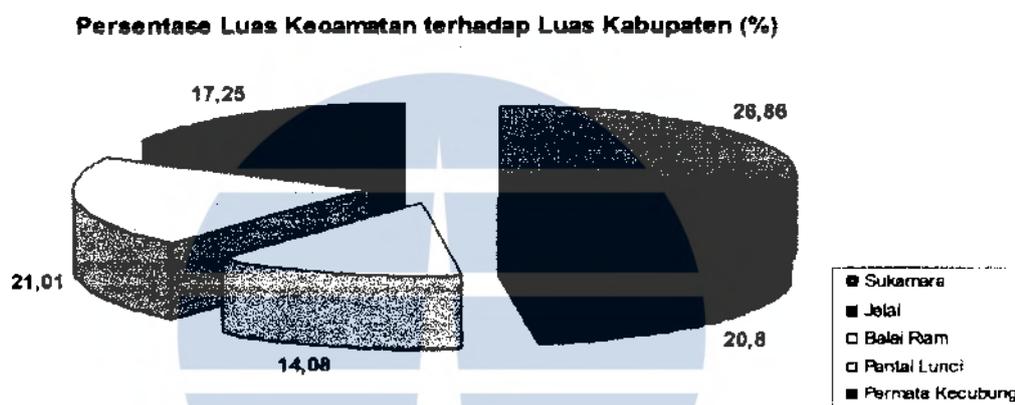
Tabel : 4.1
Jumlah Desa / Kelurahan dan Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Sukamara 2017

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
1.	Sukamara	2	6	1.028	26,86
2.	Jelai	1	4	796	20,80
3.	Balai Riam	-	8	539	14,08
4.	Pantai Lunci	-	4	804	21,01
5.	Permata Kecubung	-	7	660	17,25
JUMLAH		3	29	3.827	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Sukamara 2017

Dari table 4.1 diatas terlihat Kecamatan Sukamara dengan 6 desa merupakan Kecamatan terluas meliputi 26,86 persen dari keseluruhan luas kabupaten sukamara, sementara kecamatan yang mempunyai luas wilayah yang terkecil adalah

Balai Riam dengan 8 desa seluas 14,08 persen dari luas kabupaten Sukamara. Walaupun dengan jumlah luas wilayah yang kecil namun membawahi desa yang terbesar diantara kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sukamara. Selanjutnya sebagai gambaran luas wilayah per Kecamatan Kabupaten Sukamara dapat terlihat pada Tabel 4.2 berikut :



Gambar 4.2
Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sukamara tahun 2017 sebanyak 59.775 jiwa, terdiri dari 31.773 (53,21 %) laki-laki dan 28.002 (46,79 %) jiwa perempuan dengan rasio perbandingan antara laki-laki dan perempuan (*sex ratio*) sebesar 113. Rata-rata kepadatan penduduk 13,90 jiwa/km², dengan kategori penduduk jarang serta pertumbuhan penduduk selama tiga tahun terakhir (2012-2017) sebesar 3,42 %. Jumlah penduduk per Kecamatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel : 4.2
Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukamara
berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

	KECAMATAN Desa/Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk		
			Pria	Wanita	Jumlah
	1	2	3	4	5
01.	JELAI	1.182	2.547	2.404	4.951
02.	PANTAI LUNCI	1.269	2.781	2.659	5.439
03.	SUKAMARA	6.381	12.544	11.277	23.821
04.	BALAI RIAM PERMATA	2.124	4.170	3.592	7.762
05.	KECUBUNG	3.286	6.218	4.999	11.217
Jumlah	2017	14.242	28.259	24.931	51.190
	2016	13.745	27.100	24.000	51.100
	2015	12.630	25.004	22.069	47.073
	2014	12.238	24.279	21.427	45.706
	2013	12.036	23.879	21.073	44.952

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara, 2018

Tabel : 4.3
Jumlah Penduduk menurut Rumah Tangga dan
Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Sukamara
Berdasarkan Usia Tahun 2017

Kelompok Usia	Rumah Tangga		Jumlah Total
	Laki – Laki	Perempuan	
1	2	3	7
0 - 4	2926	2793	5.719
5 - 9	2660	2512	5.172
10 - 14	2369	2321	4.690
15 - 19	2412	2100	4.512
20 - 24	2677	2390	5.067
25 - 29	2973	2583	5.556
30 - 34	2582	2468	5.050
35 - 39	2662	2212	4.874
40 - 44	2155	1735	3.890
45 - 49	1613	1212	2.825
50 - 54	1177	883	2.060
55 - 59	748	624	1.372
60 - 64	592	447	1.039
65 - 69	306	253	559
70 - 74	217	169	386
75+	190	229	419
2017	28.259	24.931	53.190
2016	27.100	24.000	51.100
2015	25.004	22.069	47.073

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara, 2018

Tabel : 4.4
Persentase Penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2017

Lapangan Pekerjaan Utama	Persentase
1	4
1. Pertanian	57,60
2. Pertambangan & Penggalian	0,00
3. Listrik & Air Minum	3,50
4. Bangunan & Konstruksi	0,00
5. Perdagangan	4,04
6. Industri Pengolahan	14,28
7. Pengangkutan & Komunikasi	2,34
8. Bank & Lembaga Keuangan	0,63
9. Jasa – jasa	17,61
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara, 2018

Tabel : 4.5
Banyaknya Sekolah Menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Sukamara Tahun 2017

Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah
1	2
1. Taman Kanak-kanak	42
2. Sekolah Dasar (SD)	53
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)	18
4. Sekolah Menengah Atas (SMA)	8
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	3
2016/2017	124
2015/2016	116
2014/2015	107
2013/2014	101
2012/2013	96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara, 2018

3. Profil Masyarakat Penerima Bantuan Program Sanitasi dan Peenyehatan Lingkungan Kabupaten Sukamara

Masyarakat penerima bantuan hibah program sanitasi dan penyehatan lingkungan merupakan kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya terutama yang terkait dengan kebutuhan sanitasi sistem pembuangan air limbah rumah tangga.

lokasi distribusi penerima bantuan program tersebar di seluruh kecamatan dan desa di seluruh wilayah Kabupaten Sukamara yaitu Kecamatan Sukamara, Balai Riam, Permata Kecubung, Jelai dan Pantai Lunci.

Dilihat dari fisik bangunan maka sesuai data survey Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Jenis Sanitasi dan Bangunan Sanitasi Per Kecamatan Sukamara Tahun 2018

No	Jenis Sanitasi	Lokasi					Jumlah
		Kec. Sukamara	Kec. Jelai	Kec. Balai Riam	Kec. Permata Kecubung	Kec. Pantai Lunci	
1	Rumah yang belum punya WC	1181	520	332	1983	304	4320
2	WC yang tidak memenuhi syarat	2.261	73	620	68	290	3312
3	WC yang sudah standart	245	155	30	40	-	470
4	IPAL Komunal	6	4	1	2	-	13
5	WC Komunal yang belum optimal	6	4	1	2	-	13
6	MCK Umum	22	6	8	3	20	59
7	Masyarakat yang terlayani	125	155	30	40	-	350
8	Rumah yang dapat bantuan On Site	122	-	-	-	-	122

Sumber: Data Penelitian Tahun 2018 (diolah)

Pada tabel 4.6 diatas dapat kami sampaikan bahwa jumlah rumah yang belum mempunyai toilet atau wc dan yang mempunyai wc namun tidak memenuhi syarat adalah 7.632 rumah tangga. Angka ini merupakan menyiratkan kondisi yang memprihatinkan karena dari total 15.981 rumah tangga, ada sejumlah 47,7 persen yang belum memiliki sarana pembuangan limbah berupa toilet atau wc, walaupun telah disediakan wc komunal namun belum cukup membantu kebutuhan hajat dasar masyarakat di Kabupaten Sukamara.

Sebenarnya dalam beberapa tahun ini data rumah yang belum mempunyai toilet yang menjadi dasar penetapan sasaran pembangunan sanitasi banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan, utamanya untuk obyek yang berupa pemukiman. Ketidakcocokan data ini terjadi karena banyaknya perubahan pada bangunan-bangunan yang ada bahkan dari tanah kosong menjadi pemukiman yang ada bangunanya sedangkan data dari Kecamatan tetap tidak ada perubahan.

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini dipaparkan dan dibahas temuan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sanitasi dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Sukamara yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diungkapkan lebih rinci dalam deskripsi berikut :

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan kegiatan program sanitasi dan penyehatan lingkungan di tingkat masyarakat, anggota masyarakat (laki-laki-perempuan-kaya-miskin) adalah pelaku dan penanggungjawab utama dalam proses perencanaan. Masyarakat diberikan tanggungjawab penuh untuk merencanakan kegiatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil program dan mampu melakukan pengelolaan hasil program secara mandiri.

Perencanaan kegiatan tingkat masyarakat dilakukan secara partisipatif bertujuan untuk mewujudkan:

- a) Keberlanjutan pelayanan sarana air minum dan sanitasi;
- b) Perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan pelayanan kesehatan;
- c) Kesetaraan gender dan sosial dalam implementasi program; dan
- d) Kegiatan program dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebelum program dijalankan maka diadakan terlebih dahulu penyampaian informasi baik melalui pamflet, spanduk, iklan maupun rapat sosialisasi. Melalui kegiatan sosialisasi yang intensif diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program. Pada tingkat sasaran program yaitu masyarakat di desa atau kelurahan, penerima manfaat tidak hanya ditetapkan oleh aparat pemerintah kelurahan atau tokoh tokoh masyarakat, namun melibatkan representasi masyarakat.

Pada kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan ini sekaligus dilaksanakan juga penandatanganan Surat Pernyataan Kesiapan Masyarakat sebagai bentuk komitmen masyarakat untuk melaksanakan tahapan program sesuai dengan ketentuan/pedoman dan prinsip - prinsip pelaksanaan yang ditetapkan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

“setiap program pemerintah yang akan diluncurkan, sebelumnya akan diadakan sosialisasi dulu kepada masyarakat. Hal ini dilakukan selain merupakan sebagai sarana komunikasi efektif yang memberikan pemahaman, pengetahuan pentingnya program, juga menghindari penolakan atas program oleh masyarakat. Kegiatan diadakan pada waktu ada kegiatan masyarakat dan juga sesuai dengan anggaran di tiap instansi” (Wawancara tanggal 18 April 2018)

Hal yang sama diungkapkan oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara sebagai Wakil Ketua Bidang Penyehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan bahwa :

“Dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan mengetahui program pemerintah yang akan masuk di lingkungan mereka. Masyarakat diajak untuk dapat mendukung program tersebut sehingga kualitas output program akan berdampak positif bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk waktunya lebih baik kalau ada kegiatan warga misalnya yasinan warga atau kegiatan musrenbang”

Selanjutnya penjelasan dari Bidang Teknis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyatakan :

“Kabupaten Sukamara merupakan salahsatu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat sasaran proyek sanitasi. Untuk itu kami bersama instansi teknis lainnya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara memberikan informasi kepada masyarakat diwilayah yang terkena sasaran program. Sosialisasi di lakukan dengan mengundang aparatur kecamatan, kelurahan/desa, kelompok sasaran dan juga keluarga penerima manfaat dalam rangka menyatukan visi dan misi program yang melibatkan peran serta aktif masyarakat. Dalam pelaksanaannya terkadang menimbulkan pertanyaan dari elemen masyarakat yang tidak terkena dampak namun menginginkan bantuan tersebut, dan melalui forum tersebut dijelaskan mengenai jumlah bantuan yang diberikan sangat terbatas dan bertahap, maka melalui sosialisasi ini pemahaman dan dukungan masyarakat diharapkan berguna untuk mengurangi ketidakpuasan dan kecemburuan.”(Wawancara, 20 April 2018)

Seluruh peserta kegiatan sosialisasi masyarakat yang diundang dalam acara sosialisasi tersebut dapat memberikan tanggapan, saran dan masukan mengenai program yang diluncurkan oleh pemerintah. Dengan kata lain setiap program baru akan selalu dikomunikasikan kepada calon penerima manfaat, dan disaksikan oleh aparat kecamatan maupun kelurahan.

Pada umumnya masyarakat yang menjadi sasaran program menerima dengan gembira, beberapa warga masyarakat rela hati meninggalkan sementara pekerjaan sehari-hari, beberapa warga lain mewakilkan kepada isteri atau ibu rumah tangga yaitu pada hari sosialisasi program yang diadakan oleh Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Sukamara, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Desa (LMD) Cabang Barat yaitu :

“sebagai warga masyarakat penerima manfaat, kami mengikuti program pada setiap tahapan dan akan memberitahukan kepada setiap warga agar bersedia menerima program tersebut, karena kami yakin setiap program yang digulirkan oleh pemerintah dapat meningkatkan taraf kehidupan, buktinya warga yang bekerja sehari-hari sebagai nelayan, petani maupun buruh dengan kerelaan hati mengikuti sosialisasi program sampai selesai, yang tidak bisa maka diwakilkan oleh anggota rumah tangga biasanya isterinya” (Wawancara, 14 April 2018)

Program Pemerintah yang dikucurkan tersebut merupakan bantuan stimulant yang diberikan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). seperti dinyatakan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam transkrip wawancara berikut :

“mengenai program sanitasi dan penyehatan lingkungan sudah dilaksanakan mulai tahun 2015 dan terus berjalan sampai saat ini tahun 2018 telah tercapai 30% dan diharapkan pencapaian target sampai tahun 2019 sebesar 50% dan tahun 2022 sebesar 100%. bantuan yang diberikan ada empat jenis yaitu bantuan sepitenk komunal, stimulant perumahan swadaya (BSPS), on site sepitenk dan bedah rumah. untuk bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. bantuan sepitenk komunal ditujukan kepada kelompok masyarakat yang disebut KSM. Sementara bantuan on site sepitenk dan bedah rumah diberikan kepada perorangan bagi keluarga berpenghasilan rendah atau kurang mampu. Dengan bantuan tersebut pola BABS masyarakat dapat berubah dan juga lingkungan masyarakat akan menjadi bersih serta higienis sehingga tercipta kawasan lingkungan yang sehat (wawancara tanggal 11 April 2018)”

Dari hasil wawancara tersebut ternyata program sanitasi dan penyehatan lingkungan guna meningkatkan taraf kesehatan masyarakat telah berjalan selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2018, dan berakhir pada tahun 2022. Adapun sasaran program tersebut selain masyarakat yang berpenghasilan rendah juga diberikan kelompok swadaya masyarakat guna tercipta peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukamara. Seperti diketahui bahwa dari data yang didapat

diketahui masih banyak warga masyarakat yang buang air secara sembarangan(BABS) sebesar 4.340 kepala keluarga, maka dengan demikian program tersebut akan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kalangan masyarakat.

Salah satu indikator keberhasilan program adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program baik melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan evaluasi. Melalui wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara menyatakan bahwa :

“Kami rasa hal itu sudah dilakukan namun hanya sebagai sosialisasi saja, artinya belum sampai kepada mengikutkan mereka secara aktif atau secara penuh didalam kegiatan sanitasi dan penyehatan lingkungan”. Maksud kami adalah mengikutkan lembaga atau organisasi tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pengawasannya” (Sukamara, 18 April 2018)

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara menyatakan bahwa:

“Kami dari Bidang Cipta Karya, memandang bahwa keterlibatan LMD dalam penyampaian program sanitasi ini perlu sebab mereka adalah organisasi formal yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa yang juga sekaligus sebagai representasi keberadaan masyarakat pada lembaga yang ada di desa. Lewat LMD kami berharap bahwa program ini dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat, selain itu pula biasanya pihak LMD sebelum sosialisasi dilaksanakan sebagian masyarakat sudah mengetahui melalui pamlet atau iklan yang ditempelkan pada papan pengumuman yang ada ditempat keramaian misalnya balai desa maupun ditempat umum lainnya” (Sukamara, 15 April 2018)

Keikutsertaan tersebut ditegaskan lagi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara menambahkan pernyataan sebagai berikut

“iya saya kira langkah dan strategi yang telah diambil oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah tepat ya,,begini maksud saya,,dengan pelibatan LMD yang nota bene adalah lembaga formal yang ada di desa cukup baik,,sebab apa,,sebab mereka (LMD) ini adalah dari masyarakat juga anggotanya,,jadi menurut saya strategi ini dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. (Sukamara, 18 April 2018).

Sebagaimana pernyataan tersebut Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara juga menyatakan bahwa telah mengikutsertakan masyarakat dalam program sanitasi dan penyehatan lingkungan, namun belum maksimal seperti diungkapkan dalam hasil wawancara berikut :

“Iya, betul selama ini kami sudah ada melibatkan lembaga atau organisasi seperti LMD untuk ikut serta dalam melaksanakan program sanitasi dan penyehatan lingkungan. Tetapi terus terang kegiatan itu belum sepenuhnya kami lakukan”. (Sukamara, 15 April 2018)

Belum maksimalnya keterlibatan masyarakat tersebut dirasakan pula salah satu tokoh masyarakat yaitu Ketua LMD (Bapak BBG) yang menyatakan bahwa:

“Ada partisipasi lembaga dan organisasi, namun hanya sebatas menyampaikan keinginan saja, lebih dari itu secara aktif misalnya didalam perencanaan atau pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi. Dengan demikian apa yang diprogramkan oleh pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat pengguna dari program tersebut. Kalau demikian, kami akan pasti mendukung penuh semua program yang bermanfaat bagi masyarakat” (Sukamara, 13 April 2018)

Dari hasil wawancara tersebut, keikutsertaan masyarakat dalam program sebatas penyampaian usul, minimnya peran yang ditampilkan tersebut dapat mempengaruhi ketepatan sasaran mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat.

Kecenderungan menerima program tersebut tergambar bahwa dukungan masyarakat dalam program sanitasi dan penyehatan lingkungan cukup besar

Beranjak dari kegiatan sosialisasi beberapa tokoh masyarakat berikut menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan memberikan andil yang besar bagi keberlanjutan program karena setiap usulan dimulai dari bawah, disampaikan kepada instansi terkait dan diteruskan kepada pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Tokoh Masyarakat Kelurahan Mendawai, H. Suri menyatakan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sebagai berikut :

“saya mengetahui program ini dari mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah beberapa bulan yang lalu. Pada waktu rapat dan sosialisasi tersebut kami langsung didata dan diminta persetujuan mengenai letak sepihing dan masuk dalam kelompok penerima bantuan”. (wawancara, 14 April 2018).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa :

“Salahsatu program yang diluncurkan oleh pemerintah adalah bantuan Sepiteng komunal dimana pada setiap kelompok berjumlah 50 rumah tangga dalam satu kelurahan/desa dibantu kucuran dana sebesar 450 juta. Bantuan langsung tersebut digunakan secara swadaya oleh masyarakat untuk membangun penyediaan tempat menampung limbah BAB secara terpadu atau terintegrasi dalam suatu lahan yang sudah dibebaskan haknya untuk kepentingan masyarakat, maka melalui rapat tersebut setiap masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merencanakan, menerima, melaksanakan dan memutuskan setiap persoalan menyangkut setiap tahapan program.”

Selanjutnya Yadi sebagai Wakil Kelompok Swadaya Masyarakat yang telah dibentuk menyatakan bahwa selain dilakukan pendataan setiap kelompok warga masyarakat membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menerima, mengusulkan, melaksanakan, memelihara dan memanfaatkan bantuan, sebagaimana terekam dalam hasil wawancara berikut :

“pada kegiatan sosialisasi program kami diminta membentuk kelompok yang dipandu oleh aparat pemerintah. Setiap warga membuat pernyataan yang blangkonya sudah disiapkan oleh bapak-bapak dari dinas perkim, isinya mengenai kesanggupan menjalankan program dari mulai perencanaan sampai memanfaatkan, semua pekerjaan ini kami dibantu dengan tulus dari dinas perkim.” (wawancara, 14 April 2018)

Lebih lanjut dikatakan pula bahwa pada tahap perencanaan ini kelompok swadaya masyarakat juga merumuskan rencana pengelolaan keuangan (mekanisme pencairan dana dari bank, penggunaan dana bantuan, penyusunan pembukuan dan laporan bulanan keuangan) , rencana penggunaan dana operasional maksimal 5% yang bersumber dari dana bantuan pemerintah, Rencana pembangunan infrastruktur, rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat pengguna. Seperti yang diungkapkan oleh Yadi dari unsur KSM sebagai berikut:

“kami mengerjakan perencanaan mengenai pembangunan sanitasi berupa sepiteng bersama, rencana penggunaan dana, operasional dan pemeliharaan sesuai petunjuk dari dinas perkim. Juga menentukan warga yang akan mendapat bantuan sesuai hasil rapat yang melibatkan aparat kelurahan dan kecamatan. (Wawancara, 15 April 2018)

Sesuai pernyataan diatas Lurah Padang juga menyatakan bahwa semua kegiatan pemerintah di wilayah kerjanya harus mereka awasi, perhatikan dan membantu memperlancar administrasinya seperti dalam pernyataan berikut :

“salahsatu tugas lurah adalah mengawasi segala kegiatan yang ada di wilayahnya masing-masing, seperti juga program sanitasi ini. Kelompok masyarakat penerima di tetapkan dengan keputusan lurah dan diketahui oleh Camat, hal ini untuk menjamin ketepatan sasaran program pada masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah kami”.

Sependapat dengan pendapat diatas salahsatu tokoh masyarakat Desa

Cabang Barat menyatakan :

“Selaku masyarakat kami selalu dilibatkan dalam setiap rapat. Pada waktu itu ada usulan-usulan dan masukan dari warga kami untuk mengatasi masalah misalnya waktu menentukan lokasi tempat sepihing yang dikuasai salah satu warga, pembebasan lahan tersebut harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ganti rugi yang diberikan pastilah dengan harga yang dibawah standar karena menyesuaikan dengan bantuan yang diberikan, namun alhamdulillah semuanya berjalan lancar-lancar saja. Sepertinya kesadaran warga cukup tinggi untuk memberikan lahannya demi kepentingan orang banyak. setelah beres urusan dari bawah semua persyaratan administrasi dibawa ke dinas perkim untuk ditindaklanjuti, biasanya kalau tahun ini diusulkan, pada tahun berikutnya bantuan terealisasi”(wawancara, 15 April 2018)

Sebagaimana pendapat diatas Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara juga menyatakan bahwa :

“sebenarnya masyarakat sudah dapat memutuskan sendiri setiap permasalahan yang ada melalui rapat-rapat baik diadakan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri, karena tidak ada yang dirugikan malah menguntungkan masyarakat. Untuk mempermudah persyaratan administrasi kami sudah menyiapkan contoh-contoh blangko surat pernyataan, surat perjanjian dan bentuk-bentuk SPJ, hal ini dilakukan semata-mata untuk akuntabilitas penyelenggaraan program. Selanjutnya setiap usulan yang telah disepakati bersama warga masyarakat maka akan kami teruskan kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada tahap ini pemerintah provinsi meneruskan pada tingkat kementerian, proses ini memakan waktu satu tahun, selain itu pula Badan Pemeriksa Keuangan juga akan memverifikasi secara teknis administrasinya, apakah benar-benar telah melalui tahapan usulan dari masyarakat atau tidak”(wawancara , 11 April 2018)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan program sanitasi dan penyehatan lingkungan termasuk aktif dalam menyampaikan usul, saran, mengikuti rapat dan memutuskan prioritas proyek dalam setiap penyusunan program kegiatan. Selain itu pemerintah daerah melalui dinas terkait menyampaikan informasi yang berkaitan dengan topik yang dihadapi, sehingga terjadi pemahaman dari warga dan siap menerima program dengan kesadaran yang tinggi, pada segi yang lain aparat pemerintah terkait juga memudahkan persyaratan administrasi dengan peranan yang berbeda secara berjenjang.

Disisi lain, kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang merupakan sasaran program membentuk sebuah lembaga sosial baru yang disebut kelompok swadaya masyarakat yang disingkat KSM . lembaga tersebut berperan sebagai pengelola program pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan evaluasi, mengajak kelompoknya untuk menghadiri rapat, menampung usulan, memilih dan memutuskan program diterima atau tidak, dan secara aktif melibatkan seluruh warga dalam setiap kegiatan yang berlangsung.

2. Tahap Pelaksanaan

Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.

Kegiatan pelaksanaan dilakukan berdasarkan perencanaan dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) serta kesepakatan perjanjian kontrak antara KSM dan

Satker terkait dalam melaksanakan kegiatan Program Sanitasi di lokasi sasaran. Tahap pelaksanaan konstruksi ditandai dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara PPK Satker Provinsi dengan KSM sebagai keterwakilan warga penerima manfaat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara sebagai berikut :

“ sosialisasi program yang melibatkan masyarakat penerima manfaat dilaksanakan sekaligus dengan mematangkan perencanaan dari bawah biasanya berjalan setahun sampai realisasi, anggaran langsung ke rekening KSM penerima manfaat. Maka setelah realisasi tersebut dimulailah pekerjaan fisik atau konstruksi yang pelaksanaannya langsung dilaksanakan oleh KSM” (Wawancara, 11 April 2018).

Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat bahwa proses pencairan dana tidak langsung cair kepada instansi dinas pemerintah daerah, tugas dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara adalah memverifikasi, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengawasi, serta mengevaluasi bersama masyarakat sebagai penerima manfaat. Setelah data dan syarat administrasi lengkap dilakukan proses pencairan oleh Kementerian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia langsung diterima melalui rekening KSM yang sudah disepakati bersama anggota kelompok. Kemudian sesuai dengan rencana kerja masyarakat dimulailah pelaksanaan proyek. Hal ini seperti yang terungkap dari hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat H. Suri dari Kelurahan Mendawai sebagai berikut :

“ betul sekali pak, dana yang kami terima langsung digunakan sesuai rencana, namun untuk pencairannya secara bertahap”. (wawancara, 15 April 2018)

Memperkuat pernyataan diatas hasil wawancara dengan Yadi, perwakilan KSM di dapat informasi sebagai berikut :

“ pencairan dana bantuan sepiutang komunal sebesar 450 juta ditransfer ke rekening kami sesuai dengan rencana, artinya apa yang kita kerjakan dulu pencairan pertama 40 persen dari nilai kontrak, misalnya dana pembebasan lahan terlebih dahulu, pembelian pipa, semen dan seluruh bahan yang diperlukan sampai upah tukang, baru setelah selesai maka pencairan tahap kedua 30 persen dari nilai kontrak dikucurkan pada saat kemajuan pekerjaan tahap pertama sudah mencapai 20 persen, selanjutnya tahap ketiga sebesar 30 persen dari nilai kontrak dan kemajuan pekerjaan tahap kedua sudah mencapai 50 persen, demikianlah setelah pencairan tahap ketiga seluruh pekerjaan selesai 100 persen sesuai batas waktu yang direncanakan, biasanya lebih cepat.” (wawancara, 16 April 2018)

Salahsatu tokoh masyarakat Desa Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci kabupaten Sukamara juga membenarkan pernyataan kedua informan diatas sebagai berikut:

“Yang kami ketahui bahwa pengajuan sesuai rencana dicairkan pada tahun berikutnya adalah berdasarkan termin, ada pencairan tahap pertama, kedua dan ketiga, sesuai dengan rencana dan penggunaan dana minimal 90 persen pada setiap terminnya” (wawancara, 17 April 2018)

Pencairan dana yang bertahap ini sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi pemberi bantuan, yaitu untuk menjamin kesinambungan program dan konsistensi pelaksanaan program pada setiap tahapan. Hal ini menjadi bukti pertanggungjawaban kepada pemerintah bahwa program tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan akuntabel. Untuk itu maka tujuan pentahapan tersebut dalam rangka pengendalian yang bertujuan: 1.memastikan bahwa lokasi program sesuai dengan ketentuan yang ada; 2. Memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tahapan program; 3. Memastikan bahwa pengalokasian dan pemanfaatan dana bantuan

pemerintah sesuai dengan pedoman; 4. Memastikan bahwa kualitas bangunan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan; 5. Memastikan agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing; 6. Menjamin ketepatan waktu pelaksanaan dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan

Selanjutnya peran masyarakat selain merencanakan dan mengelola keuangan, juga melakukan pekerjaan konstruksi dengan memanfaatkan tenaga masyarakat penerima dan tenaga konstruksi yang diupah melaksanakan pekerjaan tersebut. Hasil wawancara dengan H. Suri sebagai tokoh masyarakat Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara adalah sebagai berikut :

“seluruh pekerjaan konstruksi dilakukan secara swadaya, dukungan materiil berupa penyediaan lahan, membuat dinding wc closet menyediakan listrik, air, gayung, ember, sikat lantai pada tiap rumah keluarga yang menerima bantuan merupakan kesepakatan yang telah ditandatangani setiap warga masyarakat penerima di Kelurahan Mendawai. Akan tetapi banyak juga warga yang tidak memenuhinya.” (wawancara, 16 April 2018)

Kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proyek tersebut berupa dukungan sarana prasarana berupa lahan dan sarana penampungan air, penerangan, dinding wc tidak disediakan oleh proyek, namun disediakan sendiri oleh masyarakat penerima manfaat. Seperti yang diungkapkan oleh Yadi dari Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai berikut :

“sesuai kesepakatan masyarakat penerima manfaat sepatutnya mendukung kegiatan tersebut dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan misalnya perlengkapan wc, sumber air, listrik, dinding wc dan juga berupa sumbangan tenaga ketika diadakan pembuatan seping maupun penyambungan pipa dari tipa rumah warga, dari pengamatan kami selama melaksanakan kegiatan ini seluruh warga ikut serta menyumbangkan tenaganya, yang laki-laki kerja mengangkut batu, mengaduk semen, dan pekerjaan konstruksi lainnya, sedangkan warga yang perempuan menyediakan air minum dan makanan secara bergiliran sesuai pembagian kelompok, namun rata-rata yang menerima bantuan belum menyiapkan dinding wc” (Wawancara, 16 April 2018)

Dukungan masyarakat penerima atau pengguna program sanitasi dan penyehatan lingkungan juga disampaikan oleh Pak DD sebagai berikut :

“Iya bujur,,mun proyek itu swakelola buhan kami ini ada ja yang bantu-bantu,,kadang bahan nang kurang di tambahi oleh kades,,kadang jua ibu-ibunya tuh membawa wadai pake kami gotong royong dan ada iuran untuk pemeliharaan yang tidak memberatkan”

Terjemahan : iya benar, jika proyek itu swakelola maka kami ini ada juga yang membantu, kadang bahan yang kurang ditambahi oleh pak kades, kadang juga ibu-ibu membawa jajanan untuk kami gotong royong, dan untuk pemeliharaan diadakan iuran menyesuaikan kemampuan warga (Sukamara, 12 April 2018).

Dari pernyataan diatas tergambar jelas bahwa ada partisipasi dan bentuk bantuan materi baik berupa makanan dan iuran pemeliharaan, dukungan aparat kelurahan/desa dan jasa tenaga kerja telah ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan program sanitasi dan penyehatan lingkungan walaupun sebagian warga telah menyediakan tempat untuk pemasangan wc closet akan tetapi tempat yang dipakai tersebut belum memiliki dinding yang permanen. Ketika di konfirmasi dengan warga setempat didapat jawaban sebagai berikut :

“Ulun sudah menyiapkan peralatan pendukung, ember, sikat dan gayung apabila nanti wc telah dimanfaatkan, kalau untuk dinding sementara memakai kain, atau plastic berhubung belum ada dana untuk itu, akan kami pikirkan supaya rapi lah.” (Wawancara, 21 April 2018)

Dari beberapa pernyataan dari warga masyarakat tersebut Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membenarkan seperti tercatat dalam hasil wawancara berikut:

“rata-rata warga masyarakat cukup aktif berpartisipasi membantu pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik kepala rumah tangga maupun ibu-ibu yang termasuk dalam organisasi PKK, dengan tenaga pekerja yang berasal dari masyarakat lebih murah, kecuali ada beberapa bagian konstruksi yang kami bantu datangkan tenaga dari luar dengan biaya upah sesuai RAB. Dalam beberapa kunjungan kami ternyata masih banyak rumah tangga yang tidak memasang dinding pada wc yang sudah dipasang, kalau dihitung mencapai 60 persen” (Wawancara, 11 April 2018)

Pernyataan diatas diperkuat oleh komentar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara sebagai berikut :

“setiap kepala keluarga mempunyai peran yang sama dalam mendukung pelaksanaan program, warga masyarakat bersemangat memberikan bantuan secara fisik membantu pekerjaan konstruksi, dilain pihak sebagian yang lain menyediakan kudapan ala kadarnya, kesulitan yang dialami warga masyarakat yang baru memulai pemakaian wc yang berada dalam rumah hanya menutupi lokasi sekitar wc dengan kain penutup alias tidak memakai pintu dan dinding” (wawancara, 12 April 2018)

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sanitasi dan Penataan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara diperoleh jawaban sebagai berikut :

“Itu jika sudah dalam taraf pelaksanaan, menurut pantauan kami di lapangan bantuan dari masyarakat selalu ada jika proyek kami tersebut sifatnya swakelola namun jika murni proyek dari kami ya tidak ada „eee,, jika semisal swakelola itu ya kadang ada partisipasi masyarakat berupa bantuan tambahan material terus tanaman-tanaman di sekitar sebagai pemanis,,kadang juga di gotong royong kan,,yang intinya adalah bantuan masyarakat itu”. (Sukamara, 15 April 2018).

Dari seluruh informasi yang didapatkan menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sanitasi dapat berupa materi yaitu penyediaan lahan untuk tempat *sepitenk komunal*, penyediaan lokasi tempat dirumah masing-masing untuk memasang closet, menyediakan sarana prasarana pendukung, juga menyumbangkan tenaga serta menyumbangkan makan minum secara bergiliran sebagaimana pembagian tugas antara pria dan wanita. Selain hal tersebut banyak pula warga yang belum melaksanakan sepenuhnya ketentuan penyaluran bantuan yaitu menyediakan sarana pendukung lain berupa pemasangan dinding dan pintu kamar wc sebagaimana yang diharapkan, berhubung belum mempunyai dana.

3. Tahap Pemanfaatan

Dalam program Sanitasi, keterlibatan masyarakat khususnya pengguna perempuan, lebih diutamakan. Demikian pula dalam operasional dan pengelolaan sangat penting, karena tanggung jawab operasional dan pemeliharaan tidak hanya berada pada kaum laki-laki tetapi juga perempuan. Di beberapa daerah, pilihan teknologi prasarana dan sarana sanitasi masih terhitung baru, contohnya bangunan pengolahan limbah manusia yang berupa air kotor dan tinja. Oleh sebab itu, masyarakat perlu mendapat pemahaman tentang cara penggunaan dan pengelolaan

sarana sanitasi agar tetap berfungsi dengan baik melalui sistem dan mekanisme operasi dan pengelolaan yang baik.

Sesuai petunjuk teknis penggunaan koset diantaranya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Lakukan Pembersihan gayung yang digunakan dengan menggunakan sikat;
2. Bersihkan lantai luar jamban dengan kain pel setiap 2 atau 3 hari sekali, jika perlu gunakan bahan pembersih lantai jika sangat kotor;
3. Bersihkan saringan di lantai kamar mandi/WC dari kotoran padat/sampah;
4. Buang sampah ruang kamar mandi/WC pada tempatnya, dan bersihkan tempat sampahnya;
5. Setiap hari bersihkan dinding kamar mandi/WC menggunakan sikat (gunakan bahan pembersih jika sangat kotor);
6. Bersihkan kloset setiap hari dengan sikat kloset;
7. Bersihkan (kuras) bak air dalam kamar mandi/WC setiap hari (gunakan bahan pembersih jika sangat kotor);
8. Seminggu sekali kuras dan bersihkan tangki/tandon air dari lumut dan kotoran;
9. Setiap hari bersihkan/sapu taman, dan 1 kali perminggu taman (tanaman dan rumput);
10. Bagi pengguna sarana dihibau untuk:
 - a. Tidak membuang sampah/benda padat ke dalam lubang koset, karena akan dapat menyumbat saluran;
 - b. Membuang sampah pada tempatnya;

- c. Tidak membuang air sabun mandi dan air sabun bekas cucian masuk kedalam kloset;
 - d. Tidak membuang bahan kimia kedalam saluran karena dapat mematikan bakteri;
 - e. Menggunakan deterjen (bahan pencuci pakaian) dengan bijaksana/tidak berlebihan
 - f. Tidak mencoret coret dinding di kamar mandi/WC dan tempat mencuci.
11. Bersihkan langit-langit dalam jamban setiap bulannya;
 12. Periksa bak kontrol jamban jika terdapat kotoran padat/sampah dan keluarkan, kemudian buang ke tempat sampah;
 13. Setiap 2 minggu sekali, buang kotoran padat dan kotoran yang mengapung tepat di bawah manhole. Gunakan alat untuk mengumpulkan kotoran tersebut, keluarkan semua kotoran yang terkumpul sampai tidak ada yang tersisa, buang semua kotoran (sampah ke dalam plastik dan buang ke tempat sampah);
 14. Mintalah tukang untuk secara cepat memperbaiki kebocoran saluran yang terjadi dan cari sebabnya;
 15. Setiap 6 bulan sekali, lakukan tes kualitas air limbah, ambil 2 sample air limbah dari inlet dan outlet. Periksakan ke laboratorium yang direkomendasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Sesuai pengamatan langsung peneliti maupun hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sanitasi dan Penataan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara sebagai berikut:

“Menurut pengamatan kami di lapangan,,eee..program ini belum mendapat respon yang seimbang dari masyarakat...eee...pada beberapa tempat kami masih menemukan masyarakat yang belum merubah pola kebiasaannya untuk membuang “hajat” pada tempat yang telah kami sediakan/bangun,,kemungkinan besar ini karena pola dan budaya mereka ya ” (Sukamara, 15 April 2018).

Dari pernyataan tersebut masih ada fasilitas bantuan belum dimanfaatkan oleh warga penerima manfaat, hal ini terkait dengan kebiasaan yang sulit untuk dirubah.

Adanya kecenderungan sebagian kecil warga masyarakat penerima manfaat kurang memanfaatkan fasilitas ini telah di konfirmasi dengan anggota masyarakat yang menyatakan sebagai berikut :

“Kami sangat berterimakasih kepada pemkab lewat dinas terkait yang telah mau untuk membangun,,eeee,,fasilitas ini,,tapi ya mau gimana lagi,,masih ada banyak masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas ini, karena faktanya memang masyarakat kami ini beragam pola pikir dan pemahamannya terhadap kesehatan ” (Sukamara,10 April 2018).

Selanjutnya dalam penjelasan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara sebagai berikut :

“untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan cara pemanfaatan fasilitas sanitasi berupa seipitenk communal, on site seipitenk maupun bantuan sanitasinya telah diadakan kegiatan sosialisasi tentang teknik dan pola pemanfaatan dengan melibatkan perangkat desa dan organisasi masyarakat formal yang ada di desa, namun kami menemukan kenyataan bahwa fasilitas yang telah kami bangun ternyata tidak/belum dimanfaatkan optimal oleh masyarakat (tidak digunakan dan tidak dirawat). Kami membuktikan dengan mengukur kedalaman tinja dengan alat ukur dan ternyata pembuangan tinja masih belum ada, kami juga heran atas fakta ini,,apa ada yang salah ya dengan ajakan kami untuk berperilaku hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat” (Sukamara, 16 April 2018)

Ketika ditanyakan kembali dengan warga masyarakat didapat pernyataan sebagai berikut:

“jadi kaya apa pak lah,,memang am itu fasilitas (sanitasi) sudah dibangun dengan pemerintah,,tapi oleh kami ini sudah biasa segala cuci berak di jamban tu nah”

(Terjemahan : “bahwa memang benar sanitasi sudah dibangun oleh pemerintah, tetapi masyarakat sudah terbiasa mencuci dan buang air besar di jamban yang berada di sungai(Sukamara, 10 April 2018).

Informasi lain sebagaimana wawancara dengan Kepala Bidang Sanitasi dan Penataan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program in,,pengalaman kami selama ini untuk melaksanakan sosialisasi memang terasa ada kendala, diantaranya adalah sebagian masyarakat bekerja pada siang hari, sehingga sulit untuk menghadirkan mereka dalam sosialisasi. Meskipun demikian tingginya pengabdian para petugas, hal ini dapat dilaksanakan meskipun terkadang pada waktu malam hari, setelah masyarakat pulang kerja, namun memang dalam pelaksanaan di lapangan kami masih menemukan masyarakat yang belum merubah pola kebiasaannya untuk membuang “hajat” pada tempat yang telah kami sediakan/bangun,,kemungkinan besar ini karena pola dan budaya mereka ya ” (Sukamara, 15 April 2018).

Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Pak NN (warga masyarakat), diperoleh jawaban sebagai berikut.

“Kami sangat salut kepada petugas yang memberikan sosialisasi program sanitasi dan penyehatan lingkungan, mereka mengerti kami bekerja siang. Jadi kegiatan mereka lakukan pada malam hari, bila kami sudah datang dari kerja, namun memang fakta di lapangan berkata lain” (Sukamara,10 April 2018).

Lebih lanjut Jawaban yang ditemukan peneliti ketika pertanyaan tersebut dilontarkan kepada Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara, beliau menjelaskan

“kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan dengan melibatkan perangkat desa dan organisasi masyarakat formal yang ada di desa, namun kami menemukan kenyataan bahwa fasilitas yang telah kami bangun ternyata tidak/belum dimanfaatkan optimal oleh masyarakat (tidak digunakan dan tidak rawa)t,,eee,,kami juga heran atas fakta ini,,apa ada yang salah ya dengan ajakan kami untuk berperilaku hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat” (Sukamara, 15 April 2018).

Penuturan salah seorang penduduk yang memaparkan kebiasaan mck yang kurang baik sebagai berikut :

*“jadi kaya apa pak lah ,memang am itu fasilitas (sanitasi) sudah dibangun dengan pemerintah,,tapi oleh kami ini sudah biasa segala cuci berak di jamban tu nah”
fasilitas (sanitasi) sudah dibangun pemerintah, tapi karena kebiasaan masyarakat untuk cuci dan berak di jamban (Sukamara, 10 April 2018)*

Menurut pengamatan peneliti bahwa sulitnya merubah kebiasaan warga masyarakat tersebut karena adanya pandangan melakukan aktifitas di jamban disekitar sungai lebih praktis/simpel, sarana air melimpah dan dapat digunakan sepuasnya tanpa harus menggunakan air yang harus di sedot menggunakan listrik, sedangkan penampungan air terbatas.

Sementara itu pula kurangnya perawatan terhadap fasilitas juga dirasakan oleh H. Suri sebagai tokoh masyarakat Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara yang menyatakan :

“masyarakat yang menerima manfaat dari fasilitas sanitasi kurang begitu paham dan mengerti tentang penggunaan koset berhubung jarang membaca petunjuk, langsung eksekusi saja..hehe. (wawancara, 10 april 2018)

Sebagaimana pernyataan tersebut diatas seorang warga masyarakat penerima manfaat juga menyatakan bahwa:

“keluarga kami langsung menggunakan koset yang sudah selesai pembangunannya, memang sudah ada sosialisasi penggunaan dari pemerintah, tapi belum sepenuhnya kami mengerti, terlebih lagi keluarga di rumah. kadang-kadang salah menggunakan ketika bab tidak langsung kelubangnya, selain itu untuk menjaga kebersihan dilakukan seminggu sekali lantai koset disikat/dibersihkan menggunakan sabun rinso. (wawancara, 10 April 2018)

Warga masyarakat lainnya juga menyatakan bahwa mereka membersihkan dengan cara menyiram dan menyikat memakai alat sikat lantai, tidak menggunakan pembersih lantai melainkan cukup dengan air sabun detergen saja, sebagaimana hasil wawancara berikut :

“Ulun sering menyikat lantai wc menggunakan rinso bekas tapasan, daripada mubajir maka ulun gunakan, biasanya mun ada tegerak hati hanyar ulun bersihkan.”

Terjemahan : saya sering menyikat lantai koset dengan menggunakan air detergen bekas cucian pakaian untuk menghemat, kalau membersihkan wc bila ada keinginan saja. (wawancara, 10 April 2018)

Dari pernyataan masyarakat tersebut ternyata sebagian warga penerima manfaat belum sepenuhnya mengerti tentang tatacara penggunaan dan pemeliharaan sarana sanitasi. Ketidaktahuan tersebut selain berdampak cepat rusaknya sarana, dan tidak terpakai, serta memicu warga mencari alternatif lain untuk bab.

Berbeda dari pendapat diatas menurut dari Ibu Tati warga masyarakat Desa Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci dari hasil wawancara berikut :

“ biasanya saya yang membersihkan wc, sangat jarang bapaknya. Berhubung sebagai ibu rumah tangga menjadi pekerjaan kami sehari-hari membersihkan wc, dibanding sebelum ada bantuan sanitasi, kalau buang air kami merasa nyaman karena tidak perlu keluar rumah lagi, kami berupaya merawat wc dengan menyikat, tidak membuang kesaluran koset dengan pembalut atau menyiram dengan air detegen karena menurut anjuran dalam sosialisasi beberapa waktu lalu tidak dibolehkan sebabnya dapat menghambat saluran.” (wawancara, 10 April 2018)

Dari pernyataan tersebut ada warga penerima manfaat bertanggungjawab dan mengerti tentang tatacara penggunaan dan pemeliharaan sarana sanitasi. Biasanya dalam rumah tangga yang sering membersihkan dan merawat adalah kaum wanita. Selanjutnya dengan adanya pengetahuan tersebut akan sangat mendukung berfungsinya sarana sanitasi dengan baik.

Lebih lanjut Kepala Bidang Sanitasi dan Penataan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara menjelaskan terkait dengan proyek yang bukan swakelola bersumber dari APBD murni terdapat perbedaan dalam pemanfaatan seperti pernyataan sebagai berikut.

“karena tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa program ini terkadang diterima dan juga kadang tidak diterima oleh masyarakat, akhirnya kembali kepada masing-masing masyarakat bagaimana memandang seberapa perlu dan tidak perlunya fasilitas tersebut ada,,dan sering kami jumpai di lapangan bahwa banyak yang apatis,,sebab apa,,dari proyek yang murni dari kami banyak yang tidak dirawat apalagi digunakan” (Sukamara, 15 April 2018).

Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara diperoleh jawaban sebagai berikut.

“berdasarkan pengamatan kami di lapangan masih banyak kendala yang ditemui dengan adanya proyek ini,,seperti penjelasan saya sebelumnya masih ada masyarakat yang enggan menerima proyek ini,,lain halnya jika swakelola ” (Sukamara,16 April 2018).

Dari kedua informasi tersebut peneliti berkesimpulan bahwa ada beda bila proyek yang swakelola dan non swakelola. Swakelola yang melibatkan peran serta warga secara otomatis partisipasi sangat besar karena perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan evaluasi dari masyarakat penerima manfaat. Berbeda dengan proyek yang non swakelola dimana pemerintah langsung merancang dan menyediakan sarana, rasa memiliki dari warga kurang karena kurang terlibat dalam pelaksanaannya.

4. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan atau tidak, kualitas sarana sanitasi dan perubahan perilaku masyarakat, usulan yang belum direalisasi apakah diprogram lagi untuk tahun berikutnya ataukah diusulkan melalui musresbang dan bagaimana peran aparaturnya terkait.

Partisipasi dalam Evaluasi dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

Dalam evaluasi juga melihat keterlibatan kaum perempuan di dalamnya. Untuk itu menjadi keharusan dan kesepakatan bersama bagi semua stakeholder akan pentingnya partisipasi perempuan dalam program. Pemahaman konsep gender dalam program yang disampaikan dalam sosialisasi atau rapat, menjadi suatu upaya bagi semua stakeholder untuk memahami, mengerti dan melaksanakan upaya pencapaian target seperti dituangkan dalam PUG.

Upaya peningkatan keterlibatan dan peran serta perempuan, penduduk miskin dan kelompok rentan lainnya dilakukan melalui:

1. Pertemuan dengan kelompok-kelompok di masyarakat, termasuk dalam setiap rembug kelurahan/desa/warga;
2. Pertemuan khusus dengan kelompok perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin;
3. Menjamin keterwakilan kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin di dalam BKM/LKM/KSM;
4. Keanggotaan BKM/LKM dan KSM minimal 30% kaum perempuan;
5. Peningkatan peran serta kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin di dalam penyusunan RKM, terutama di dalam penentuan prasarana/sarana sanitasi yang akan dibangun;
6. Peningkatan peran serta kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin di dalam tahap pelaksanaan pekerjaan fisik;
7. Peningkatan peran serta kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin dalam perencanaan operasi dan pemeliharaan prasarana/sarana sanitasi terbangun.

Dari hasil wawancara dengan informan, dimana salah satunya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara memberikan pendapat sebagai berikut:

“Iya saya sebagai Kadinkes Sukamara tentu sangat mendukung adanya program sanitasi ini,,sebab ini adalah salah satu upaya untuk mengajak masyarakat berperilaku hidup sehat dengan tidak mandi cuci berak tidak disembarang tempat,,tetapi memang merubah pola pikir masyarakat ini bukan sesuatu yang ibarat kata semudah membalik telapak tangan,,saya kira faktor ekonomi, faktor pemahaman masyarakat dan faktor kebiasaan masyarakat yang masih perlu digenjot untuk dapat mengajak mereka berperilaku hidup sehat”. (Sukamara, 18 April 2018).

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sanitasi dan Kepala Bidang Sanitasi dan Penataan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara sebagai berikut:

“Kami selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan serta program pemerintah dengan maksud agar mereka mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan mereka. Semua ini dimaksudkan agar program sanitasi dan penyehatan lingkungan dapat berjalannya lancar mencapai tujuan utama pelayanan yang prima”. Studi kasus jember tidak begitu, kami khawatir akan muncul kendala yang tidak kita harapkan dikemudian hari. Pengecekan sarana sanitasi dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan cara mengukur kedalaman tinja pada sepi tenk, melihat kondisi jamban dan dari pengamatan kami ada sarana sanitasi belum dimanfaatkan dengan baik”. (Sukamara, 15 April 2018).

Kepala Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara membenarkan pernyataan tersebut sebagaimana hasil wawancara berikut:

“bersama tim kami melakukan inspeksi guna mengetahui apakah sarana sanitasi telah difungsikan atau tidak, dan kami coba mencari tahu apa penyebabnya. Hasil pengamatan kami bahwa sebagian besar sarana sanitasi telah digunakan dengan baik, Cuma ada beberapa warga yang belum menggunakan hal ini terkait dengan kebiasaan dan kesulitan dengan penggunaan air yang biasanya didapat langsung di sungai, namun pada masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau air bersih PDAM, menggunakan sarana sanitasi air dari tandon yang disediakan oleh

pemerintah.” (wawancara tanggal, 18 April 2018)

Kepala Bidang Sanitasi dan Penataan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara diperoleh jawaban dari pertanyaan pertama sebagai berikut.

“Dalam setiap pelaksanaan sosialisasi kami selalu berusaha untuk menggali informasi dari masyarakat tentang apa-apa saja yang diinginkan,,eee,,terus lokasi yang tepat bagi pembangunan fasilitas tersebut,,kami menanyakannya pada saat sosialisasi baik ke masyarakat maupun tokoh-tokohnya”. (Sukamara, 15 April 2018).

Jawaban yang hampir sama ketika peneliti menanyakan hal tersebut kepada salah satu penerima atau pengguna program sanitasi dan penyehatan lingkungan, yaitu pak DD .

“dari pertemuan yang dilaksanakan oleh dinas ,kami peserta ini ,selalu ditakuni tentang kaya apa biar program ini berhasil”
Terjemahan : dari pertemuan yang dilaksanakan oleh dinas, kami peserta selalu ditanyakan tentang seperti apa agar program ini berhasil (Sukamara, 12 April 2018).

Lebih jauh dijelaskan oleh Kepala Bidang Sanitasi dan Penataan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara mengenai harapan dan keinginan masyarakat sebagai berikut.

“kami dari Dinas dalam setiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat selalu berusaha menggali informasi yang diperlukan,,hal tersebut kami lakukan agar program ini tepat sasaran serta juga mengakomodir keinginan masyarakat,,harapannya program ini berhasil” (Sukamara, 15 April 2018).

Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Ketua LMD Desa Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci diperoleh jawaban sebagai berikut.

“Iya Benar, pada setiap pertemuan yang kami lakukan dibalai desa dan bisa juga di rumah warga yang agak luas. Sebagian warga tidak hadir dan diwakilkan dengan alasan tertentu. Dan ditempat itulah pihak pemerintah menanyakan kepada kami tentang apa yang harus dipenuhi dari program sanitasi dan penyehatan lingkungan ini”. (Sukamara, 10 April 2018).

Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara diperoleh jawaban sebagai berikut.

“iya saya selalu menekankan kepada saudara Kabid, agar jeli dalam menangkap aspirasi masyarakat, sebab apa, sebab pengguna atau user dari program ini, iya, masyarakat itu sendiri, aspirasi itu ditangkap dengan selalu aktif menanyakan dan meminta masukan kepada masyarakat dan tokoh-tokohnya” (Sukamara, 16 April 2018).

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disampaikan bahwa dinas terkait selalu meminta tanggapan atas pelaksanaan penyediaan sarana prasarana sanitasi dalam rangka pengendalian program, menampung dan menjaring aspirasi warga yang menerima manfaat dari program sanitasi dan penyehatan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Bidang Sanitasi dan Penataan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara memberikan pernyataan sebagai berikut.

“dalam kegiatan sosialisasi selalu kami temukan adanya masyarakat yang tidak bisa menerima adanya program sanitasi ini, eeeee, sebab mereka beralasan sudah terbiasa dengan keadaan saat ini serta pula, eee, mereka menganggap bahwa dengan dibangunnya fasilitas ini mereka tidak bisa bebas menggunakan sebab harus berbagi dengan orang lain, namun masih ada juga sebagian masyarakat yang menerima, saya duga mereka yang

mau menerima ini sudah pernah minimal mengetahui kabar-kabar tersebut dari berita-berita yang ada” (Sukamara, 15 April 2018).

Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu penduduk, diperoleh jawaban sebagai berikut.

*“Kami masyarakat ini kan beragam pola pikir dan pemahamannya terhadap kesehatan, jadi dalam pertemuan itu memang ada yang terima tapi ada jua yang kada terima,, mungkin oleh sidan tuh belum paham nah
Terjemahan : jadi dalam pertemuan itu memang ada yang terima tapi ada juga yang tidak menerima, mungkin karena mereka belum paham” (Sukamara, 10 April 2018).*

Selanjutnya dari menurut penjelasan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara, bahwa:

“dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Sanitasi saya selalu minta laporan, seperti apa pelaksanaan di lapangan, nah saudara Kabid menyampaikan ke saya,, ada yang terima ada yang tidak terima karena alasan sarana-prasarana pendukung belum ada. Padahal dalam kesepakatan awal pada tahapan perencanaan sudah disepakati bahwa masyarakat menyediakan dukungan agar sarana sanitasi berfungsi dengan baik” (Sukamara, 16 April 2018).

Menurut pengamatan peneliti bahwa kemampuan masyarakat dalam menyediakan sarana pendukung tidak sama satu warga penerima manfaat dengan warga penerima manfaat lainnya, hal ini tergantung dengan tingkat perekonomian warga yang rata-rata sebagai pekerja harian lepas atau buruh dengan pendapatan yang tidak menentu. Seperti yang terungkap dari wawancara dengan warga berikut:

“sejujurnya keadaan ekonomi kami bergantung dengan pekerjaan sehari-hari sebagai buruh kasar di pasar, paling banyak penghasilan 150 ribu perhari, tambahan mungkin didapat dari berjualan minyak dan makanan ringan untuk anak-anak didepan rumah dapat membantu perekonomian kami sekeluarga. Untuk mendukung sarana sanitasi dirumah tetap kami

usahakan, untuk yang kecil-kecil seperti gayung, ember, listrik dapat dipenuhi, namun untuk dinding yang memerlukan dana besar sementara belum dapat dipenuhi, selain itu untuk kegiatan rapat kami cukup percaya dengan pengurus". (wawancara 10 April 2018)

Sebagaimana warga masyarakat penerima manfaat diatas, salahsatu warga

Bapak Anang dari Kecamatan Pantai Lunci menyatakan:

"gawian sehari-hari mencari iwak, mun banyak kulihan iwak kawalah mendukung menukar gayung, ember dan sikat wc, mun sedikit dapat kada kawa am.mun hadir rapat diwakili oleh bini dirumah karena ulun uyuh seharian bagawi"

Terjemahan : pekerjaan sehari-hari mencari ikan (nelayan), kalau banyak dapat ikan hasilnya dapat mendukung sarana sanitasi, kalau dapat sedikit tidak dapat mendukung, untuk kehadiran rapat banyak diwakilkan oleh isteri berhubung mencari nafkah sehari-hari (wawancara, 10 April 2018)

Dari pendapat diatas partisipasi masyarakat dalam mendukung sarana prasarana sanitasi tergantung dengan keadaan ekonomi atau tingkat penghasilan warga penerima manfaat agar dapat memenuhi kesepakatan dalam rapat untuk menyediakan sarana pendukung. Pada dasarnya warga sudah berusaha dan punya kesungguhan memenuhi seperti dalam pengamatan peneliti, hanya dinding kamar wc yang tidak dapat disediakan.

Dalam hal kerusakan sarana prasarana sanitasi yang sifatnya kecil misalnya pipa bocor maka pihak penerima manfaat yang memperbaiki, akan tetapi bilamana kerusakan besar maka kewajiban pemerintah daerah yang menangani perbaikan, seperti terungkap dalam hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sanitasi dan Penataan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara berikut :

“menurut ketentuan pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya menerima hibah sarana sanitasi maka wajib menyediakan dana pendamping sebesar 5 sampai 10 persen dari dana yang dikucurkan, yang nantinya digunakan dalam mendukung pelaksanaan dan pemeliharaan, misalnya beberapa bulan yang lalu ada warga yang melapor bahwa ada kerusakan berat pada sarana sanitasi maka langsung dapat ditangani oleh kami.” (wawancara, 15 April 2018)

Dari penjelasan diatas, pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat besar untuk mengendalikan sekaligus menjadi tempat warga mengadakan permasalahannya terkait dengan evaluasi program sanitasi dan penyehatan lingkungan.

Dalam aspek perbaikan perekonomian keluarga dan aspek kelembagaan masyarakat penerima manfaat dapat terjamin keamanan dan kesehatan keluarganya, selain itu menurut pengamatan peneliti, banyak KSM memperoleh dana sisa dari pelaksanaan proyek. Maka dana sisa tersebut dipergunakan selain untuk pemeliharaan juga membantu warga yang tidak terjangkau proyek dalam memperluas dan mengembangkan jangkauan sarana sanitasi. Sebagaimana penjelasan Yadi pengurus KSM di Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara yang menyatakan;

“ pada rapat terakhir dengan warga dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM), dana BLM yang tersisa dipergunakan untuk pemeliharaan dan memperluas jangkauan ke warga yang tidak terkena dampak. Kelihatannya warga cukup percaya dengan pengelola, terbukti setiap rapat tidak ada yang protes. Namun ada juga warga yang mempertanyakan tentang penggunaan dana tersebut, dan dapat memahami laporan pertanggungjawaban keuangan yang kami sampaikan” (wawancara, 10 April 2018)

Dari informasi dari berbagai informan diatas dapat disimpulkan bahwa

dalam evaluasi program sanitasi dan penyehatan lingkungan sudah ada peran serta masyarakat didalamnya meliputi keaktifan dalam mengikuti rapat, menyampaikan usul, memberikan masukan, menyampaikan permasalahan ketika sarana sanitasi rusak, kesediaan dalam menerima dan mengelola sanitasi yang diberikan. Disisi lain ada juga warga masyarakat penerima manfaat belum memanfaatkan sepenuhnya sarana sanitasi yang diberikan berhubung kebiasaan perilaku babs sulit berubah, dukungan sarana sanitasi berupa dinding belum dapat dipenuhi karena factor pendapatan yang tidak menentu. Selanjutnya dukungan pemerintah daerah dalam mengendalikan program dapat terlihat dalam penyediaan dana pendamping, melakukan rehab bila ada laporan warga mengenai kerusakan sarana sanitasi, mengawasi penggunaan dana, laporan dan melakukan sosialisasi.

C. Pembahasan

Dalam Petunjuk teknis kegiatan program Sanitasi Masyarakat (Sanimas) dan penyehatan Lingkungan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Perumahan Tahun 2016 bahwa Pelaksana program terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pemerintah Kabupaten/kota dalam hal ini Bupati/Walikota, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di Kabupaten/kota. Tugas dari pemerintah kabupaten/kota adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan program sanitasi di wilayah kerjanya antara lain:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program Sanimas di wilayah kerjanya;
2. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Sanimas di wilayah kerjanya;
3. Menunjuk dan mengajukan pejabat satuan kerja kepada Menteri PUPR;

4. Membentuk District Project Implementation Unit (DPIU)
5. Menyediakan dana Biaya Operasional (BOP) kegiatan DPIU minimal 5% dari total dana bantuan melalui dana APBD Kabupaten/kota.
6. Berperan sebagai pembina Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).

Pelaksanaan program sanitasi dan penyehatan lingkungan di daerah Kabupaten Sukamara berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara nomor 188.45/1Bd/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Sukamara. Adapun tugas Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/kota antara lain:

1. Mensosialisasikan program pada tingkat kabupaten/ kota, kecamatan dan kelurahan;
2. Memberi arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program di wilayah kerjanya;
3. Memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan program di tingkat Kabupaten/kota;
4. Melakukan pertemuan dengan DPIU dan perangkat kelurahan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
5. Menyusun laporan penyelenggaraan program Sanimas di wilayahnya dan melaporkannya kepada Pokja AMPL/Sanitasi provinsi melalui PPIU.

Program Sanitasi dan penyehatan di Kabupaten Sukamara melibatkan unsur dari masyarakat sebagai penerima manfaat, pemerintah dan tokoh elit masyarakat lokal. Sebagaimana pendapat Beal dalam Mardikanto dan Soebiato (2017) menyatakan partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya

rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*) dengan ciri semakin mantapnya Keterlibatan kelompok jaringan sosial (*social network*) baru, yang berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Social network baru yang ditumbuhkan berupa wadah kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang dibentuk dengan fasilitasi pemerintah sebagai suatu syarat kucuran dana stimulant, pemberdayaan warga masyarakat melalui program ini merupakan proses belajar sosial seperti yang diungkapkan Tjokrowinoto dalam Soetomo (2013: 411) bahwa proses belajar sosial diartikan sebagai proses interaksi sosial diantara warga masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui kegiatan-kegiatan pemecahan masalah yang seringkali dilakukan melalui *trial and error*. pemerintah dalam hal ini sebagai pihak eksternal yang memberikan stimulant berupa bantuan langsung masyarakat (BLM)

Sejalan dengan hal tersebut pada dasarnya setiap proyek pemerintah harus memberdayakan masyarakatnya sebagaimana Mardikanto dan Soebiato (2017: 69) mengungkapkan bahwa pemberdayaan sebagai proses pembelajaran harus berbasis dan mengacu kepada kebutuhan masyarakat, untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya masyarakat serta diusahakan guna sebesar-besar kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan.

Adanya stimulan yang dikururkan pemerintah kepada rekening penerima manfaat yang berbentuk istitusi lokal kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk membangun sepitenk komunal, melibatkan banyak warga lokal. Bantuan stimulan tersebut sebagai instrument penting selain pemerataan pemanfatan hasil-pembangunan juga membangun kebiasaan yang baik dimasyarakat lokal untuk secara bersama-sama melaksanakan dan mengelola sumber daya dilingkungannya masing-masing. Menurut Soetomo (2013:414) melibatkan tidak saja bagi warga komunitas tetapi juga pihak lain yang terlibat dalam upaya pembangunan ditingkat komunitas baik pemerintah, non pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan sama-sama belajar atas bagaimana memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Sesuai konteks ini, menurut Loekman Soetrisno dalam Siswanto (2012; 29), partisipasi rakyat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi rakyat, melainkan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Rakyat mempunyai kewajiban moral untuk mengikutinya selain pekanya pemerintah terhadap masukan dan kritik dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif warganya.

UNAPDI dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:82) dan Cohen dan Uphoff dalam Siswanto (2012) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan Program Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan

Didalam setiap tahapan proyek-proyek pembangunan selalu dilakukan sosialisasi program lebih dahulu baik pada level pusat, daerah provinsi maupun kabupaten/kota sampai kepada lokasi sasaran proyek. Hal ini beralasan seperti diungkapkan oleh Robert M.Z Lawang dalam Suparlan (2015:61) mendefinisikan sosialisasi sebagai proses mempelajari norma, nilai dan peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan.

Sosialisasi dilakukan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sasaran daerah rawan sanitasi yang tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), melalui surat pemberitahuan, sosialisasi, workshop dan lain-lain.

Pada tingkat pemerintah kabupaten/kota sosialisasi dilakukan oleh pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/ Kota untuk memperkenalkan dan menyebarkan informasi tentang Program Sanimas dan pentingnya PHBS, sehingga pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten/Kota memahami program tersebut.

Kemudian pada tingkat sasaran pada kelurahan atau desa dilakukan Sosialisasi awal untuk memperkenalkan dan menyebarkan informasi tentang Program Sanimas kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan

kegiatan pemetaan sosial dan pemetaan rawan sanitasi telah dilakukan bersama partisipasi masyarakat.

Sesuai pengamatan peneliti dilapangan penyampaian pesan yang dilakukan oleh Tim Terpadu Percepatan Program Sanitasi di daerah Kabupaten Sukamara adalah melalui sosialisasi. Sosialisasi sebagai sarana penting dalam rangka mengkomunikasikan program-program sanitasi yang nantinya diselenggarakan, sebagaimana Tim Delivery dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:125) yang menyatakan sosialisasi sarana menciptakan dialog dalam masyarakat. Karena melalui sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Maka dari itulah, kemampuan aparat dalam menyampaikan program sangat dominan menentukan suksesnya program yang ditawarkan. Sesuai dengan SK Bupati Sukamara Nomor: 188.45/ 1 Bd /2018 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Permukiman di Kabupaten Sukamara, dimana tiga instansi teknis yang terlibat yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup, memberikan pemahaman dari berbagai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Intinya bahwa tim mengajak agar masyarakat dapat hidup bersih dan sehat.

Selanjutnya dalam rapat sosialisasi tersebut antusiasme masyarakat relatif besar memberikan dukungan bagi terselenggaranya program sanitasi dan penyehatan lingkungan, ditengah-tengah ketidakmampuan mereka mengadakan sendiri sarana sanitasi tersebut, hal ini tentunya membawa dampak positif bagi peningkatan

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pola yang dibangun dengan memberdayakan masyarakat ini diungkapkan oleh Tim Delevery (2004) bahwa pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya.

Sejalan dengan Cohen dan Uphoff dalam Siswanto (2011). partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan menentukan program sanitasi dan penyehatan lingkungan dilingkungan masyarakat lokal yang diwujudkan menyumbangkan gagasan atau pemikiran dalam pemecahan masalah, kehadiran dalam rapat, dan tanggapan atau penolakan mengenai program yang akan diluncurkan.

Terbentuknya kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang sebelumnya difasilitasi oleh pihak luar (pemerintah), berfungsi aktif dalam setiap rancangan kegiatan, seperti yang disampaikan Arnstein (1969) bahwa partisipasi masyarakat walaupun diarahkan atau *tokenisme* pada tangga partisipasi ke 4 dan 5, seiring dengan fokus pemberdayaan masyarakat lokal dalam realitasnya keputusan dalam menerima dan menolak program, KSM mempunyai kekuatan yang dominan dalam memutuskan sehingga dapat dikategorikan *citizen power* menempati tangga yang ke 7 partisipasi yang tinggi *delegated power*. Disini masyarakat lokal diberikan kepercayaan untuk mengelola program yang telah disepakati bersama-sama masyarakat lokal tersebut.

Dalam tahapan ini sosialisasi dilakukan bersama-sama pihak pemberi manfaat dan dihadiri oleh seluruh masyarakat sebagai penerima manfaat, secara teknis

sebelum keputusan diambil telah dilakukan upaya menjelaskan manfaat program sanitasi dan penyehatan lingkungan dari pihak eksternal (pemerintah) yang direpresentasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Kemudian dibentuklah kelompok yang disebut KSM dari masyarakat penerima manfaat, dengan tujuan mengelola dan melaksanakan program. Selanjutnya KSM sebagaimana dimaksud oleh Cohen dan Uphoff sebagai *Participation in Decision Making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan) tersebut mulai membuat keputusan untuk menerima atau menolak atas hasil kesepakatan warga dengan bukti berita acara.

Pengambilan keputusan tersebut menurut Siswanto (2012:30) berkaitan dengan penentuan alternatif tujuan dari suatu rencana pembangunan, hal ini sangat penting karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan, sebagaimana Korten dalam Soetomo (2013:409) yang mengutip pendapat Goulet bahwa pemberdayaan berarti proses untuk mengaktualisasikan potensi manusia, meliputi kelestarian hidup, harga diri dan kebebasan pendapat.

Kebebasan pendapat dalam rapat sangat dihargai dalam setiap pertemuan yang diikuti oleh penerima manfaat terutama kaum perempuan. Masyarakat sangat antusias menyampaikan pendapat-pendapatnya, dan usulan-usulan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka membangun lingkungan di wilayahnya. Selanjutnya kesepakatan yang telah ditandatangani dilampiri dengan surat pernyataan warga untuk menerima program, dan dengan diketahui oleh perangkat pemerintahan paling bawah yaitu desa atau kelurahan kemudian di teruskan kepada dinas teknis yakni

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara, seluruh usulan program direkap dan dikirim ke pihak provinsi untuk diteruskan kembali ke Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan dan permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat. Walaupun terkesan masih ada pengarahan dari stakeholder eksternal yang meluncurkan program, warga lokal yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat tetap mempunyai otoritas *decision making* terhadap program yang ditawarkan, sesuai dengan tingkatan partisipasi menurut Sherry R Arnstein (1969) dapat di masukkan dalam tangga ke 7 *delegasi kekuasaan*.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa telah terjadi proses pengambilan keputusan pada taraf tingkatan tertinggi dari masyarakat melalui pimpinan kolektif KSM berkenaan dengan program sanitasi dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Sukamara berhubung telah dipahami dan di mengertinya program dimaksud menyentuh kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan

Perubahan Paradigma yang lebih mengedepankan kebutuhan rakyat lebih memanfaatkan individu sebagai actor yang menentukan tujuan, mengontrol atau mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mengakomodasi perbedaan dan prakarsa local, karena itu mendukung bahkan

mendorong tumbuhnya proses yang bersifat swakelola sebagai bentuk kemandirian masyarakat local dalam melakukan aktivitas pembangunannya. (Soetomo, 2013:395). Selanjutnya Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017:83) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan dalam bentuk pengorbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang diterima oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

Sebagaimana hasil penelitian program sanitasi ada empat jenis yaitu bantuan sepienk komunal, bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS), on site sepienk dan bedah rumah. Untuk bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Maka bantuan sepienk komunal melibatkan partisipasi warga secara berkelompok sebanyak 50 rumah/warga dan diberikan bantuan sebesar 450 juta rupiah. Bantuan langsung tersebut masuk ke rekening KSM dan selanjutnya pengelolaan dilakukan secara swakelola. Dengan telah dicairkannya bantuan maka dimulailah pekerjaan sesuai dengan dokumen rencana yang telah ditetapkan bersama. Dalam kelompok tersebut penentuan lokasi pusat dibangunnya sepienk komunal harus dapat menjangkau lokasi pemukiman warga. Sedangkan harga yang harus dibayar untuk pembebasan lahan dikeluarkan dari dana bantuan. Selanjutnya jika pekerjaan tidak dapat di kerjakan oleh masyarakat lokal, maka dibantu pekerjaanya dari tenaga luar. Dalam penelitian yang dilakukan, antusias masyarakat ikut serta dalam pembuatan sepienk komunal, meliputi menyediakan lahan dengan harga murah, menyediakan makanan, upah tukang lokal

yang relatif murah dapat memperbaiki ekonomi masyarakatnya. Selain itu pekerjaan yang dilakukan secara swakelola menyesuaikan dengan kebutuhan warga masyarakat dapat meningkatkan solidaritas sosial dan gotong royong diantara warga lokal.

Menurut pandangan Korten dalam Soetomo (2013: 388) tiga hal yang dapat menjadi dasar mengapa pelaksanaan pembangunan masyarakat tidak dapat dilakukan secara seragam dan dikelola secara terpusat. Ketiga hal tersebut adalah variasi lokal, sumber daya lokal dan tanggung jawab lokal.

Adanya variasi lokal ditunjukkan oleh kenyataan bahwa kehidupan komunitas secara substansial diwarnai oleh variasi dilihat dari lingkungan alam dan sosialnya, dalam hal ini diwilayah Kabupaten Sukamara selain di aliri sungai juga “dipagari” oleh lautan, kondisi masyarakat sebelum adanya program masih menggunakan jamban disekitar sungai, setelah program berjalan hampir tiga tahun dari tahun 2015, kegiatan BABS sudah berkurang.

Sumber daya lokal, pada tingkat komunitas masih kental dengan kesadaran kolektif, solidaritas sosial dan kepentingan bersama, komitmen tentang suatu gagasan sebagai bentuk prakarsa dan kreativitas dari dalam, mereka berusaha untuk memobilisasi sumber daya yang ada melalui tindakan bersama guna merealisasikan gagasan tersebut. Warga penerima manfaat dalam KSM mempunyai keterikatan dengan seluruh anggota, dalam prakteknya secara sukarela menyediakan cadangan tenaga yang besar untuk kelancaran pembangunan proyek sarana sanitasi. Setiap

orang memperlihatkan bentuk partisipasinya masing-masing dalam pelaksanaan pekerjaan.

Tanggung jawab local, idealnya menggunakan prinsip bahwa kontrol terhadap suatu tindakan semestinya berada pada pihak yang akan menanggung akibat dari tindakan tersebut. Untuk meningkatkan kapasitas kontrol masyarakat local terhadap keputusan tindakan yang akan dijalankan, diperlukan suatu organisasi dan pendekatan yang dapat mendorong inisiatif local, tanggungjawab lokal dan pengelolaan secara mandiri yang dapat memperkuat proses belajar sosial. KSM dibentuk difasilitasi oleh pihak luar untuk memenuhi kapasitas kontrol masyarakat terhadap program. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya dan keadaan ini berlaku bagi kelompok KSM di Kabupaten Sukamara.

Sebagaimana penelitian Kalesaran dkk (2015) sebelum dibangun sarana jalan dan penahan longsor di Kelurahan Taas Kota Manado, banyak masyarakat mengalami kecelakaan dan jalan sangat berbahaya bila turun hujan, namun setelah adanya pembangunan sarana jalan dan penahan longsor tingkat bahaya kecelakaan dapat di minimalisir. Konteks ini sesuai dengan apa yang dikatakan Spencer (1989), bahwa di dalam partisipasi ada unsur tanggung jawab, dalam partisipasi sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan lebih dari pada hanya semata-mata keterlibatan jasmani.

Di sini partisipasi masyarakat muncul karena merasa sepenanggungan dengan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Maka pada tingkatan ini

sesungguhnya masyarakat lokal dalam KSM penerima manfaat telah berada pada tingkatan tertinggi dalam tangga partisipasi Arnstein, yang berarti masyarakat memiliki kontrol dalam implementasi program hingga evaluasi yang ditandai dengan keikutsertaan mereka dalam menyukseskan rangkaian pelaksanaan program.

Dari analisa diatas dapat disimpulkan partisipasi masyarakat yang menyangkut pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam hal ini adalah kelompok Swadaya Masyarakat, yang memulai pekerjaan, menghimpun warga untuk ikut berperan serta, menyediakan lokasi dan penyiapan tenaga kerja dari dan untuk masyarakat yang tergabung dalam penerima manfaat program.

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari prosentase keberhasilan program. Menurut Ndraha dalam Siswanto (2011:31), partisipasi dalam mengambil manfaat meliputi hal-hal sebagai berikut, menerima setiap hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri; menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan; mengusahakan (menjadikan sesuatu lapangan usaha, mengeksploitasikan; merawat, memelihara secara rutin dan sistematis dan tidak dibiarkan rusak

Adanya fakta-fakta dalam penelitian yang menyatakan kerusakan sarana prasarana sanitasi yang belum digunakan dan masih adanya sarana yang tidak diperbaiki ataupun ditambah, karena bantuan tersebut masih perlu didukung oleh penerima bantuan dalam bentuk fisik yaitu memberi kamar khusus untuk wc, memberi dinding penutup untuk penggunaan sarana yang lebih baik, pemeliharaan yang tidak sesuai dengan kaidah atau petunjuk pemakaian, hal demikian diungkapkan oleh Soetomo (2013:435) sebagai kurangnya wawasan, kurang percaya diri akan kapasitasnya, hal ini menunjukkan masyarakat lokal belum memanfaatkan dan secara emosional belum menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah diselenggarakan oleh kelompok penerima manfaat dalam hal ini KSM.

Dari pengamatan penelitian ditemukan juga hasil pembangunan sanitasi di Desa Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci, tetap terpelihara dengan baik dan dapat dinikmati masyarakat penerima manfaat, misalnya dari aspek keamanan orang tidak perlu lagi keluar malam atau pagi untuk buang hajat di jamban sekitar sungai akan tetapi cukup di rumah saja sewaktu-waktu, kebiasaan buruk bab menjadi berkurang. Untuk biaya pemeliharaan digunakan sisa dana BLM dan iuran anggota KSM.

Selanjutnya ketidakmampuan untuk membuat dinding jamban/wc, di beberapa daerah sasaran dinding wc hanya menggunakan kain atau plastic/terpal untuk menutupi, hal ini keterkaitan dengan penghasilan yang kurang memadai, namun akan diselesaikan bilamana mendapat keuangan yang cukup. Aspek non teknis berkaitan dengan kebiasaan bab yang sulit dirubah berhubung dengan penggunaan fasilitas air yang terbatas, lebih praktis dan kurangnya pengetahuan dalam aspek

pemeliharaan misalnya membersihkan memakai detergen secara berlebihan akan mengakibatkan terhambatnya saluran, tidak membersihkan wc secara rutin juga ditemukan dalam beberapa kasus, selain itu pula ditemukan kebersihan wc hanya dilakukan oleh ibu rumah tangga, tidak dilakukan secara bersama-sama dalam suatu keluarga.

Dari analisis terhadap fenomena diatas , secara garis besar dapat di ketahui bahwa kecenderungan hasil-hasil pembangunan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal berhubung hambatan structural maupun sosial kemasyarakatan, selain itu pula kurangnya pendapatan membuat komunitas kurang berdaya, walaupun demikian ada anggota kelompok KSM yang memaksimalkan penggunaan hasil-hasil pembangunan dengan lebih baik berhubung ketersediaan informasi dan pemahaman yang lebih memadai, maka dari itu Mardikanto dkk (2017:97) menyampaikan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah karena mereka hanya diminta untuk berpartisipasi dalam memberikan input tanpa mengetahui dengan jelas manfaat apa yang akan mereka peroleh dan rasakan.

4. Partisipasi dalam Evaluasi Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya. Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan selanjutnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sangat penting dan dibutuhkan dalam menjamin keberhasilan tujuan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dapat diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang bersifat preventif dan represif terhadap program pembangunan yang dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri.

Mengutip pendapat Cohen dan Uphoff dalam Siswanto (2012:31) bahwa partisipasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Maka hasil penelitian menunjukkan evaluasi yang diselenggarakan oleh KSM yang melibatkan seluruh stakeholder telah berjalan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama, terutama mengenai aktivitas kegiatan warga yang memanfaatkan program, menaikkan pendapatan keluarga karena diberikan insentif terhadap jasa yang dilakukan, namun sisi lainnya ada sebagian warga yang kurang dapat memanfaatkan hasil pembangunan berhubung sulitnya mengikis kebiasaan BABS diluar sarana yang disediakan. Kemudian dalam hal pengeluaran ternyata masyarakat dalam KSM dapat menghemat dana hingga ratusan juta rupiah. Kelebihan atau sisa dana tersebut atas kesepakatan digunakan untuk pemeliharaan dan juga membangun sarana lainnya mendukung program yang dijalankan sebelumnya.

Beberapa hal yang menjadi catatan penelitian selain hal diatas bahwa kehadiran warga dalam mengikuti rapat antara lain hasil wawancara dengan beberapa

anggota masyarakat dan aparat instansi terkait, mereka merasa perlu hadir dalam rapat karena antara lain, mendengarkan pertanggungjawaban, dan sangat jarang terjadi protes berhubung pengelola KSM dianggap sebagai elit masyarakat yang jujur, baik dan dipercaya. Selain itu, anggota masyarakat yang tidak hadir beranggapan ketidakhadirannya dapat digantikan dari keluarga penerima manfaat untuk menghadiri undangan. Sementara itu beberapa sosialisasi yang dilakukan lebih ditekankan kehadiran dari pengurus LMD dan tokoh masyarakat dengan harapan bisa disampaikan kembali kepada warga, menganggap warga penerima manfaat selalu menerima bila para tokoh tadi yang mengajak dan memberikan pemahaman sehingga dapat dikatakan partisipasi masyarakat bersifat pasif. Pelaksanaan, pada tahapan ini seperti yang dikatakan Dusseldorf dalam Mardianto dkk (2017:87) sebagai partisipasi yang tertekan, berhubung adanya ketakutan menerima hukuman atau sangsi.

D. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Sukamara

1. Faktor pendukung partisipasi masyarakat program sanitasi dan penyehatan lingkungan.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi masyarakat di Kabupaten Sukamara tidak terlepas dari berbagai faktor diantaranya kinerja aparatur petugas, Aparatur Kabupaten Sukamara serta Masyarakat Kabupaten Sukamara itu sendiri. Dari sisi aparatur petugas Sanitasi Lingkungan berupa Pembangunan sepienk komunal, bantuan *on site sepienk*, BSPS (bantuan Stimulan perumahan swadaya) dan bedah rumah di Kabupaten Sukamara bahwa (1) faktor sumber daya manusia adalah

salah satu faktor yang harus mendukung yang mana sumber daya manusia merupakan motor penggerak dalam pelaksanaan suatu kegiatan khususnya dalam bidang pelaksanaan partisipasi masyarakat. Kualitas dikatakan memadai apabila tingkat pendidikan formal yang dimiliki personil cukup baik sehingga memiliki kecakapan atau kemampuan yang cukup tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Faktor kreativitas dan konsistensi terhadap aturan dalam partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi perolehan capaian ini. (2) Sosialisasi program yang dilakukan aparatur Kabupaten Sukamara merupakan faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung sanitasi lingkungan berupa pembangunan MCK dalam bentuk pemberdayaan melalui bantuan langsung masyarakat (BLM). *Pertama* melalui sosialisasi langsung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat. Sosialisasi langsung ini dilakukan di lapangan atau dengan mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Sosialisasi ini memiliki keunikan sendiri yakni kegiatannya disertakan bersamaan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan yakni pada saat pengajian/yasinan, rapat rutin kelompok KSM setiap enam bulan sekali, dan musrenbang, yang sebagian didanai oleh instansi terkait. *Kedua* dengan memberikan brosur yang berisikan ketentuan mengenai sanitasi dan penyehatan lingkungan, kepada masyarakat. Brosur ini memiliki keunggulan dimana bentuk brosur menarik perhatian serta menggunakan bahasa daerah sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. (3) Selain itu dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sanitasi berupa penyediaan dana pendamping yang digunakan bila ada kerusakan berat terhadap sarana sanitasi warga, kewajiban ini sebagai konsekuensi logis dari pemerintah daerah yang dituntut dalam melayani

warganya. Ketergantungan ini juga diimbangi oleh kewajiban warga penerima manfaat untuk mengadakan perbaikan bila ada kerusakan ringan dan dapat ditangani sendiri atau secara berkelompok hasil sisa dari pengelolaan keuangan dan iuran warga. (4) adanya KSM merupakan bentuk jaringan sosial baru yang dapat membuka partisipasi dengan lebih terbuka, seperti penjelasan Siswanto (2012:32) bahwa keberhasilan pengelolaan pembangunan tergantung dengan tingginya motivasi keswadayaan dimana masyarakat dibebaskan memilih dan memutuskan sendiri secara demokratis, sehingga akan mengokohkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.

2. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam program sanitasi dan penyehatan lingkungan.

Faktor Penghambat atau Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Partisipasi masyarakat yaitu partisipasi atau kesadaran masyarakat dalam masyarakat penerima manfaat masih rendah, Berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang diterima masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sarana MCK khususnya. Masyarakat tidak memahami bahwa Sanitasi Lingkungan sangat besar kontribusinya dalam penyehatan lingkungan dalam era pembangunan saat ini:

1. Penggunaan sarana sanitasi sudah cukup tinggi namun belum semuanya meningkatkan pengetahuan dan partisipasi kesehatan lingkungan. Masyarakat belum sepenuhnya paham penggunaan sarana sanitasi dan ini berpengaruh terhadap perawatan dan keberlanjutan sarana sanitasi pada masa mendatang.
2. Aparat dalam melaksanakan tugas sosialisasi, penuh integritas yang memang

- karena faktor geografi dan kesibukan mencari nafkah warga maka masyarakat penerima manfaat tidak semuanya dapat ditemui, selain itu pula berkaitan dengan tahapan perencanaan, inisiatif warga yang sebagian besar diwakili oleh tokoh dan lembaga desa/kelurahan maka warga hanya dapat menyetujui karena bila tidak setuju akan menghambat pembangunan. Maka dari itu Soetrisno menyatakan bahwa pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh aparat pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai subodinasi pemerintah (Mardikanto dan Soebiato, 2017:95). Bila dihubungkan dengan tingkatan partisipasi maka berada dalam kondisi partisipasi terendah. Karena beberapa ciri misalnya masyarakat diberitahu tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka, pemberitahuan sepihak tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat, dan informasi yang terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran.
3. Sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam masyarakat penerima manfaat, hal ini terkait dengan anggapan bahwa dengan selesainya proyek maka manfaatnya sudah pasti dirasakan oleh masyarakat padahal beberapa warga belum sepenuhnya tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia. Temuan dari warga yang tidak dapat memanfaatkan sarana sanitasi menyiratkan sikap apatis warga, ada namun seperti tidak ada.
 4. Kurang pahamnya masyarakat dalam mengurus sarana sanitasi lingkungan

- khususnya MCK, hal ini terkait tidak adanya mobilisir warga guna memanfaatkan sarana (tanpa adanya penurunan kualitas) dalam jangka panjang, dalam penelitian ini warga mengoperasikan sarana tanpa memahami ketentuan penggunaan, tidak membersihkan secara rutin, menjaga dan merawat dan ketidakmampuan menyiapkan sarana pendukung lain berupa dinding wc, yang mengancam kesehatan warga.
5. Kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah berhubung dengan perilaku babs, diperlukan pendekatan yang melibatkan para tokoh yang dapat merubah kebiasaan tersebut, dalam penelitian belum terlihat kesungguhan tokoh dalam mempengaruhi warga untuk berbuat dan berperilaku hidup bersih dan sehat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari temuan di lapangan dan dengan mendasarkan pada pembahasan hasil penelitian yang telah dianalisis bisa diambil kesimpulan :

1. Partisipasi masyarakat dalam program sanitasi dan penyehatan lingkungan secara umum terdapat dalam setiap tahapan program meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan , pemanfaatan dan evaluasi.
 - a. Pada tahap pengambilan keputusan, kegiatan disosialisasikan sampai pada tingkat masyarakat penerima manfaat, melibatkan seluruh lembaga instansi terkait, yang secara simbolis dianggap mewakili instansi masing-masing, partisipasi terlihat ketika KSM melakukan rapat memutuskan menerima atau menolak program yang akan digulirkan, merupakan tingkatan yang menunjukkan dominannya peran masyarakat lokal dalam upaya mengangkat kehidupan kearah yang lebih baik.
 - b. Pada tahapan pelaksanaan, partisipasi masyarakat yang termasuk dalam kelompok swadaya masyarakat melaksanakan pembangunan proyek dengan melibatkan warga penerima manfaat, menyiapkan lahan, tempat, memberikan tenaga dengan upah yang relatif murah terjangkau, memberdayakan sebagian besar tenaga lokal , memberikan bantuan makanan dan minuman ketika ada kerja bakti warga secara bergiliran dan berkelompok memanfaatkan partisipasi kaum wanita dalam setiap kegiatan

sesuai dengan pembagian kerja, berkaitan dengan tinggi partisipasi dalam mengelola, melaksanakan program..

- c. Tahapan Pemanfaatan, partisipasi masyarakat kurang optimal, hal ini terkait dengan faktor sosio kultural dan struktural, ditandai terdapatnya kerusakan sarana prasarana karena tidak dipakai, terkait dengan kebiasaan perilaku bab yang sulit dirubah, belum sepenuhnya menyediakan sarana pendukung dan ketidaktahuan dalam pemanfaatan sarana sanitasi.
 - d. Tahapan Evaluasi, partisipasi warga penerima manfaat ditandai menerima program dengan kesadaran tinggi, untuk peningkatan kesehatan dan taraf hidup yang lebih baik. Selain itu mengikuti rapat yang diadakan guna mengetahui pertanggungjawaban KSM sebagai pengelola dana dan koordinator pelaksana kegiatan, mempertanyakan, mengusulkan solusi terhadap permasalahan terkait dengan program, dan cenderung menghindari protes dan ketidakpuasan warga dengan cara menerima setiap laporan pertanggungjawaban, me.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi dalam program sanitasi dan penyehatan lingkungan, meliputi: (a) faktor pendukung, berupa sumber daya manusia aparat dari sinergi antar instansi pemerintah daerah yang mampu melaksanakan dan mengendalikan program secara baik, adanya sosialisasi yang memberikan pemahaman sehingga program dapat diterima dengan baik oleh kelompok sasaran, dukungan dana pendampingan dari pemerintah daerah sebagai syarat penting dalam menjaga keberlangsungan program dalam masa pengawasan, dan adanya jaringan kelompok sosial baru bernama KSM yang

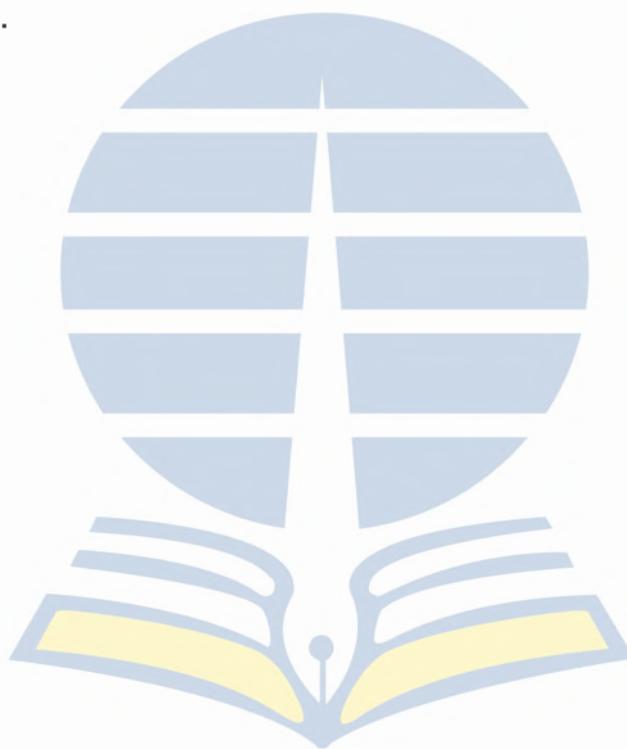
menjamin program berlangsung dengan baik. (b) faktor penghambat meliputi, pemahaman warga masih terhadap manfaat sarana sanitasi belum memadai dan berdampak pada pemakaian yang relatif singkat mempengaruhi keberlanjutan program, partisipasi masyarakat hanya sebagai sub ordinat dari pemerintah yang hanya menyetujui setiap program dalam level terendah partisipasi pasif, sikap apatis warga penerima manfaat, sarana seperti ada dan tiada, dan kebiasaan perilaku BABS yang sulit dirubah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyadari betapa besarnya dampak partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sanitasi di Kabupaten Sukamara, oleh karena itu saran ditujukan kepada :

1. Pemerintah Daerah Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Permukiman di Kabupaten Sukamara Peningkatan partisipasi masyarakat harus lebih diutamakan dari segi pembangunan manusianya bukan terfokus pada peran masyarakat dalam pembangunan fisik saja maka dari itu dengan memberikan pemahaman yang komprehensif menjadi tugas bersama antara masyarakat dan pemerintah selain itu perlu bantuan stimulus pemeliharaan agar sarana-prasarana tetap dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi perbaikan kualitas hidup.
2. Stakeholder internal dan eksternal bahwa Sosialisasi program tidak terbatas dalam rapat, tapi dapat disampaikan dengan berbagai media penyampaian baik melalui tokoh agama, adat maupun tokoh masyarakat, dalam setiap kegiatan masyarakat yang kerakkali diadakan .
3. Kelompok Swadaya masyarakat (KSM) bahwa peran aktif masyarakat

- diharapkan bukan hanya saat implementasi program pembangunan infrastruktur sanitasi tetapi diharapkan juga pada saat formulasi ataupun evaluasi proses pembangunan tersebut, melalui proses belajar sosial guna perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.
4. Stakeholder eksternal , untuk merubah kebiasaan BABS warga masyarakat diperlukan pendekatan yang lebih persuasif yang lebih memanusiakan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat dengan cara mengunjungi dan silaturahmi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adiyoso, Wignyo. (2009). *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: ITS Press
- Al Hakim, Suparlan. (2015). *Pengantar Studi Masyarakat Indonesia*. Malang: Madani.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara (2018). *Kabupaten Sukamara Dalam Angka Tahun 2018*. Sukamara: BPS Kabupaten Sukamara
- Creswell, John W. (2010). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Sanapiah. (2007). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada
- Handayani, W. (2006). *Psikologi keluarga*. Jakarta : Pustaka Utama
- Joko Widodo, (2001), *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Koentjaraningrat. (1990). *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. PT. Gramedia, Jakarta
- Mardikanto, Totok, dan Soebiato, Poerwoko.(2017) *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Martono, Nanang . (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Miftah Thoha, (1992), *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*, Yogyakarta:
- Miles, Matthew, dan Michael A. Huberman, (2009), *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Penerjemah, Tjetjep Rohendi Rohidi dan Pendamping Mulyarto, Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- Moleong, Lexy J. (2012), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sherry R. Arnstein (1969), *A Ladder of Citizen Participation*, JAIP. Vol. 3
- Siswanto, Budi. (2012), *Pemberdayaan Masyarakat*, Malang : Servaminora.
- Soetomo (2013), *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soetrisno, Loekman. (1995). *Menuju Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sastropoetro, RA. Santoso, (1988), *Partisipasi, komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan*, Bandung : Penerbit Alumni..

- Sedarmayanti, (2007), *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Bandung: Mandar Maju.
- Spencer, L.J. (1989). *Winning Through Participation*, USA : Kendal Hunt Publishing Company.
- Sugiyono, (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Usman, Husaini. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Kedua)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Sunyoto . (1998). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peraturan /Petunjuk Teknis/ Jurnal

- Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Perumahan.(2016) *Petunjuk Teknis Kegiatan Program Sanitasi Masyarakat (Sanimas) dan Penyehatan Lingkungan*
- Kalesaran, Ferdinand. Rantung, Ventje V. , Pioh, Novi.R. (2015) *Partisipasi Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado*. e-journal : Acta Diurna Volume IV. No.5.
- Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 188.45/ 1 Bd /2018 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Permukiman di Kabupaten Sukamara
- Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman

Sumber Internet :

- Supeno, Eko. (2005) *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Dan Upaya Mewujudkannya* diunduh pada tanggal 4 Juni 2018 dari situs:
<file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Documents/01-Eko%20Supeno%202005.pdf>
<https://news.detik.com/berita/d-3671789/kepala-bappenas-indonesia-peringkat-2-sanitasi-terburuk-di-dunia>.

PEDOMAN WAWANCARA

DATA SUBYEK PENELITIAN: MASYARAKAT

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| a. Nama | : M. YADI |
| b. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| c. Pekerjaan | : Swasta/Ketua KSM Permata Padang |
| d. Alamat | : Kelurahan Padang, Kec. Sukamara |

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Darimana saudara mengetahui program ini
2. Apakah saudara ikut serta dalam kegiatan merumuskan program sanitasi dan penyehatan lingkungan di daerah kabupaten sukamara
3. Berapa kali saudara mengikuti rapat sosialisasi
4. Apakah setiap keputusan dalam identifikasi program melibatkan masyarakat (tokoh/perwakilan)?
5. Jelaskan bagaimanakah masukan saudara bagi program ini
6. Apakah penerima bantuan program sesuai dengan ketentuan/ tepat sasaran

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Jelaskan bagaimana proses pelaksanaan program ini
2. Siapa yang mengerjakan atau melaksanakan program ini di daerah saudara
3. Bagaimanakah bentuk keterlibatan saudara dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban keluarga.
4. Bantuan yang saudara berikan dalam program ini (materi maupun non materi)
5. Apakah masyarakat penerima bantuan turut serta memberikan bantuan dalam pelaksanaan program ini
6. Apakah ada keterlibatan kaum wanita dalam program ini
7. Apa saja yang disiapkan dalam mendukung program ini,
8. Jelaskan apa saja yang tidak dapat dipenuhi dalam mendukung program

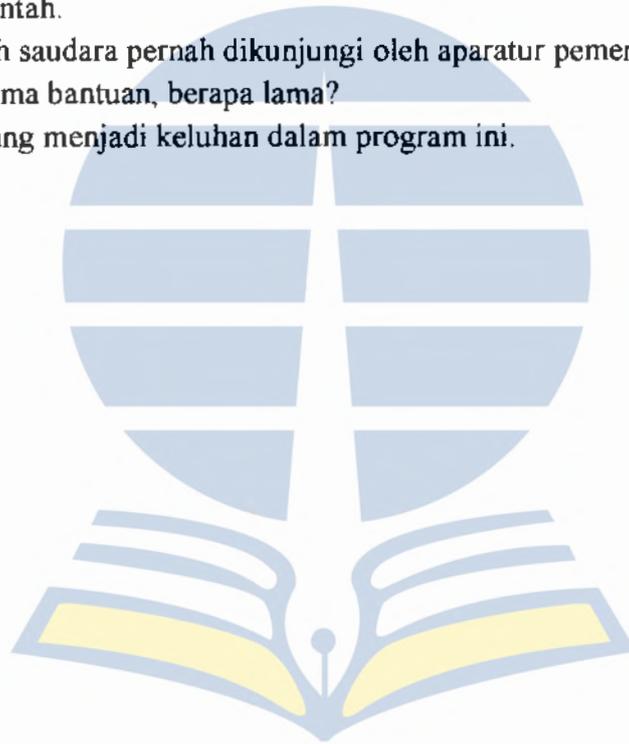
C. TAHAP PEMANFAATAN

1. Apakah saudara termasuk dalam penerima bantuan program
2. Dalam bentuk apa bantuan yang diberikan
3. Bagaimana perasaan saudara menerima bantuan ini
4. Apakah telah memanfaatkan sarana sanitasi yang diberikan dan kesulitan dalam penggunaan bantuan program ini
5. Bagaimanakah kualitas bantuan program ini
6. Dalam rumah tangga saudara, Siapa yang bertugas membersihkan toilet/wc
7. Adakah tempat BABS yang lain, selain yang ada di rumah/milik sendiri

8. Adakah tersedia sarana BABS ladang/kebun saudara?
9. Apakah saudara mengetahui bahwa bantuan program ini hanya diberikan sekali, bagaimana tanggapan saudara.

D. TAHAP EVALUASI

1. Setelah program ini dilaksanakan, apakah ada komplain dari anggota masyarakat? Terkait dengan kualitas sarana dan prasarana yang diberikan
2. Apakah realisasi bantuan program ini telah sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.
3. Apakah bantuan fasilitas yang diberikan sudah dimanfaatkan secara maksimal.
4. Apakah saudara mengetahui bagaimana cara memberikan masukan kepada pemerintah.
5. Apakah saudara pernah dikunjungi oleh aparat pemerintah setelah menerima bantuan, berapa lama?
6. Apa yang menjadi keluhan dalam program ini.



PEDOMAN WAWANCARA

DATA SUBYEK PENELITIAN: MASYARAKAT

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| a. Nama | : H. SURI |
| b. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| c. Pekerjaan | : Swasta/Ketua KSM Bina Warga |
| d. Alamat | : Kelurahan Mendawai, Kec. Sukamara |

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Darimana saudara mengetahui program ini
2. Apakah saudara ikut serta dalam kegiatan merumuskan program sanitasi dan penyehatan lingkungan di daerah kabupaten sukamara
3. Berapa kali saudara mengikuti rapat sosialisasi
4. Apakah setiap keputusan dalam identifikasi program melibatkan masyarakat (tokoh/perwakilan)?
5. Jelaskan bagaimanakah masukan saudara bagi program ini
6. Apakah penerima bantuan program sesuai dengan ketentuan/ tepat sasaran

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Jelaskan bagaimana proses pelaksanaan program ini
2. Siapa yang mengerjakan atau melaksanakan program ini di daerah saudara
3. Bagaimanakah bentuk keterlibatan saudara dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban keluarga.
4. Bantuan yang saudara berikan dalam program ini (materi maupun non materi)
5. Apakah masyarakat penerima bantuan turut serta memberikan bantuan dalam pelaksanaan program ini
6. Apakah ada keterlibatan kaum wanita dalam program ini
7. Apa saja yang disiapkan dalam mendukung program ini,
8. Jelaskan apa saja yang tidak dapat dipenuhi dalam mendukung program

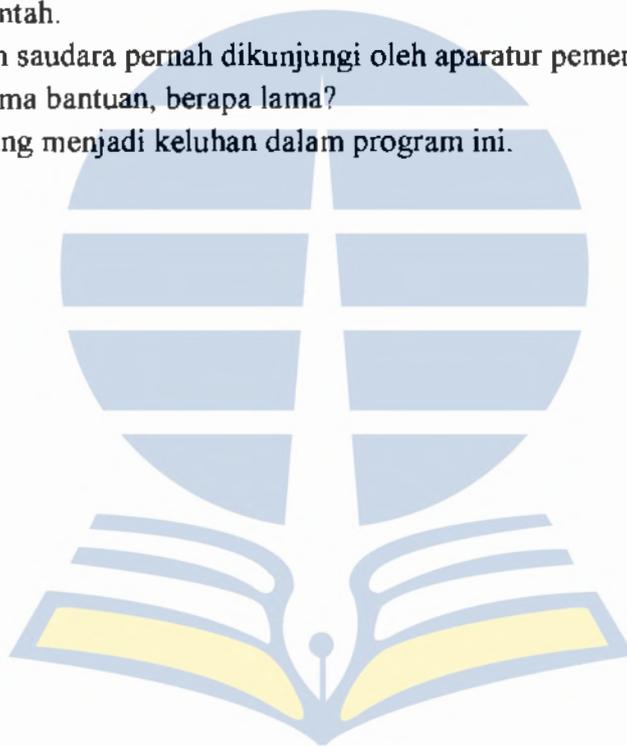
C. TAHAP PEMANFAATAN

1. Apakah saudara termasuk dalam penerima bantuan program
2. Dalam bentuk apa bantuan yang diberikan
3. Bagaimana perasaan saudara menerima bantuan ini
4. Apakah telah memanfaatkan sarana sanitasi yang diberikan dan kesulitan dalam penggunaan bantuan program ini
5. Bagaimanakah kualitas bantuan program ini
6. Dalam rumah tangga saudara, Siapa yang bertugas membersihkan toilet/wc
7. Adakah tempat BABS yang lain, selain yang ada dirumah/milik sendiri

8. Adakah tersedia sarana BABS ladang/kebun saudara?
9. Apakah saudara mengetahui bahwa bantuan program ini hanya diberikan sekali, bagaimana tanggapan saudara.

D. TAHAP EVALUASI

1. Setelah program ini dilaksanakan, apakah ada komplain dari anggota masyarakat? Terkait dengan kualitas sarana dan prasarana yang diberikan
2. Apakah realisasi bantuan program ini telah sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.
3. Apakah bantuan fasilitas yang diberikan sudah dimanfaatkan secara maksimal.
4. Apakah saudara mengetahui bagaimana cara memberikan masukan kepada pemerintah.
5. Apakah saudara pernah dikunjungi oleh aparaturnya pemerintah setelah menerima bantuan, berapa lama?
6. Apa yang menjadi keluhan dalam program ini.



PEDOMAN WAWANCARA

DATA SUBYEK PENELITIAN: MASYARAKAT

- | | | | |
|----|---------------|---|--|
| a. | Nama | : | NANANG |
| b. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| c. | Pekerjaan | : | Swasta/Tokoh Masyarakat Desa Sei. Cabang Barat |
| d. | Alamat | : | Desa Sei. Cabang Barat, Kec. Pantai Lunci |

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Darimana saudara mengetahui program ini
2. Apakah saudara ikut serta dalam kegiatan merumuskan program sanitasi dan penyehatan lingkungan di daerah kabupaten sukamara
3. Berapa kali saudara mengikuti rapat sosialisasi
4. Apakah setiap keputusan dalam identifikasi program melibatkan masyarakat (tokoh/perwakilan)?
5. Jelaskan bagaimanakah masukan saudara bagi program ini
6. Apakah penerima bantuan program sesuai dengan ketentuan/ tepat sasaran

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Jelaskan bagaimana proses pelaksanaan program ini
2. Siapa yang mengerjakan atau melaksanakan program ini di daerah saudara
3. Bagaimanakah bentuk keterlibatan saudara dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban keluarga.
4. Bantuan yang saudara berikan dalam program ini (materi maupun non materi)
5. Apakah masyarakat penerima bantuan turut serta memberikan bantuan dalam pelaksanaan program ini
6. Apakah ada keterlibatan kaum wanita dalam program ini
7. Apa saja yang disiapkan dalam mendukung program ini,
8. Jelaskan apa saja yang tidak dapat dipenuhi dalam mendukung program

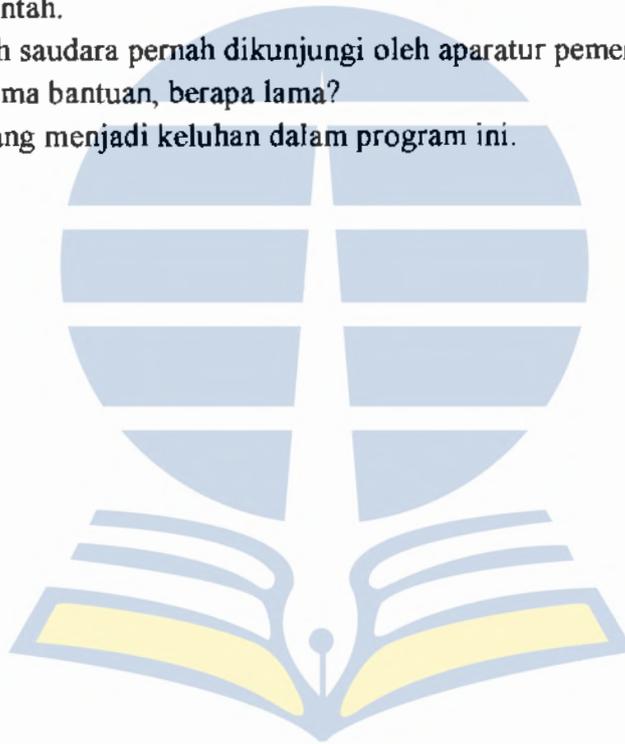
C. TAHAP PEMANFAATAN

1. Apakah saudara termasuk dalam penerima bantuan program
2. Dalam bentuk apa bantuan yang diberikan
3. Bagaimana perasaan saudara menerima bantuan ini
4. Apakah telah memanfaatkan sarana sanitasi yang diberikan dan kesulitan dalam penggunaan bantuan program ini
5. Bagaimanakah kualitas bantuan program ini
6. Dalam rumah tangga saudara, Siapa yang bertugas membersihkan toilet/wc
7. Adakah tempat BABS yang lain, selain yang ada di rumah/milik sendiri

8. Adakah tersedia sarana BABS ladang/kebun saudara?
9. Apakah saudara mengetahui bahwa bantuan program ini hanya diberikan sekali, bagaimana tanggapan saudara.

D. TAHAP EVALUASI

1. Setelah program ini dilaksanakan, apakah ada komplain dari anggota masyarakat? Terkait dengan kualitas sarana dan prasarana yang diberikan
2. Apakah realisasi bantuan program ini telah sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.
3. Apakah bantuan fasilitas yang diberikan sudah dimanfaatkan secara maksimal.
4. Apakah saudara mengetahui bagaimana cara memberikan masukan kepada pemerintah.
5. Apakah saudara pernah dikunjungi oleh aparat pemerintah setelah menerima bantuan, berapa lama?
6. Apa yang menjadi keluhan dalam program ini.



PEDOMAN WAWANCARA

DATA SUBYEK PENELITIAN: MASYARAKAT

- | | | | |
|----|---------------|---|--------------------------------------|
| a. | Nama | : | TATI |
| b. | Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| c. | Pekerjaan | : | Ibu Rumah Tangga (IRT) |
| d. | Alamat | : | Desa Cabang Barat, Kec. Pantai Lunci |

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Darimana saudara mengetahui program ini
2. Apakah saudara ikut serta dalam kegiatan merumuskan program sanitasi dan penyehatan lingkungan di daerah kabupaten sukamara
3. Berapa kali saudara mengikuti rapat sosialisasi
4. Apakah setiap keputusan dalam identifikasi program melibatkan masyarakat (tokoh/perwakilan)?
5. Jelaskan bagaimanakah masukan saudara bagi program ini
6. Apakah penerima bantuan program sesuai dengan ketentuan/ tepat sasaran

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Jelaskan bagaimana proses pelaksanaan program ini
2. Siapa yang mengerjakan atau melaksanakan program ini di daerah saudara
3. Bagaimanakah bentuk keterlibatan saudara dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban keluarga.
4. Bantuan yang saudara berikan dalam program ini (materi maupun non materi)
5. Apakah masyarakat penerima bantuan turut serta memberikan bantuan dalam pelaksanaan program ini
6. Apakah ada keterlibatan kaum wanita dalam program ini
7. Apa saja yang disiapkan dalam mendukung program ini,
8. Jelaskan apa saja yang tidak dapat dipenuhi dalam mendukung program

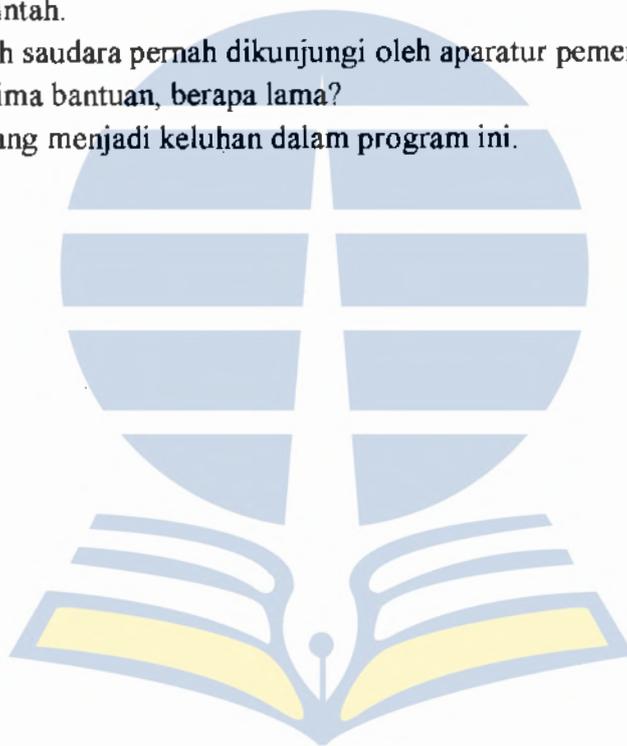
C. TAHAP PEMANFAATAN

1. Apakah saudara termasuk dalam penerima bantuan program
2. Dalam bentuk apa bantuan yang diberikan
3. Bagaimana perasaan saudara menerima bantuan ini
4. Apakah telah memanfaatkan sarana sanitasi yang diberikan dan kesulitan dalam penggunaan bantuan program ini
5. Bagaimanakah kualitas bantuan program ini
6. Dalam rumah tangga saudara, Siapa yang bertugas membersihkan toilet/wc
7. Adakah tempat BABS yang lain, selain yang ada di rumah/milik sendiri

8. Adakah tersedia sarana BABS ladang/kebun saudara?
9. Apakah saudara mengetahui bahwa bantuan program ini hanya diberikan sekali, bagaimana tanggapan saudara.

D. TAHAP EVALUASI

1. Setelah program ini dilaksanakan, apakah ada komplain dari anggota masyarakat? Terkait dengan kualitas sarana dan prasarana yang diberikan
2. Apakah realisasi bantuan program ini telah sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.
3. Apakah bantuan fasilitas yang diberikan sudah dimanfaatkan secara maksimal.
4. Apakah saudara mengetahui bagaimana cara memberikan masukan kepada pemerintah.
5. Apakah saudara pernah dikunjungi oleh aparatur pemerintah setelah menerima bantuan, berapa lama?
6. Apa yang menjadi keluhan dalam program ini.



PEDOMAN WAWANCARA

DATA SUBYEK PENELITIAN: MASYARAKAT

- | | | | |
|----|---------------|---|--------------------------------------|
| a. | Nama | : | DODI |
| b. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| c. | Pekerjaan | : | Swasta/Tokoh Pemuda Kelurahan Padang |
| d. | Alamat | : | Kelurahan Padang, Kec. Sukamara |

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Darimana saudara mengetahui program ini
2. Apakah saudara ikut serta dalam kegiatan merumuskan program sanitasi dan penyehatan lingkungan di daerah kabupaten sukamara
3. Berapa kali saudara mengikuti rapat sosialisasi
4. Apakah setiap keputusan dalam identifikasi program melibatkan masyarakat (tokoh/perwakilan)?
5. Jelaskan bagaimanakah masukan saudara bagi program ini
6. Apakah penerima bantuan program sesuai dengan ketentuan/ tepat sasaran

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Jelaskan bagaimana proses pelaksanaan program ini
2. Siapa yang mengerjakan atau melaksanakan program ini di daerah saudara
3. Bagaimanakah bentuk keterlibatan saudara dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban keluarga.
4. Bantuan yang saudara berikan dalam program ini (materi maupun non materi)
5. Apakah masyarakat penerima bantuan turut serta memberikan bantuan dalam pelaksanaan program ini
6. Apakah ada keterlibatan kaum wanita dalam program ini
7. Apa saja yang disiapkan dalam mendukung program ini,
8. Jelaskan apa saja yang tidak dapat dipenuhi dalam mendukung program

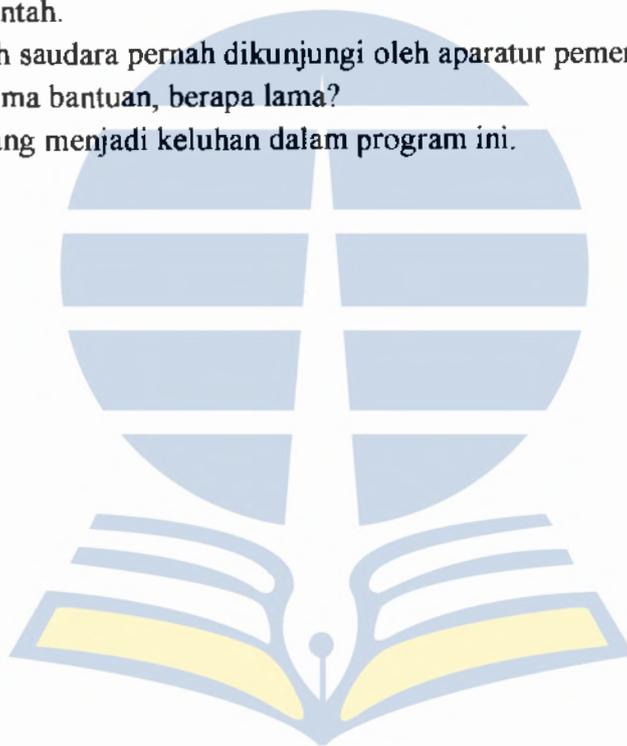
C. TAHAP PEMANFAATAN

1. Apakah saudara termasuk dalam penerima bantuan program
2. Dalam bentuk apa bantuan yang diberikan
3. Bagaimana perasaan saudara menerima bantuan ini
4. Apakah telah memanfaatkan sarana sanitasi yang diberikan dan kesulitan dalam penggunaan bantuan program ini
5. Bagaimanakah kualitas bantuan program ini
6. Dalam rumah tangga saudara, Siapa yang bertugas membersihkan toilet/wc
7. Adakah tempat BABS yang lain, selain yang ada di rumah/milik sendiri

8. Adakah tersedia sarana BABS ladang/kebun saudara?
9. Apakah saudara mengetahui bahwa bantuan program ini hanya diberikan sekali, bagaimana tanggapan saudara.

D. TAHAP EVALUASI

1. Setelah program ini dilaksanakan, apakah ada komplain dari anggota masyarakat? Terkait dengan kualitas sarana dan prasarana yang diberikan
2. Apakah realisasi bantuan program ini telah sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.
3. Apakah bantuan fasilitas yang diberikan sudah dimanfaatkan secara maksimal.
4. Apakah saudara mengetahui bagaimana cara memberikan masukan kepada pemerintah.
5. Apakah saudara pernah dikunjungi oleh aparat pemerintah setelah menerima bantuan, berapa lama?
6. Apa yang menjadi keluhan dalam program ini.



PEDOMAN WAWANCARA

DATA SUBYEK PENELITIAN: APARATUR PEMERINTAH

- | | | |
|----|---------------|--|
| a. | Nama | : RENDY LESMANA, SP., MM. |
| b. | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| c. | Jabatan | : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara |
| d. | Instansi | : Sukamara |

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Jelaskan program-program apa saja yang digulirkan pemerintah dalam rangka pembangunan sanitasi.
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi program,
3. Siapa saja hadir dalam kegiatan tersebut dan dimana diselenggarakan
4. Jelaskan mengenai keterlibatan masyarakat dalam rembuk/rapat perencanaan program
5. Jelaskan apa saja yang direncanakan oleh masyarakat penerima yang tergabung dalam kelompok KSM
6. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terkait program
7. Jelaskan lembaga-lembaga yang terlibat mengelola bantuan program sanitasi.
8. Bagaimana penerimaan masyarakat dalam program tersebut.

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Jelaskan pelaksanaan Program sanitasi di kabupaten Sukamara?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program?
3. Apa saja bantuan yang diberikan oleh masyarakat dalam mendukung program
4. Jelaskan sumber tenaga kerja dari mana saja dalam mendukung pelaksanaan program
5. Jelaskan dukungan sarana apa saja yang tidak dapat dipenuhi penerima manfaat

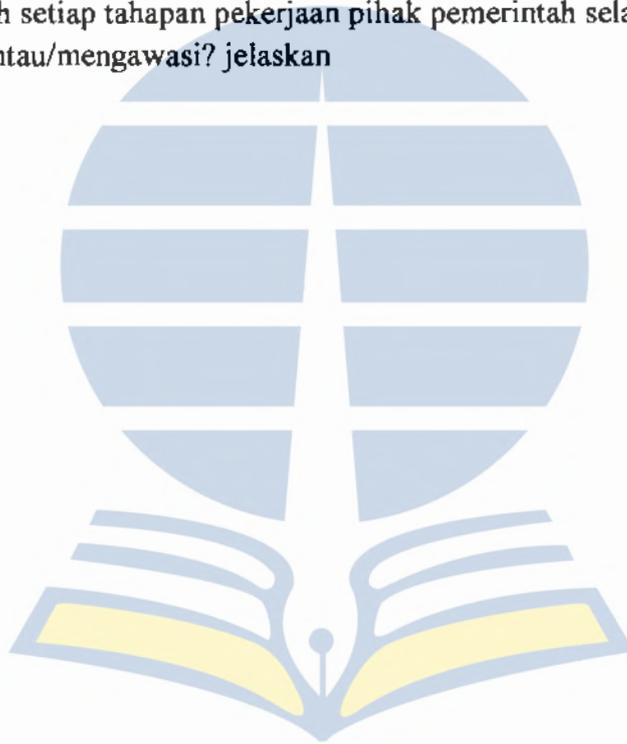
C. TAHAP PEMANFAATAN

1. Apakah masyarakat penerima manfaat program telah menggunakan sarana sanitasi, jelaskan
2. Alasan warga penerima bantuan yang tidak menggunakan sarana sanitasi
3. Bagaimana kebiasaan masyarakat BABS, apakah sudah berubah, jelaskan.
4. Apakah sarana sanitasi yang disalurkan ada yang rusak, apa penyebabnya.

5. Apakah sarana sanitasi tersebut telah dirawat dan dijaga sesuai ketentuan.

D. TAHAP EVALUASI

1. Bagaimana kemampuan aparat dalam pelaksanaan tugas
2. Bagaimana keterlibatan dan keaktifan warga dalam rapat, dalam bentuk apa.
3. Jelaskan keterlibatan kaum perempuan dalam program
4. Jelaskan peran serta tokoh masyarakat dalam program
5. Bagaimana penilaian saudara terhadap partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program.
6. Apakah pernah masyarakat melaporkan keadaan sarana sanitasi yang rusak, jelaskan
7. Apakah setiap tahapan pekerjaan pihak pemerintah selalu memantau/mengawasi? jelaskan



PEDOMAN WAWANCARA

DATA SUBYEK PENELITIAN: APARATUR PEMERINTAH

- | | | | |
|----|---------------|---|------------------------------------|
| a. | Nama | : | AMIR SAPIUDIN, Skm. |
| b. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| c. | Jabatan | : | Kabid Promkes |
| d. | Instansi | : | Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara |

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Jelaskan program-program apa saja yang digulirkan pemerintah dalam rangka pembangunan sanitasi.
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi program,
3. Siapa saja hadir dalam kegiatan tersebut dan dimana diselenggarakan
4. Jelaskan mengenai keterlibatan masyarakat dalam rembuk/rapat perencanaan program
5. Jelaskan apa saja yang direncanakan oleh masyarakat penerima yang tergabung dalam kelompok KSM
6. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terkait program
7. Jelaskan lembaga-lembaga yang terlibat mengelola bantuan program sanitasi.
8. Bagaimana penerimaan masyarakat dalam program tersebut.

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Jelaskan pelaksanaan Program sanitasi di kabupaten Sukamara?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program?
3. Apa saja bantuan yang diberikan oleh masyarakat dalam mendukung program
4. Jelaskan sumber tenaga kerja dari mana saja dalam mendukung pelaksanaan program
5. Jelaskan dukungan sarana apa saja yang tidak dapat dipenuhi penerima manfaat

C. TAHAP PEMANFAATAN

1. Apakah masyarakat penerima manfaat program telah menggunakan sarana sanitasi, jelaskan
2. Alasan warga penerima bantuan yang tidak menggunakan sarana sanitasi
3. Bagaimana kebiasaan masyarakat BABS, apakah sudah berubah, jelaskan.
4. Apakah sarana sanitasi yang disalurkan ada yang rusak, apa penyebabnya.
5. Apakah sarana sanitasi tersebut telah dirawat dan dijaga sesuai ketentuan.

D. TAHAP EVALUASI

1. Bagaimana kemampuan aparat dalam pelaksanaan tugas
2. Bagaimana keterlibatan dan keaktifan warga dalam rapat, dalam bentuk apa.
3. Jelaskan keterlibatan kaum perempuan dalam program
4. Jelaskan peran serta tokoh masyarakat dalam program
5. Bagaimana penilaian saudara terhadap partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program.
6. Apakah pernah masyarakat melaporkan keadaan sarana sanitasi yang rusak, jelaskan
7. Apakah setiap tahapan pekerjaan pihak pemerintah selalu memantau/mengawasi? jelaskan



PEDOMAN WAWANCARA

DATA SUBYEK PENELITIAN: APARATUR PEMERINTAH

- | | | |
|----|---------------|---|
| a. | Nama | : HERU SETIAWAN, ST. |
| b. | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| c. | Jabatan | : Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| d. | Instansi | : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukamara |

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Jelaskan program-program apa saja yang digulirkan pemerintah dalam rangka pembangunan sanitasi.
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi program,
3. Siapa saja hadir dalam kegiatan tersebut dan dimana diselenggarakan
4. Jelaskan mengenai keterlibatan masyarakat dalam rembuk/rapat perencanaan program
5. Jelaskan apa saja yang direncanakan oleh masyarakat penerima yang tergabung dalam kelompok KSM
6. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terkait program
7. Jelaskan lembaga-lembaga yang terlibat mengelola bantuan program sanitasi.
8. Bagaimana penerimaan masyarakat dalam program tersebut.

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Jelaskan pelaksanaan Program sanitasi di kabupaten Sukamara?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program?
3. Apa saja bantuan yang diberikan oleh masyarakat dalam mendukung program
4. Jelaskan sumber tenaga kerja dari mana saja dalam mendukung pelaksanaan program
5. Jelaskan dukungan sarana apa saja yang tidak dapat dipenuhi penerima manfaat

C. TAHAP PEMANFAATAN

1. Apakah masyarakat penerima manfaat program telah menggunakan sarana sanitasi, jelaskan
2. Alasan warga penerima bantuan yang tidak menggunakan sarana sanitasi
3. Bagaimana kebiasaan masyarakat BABS, apakah sudah berubah, jelaskan.
4. Apakah sarana sanitasi yang disalurkan ada yang rusak, apa penyebabnya.

5. Apakah sarana sanitasi tersebut telah dirawat dan dijaga sesuai ketentuan.

D. TAHAP EVALUASI

1. Bagaimana kemampuan aparat dalam pelaksanaan tugas
2. Bagaimana keterlibatan dan keaktifan warga dalam rapat, dalam bentuk apa.
3. Jelaskan keterlibatan kaum perempuan dalam program
4. Jelaskan peran serta tokoh masyarakat dalam program
5. Bagaimana penilaian saudara terhadap partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program.
6. Apakah pernah masyarakat melaporkan keadaan sarana sanitasi yang rusak, jelaskan
7. Apakah setiap tahapan pekerjaan pihak pemerintah selalu memantau/mengawasi? jelaskan



PEDOMAN WAWANCARA

DATA SUBYEK PENELITIAN: APARATUR PEMERINTAH

- | | | |
|----|---------------|---|
| a. | Nama | : SYAFRI DHARMA, ST. |
| b. | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| c. | Jabatan | : Kabid Cipta Karya |
| d. | Instansi | : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukamara |

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Jelaskan program-program apa saja yang digulirkan pemerintah dalam rangka pembangunan sanitasi.
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi program,
3. Siapa saja hadir dalam kegiatan tersebut dan dimana diselenggarakan
4. Jelaskan mengenai keterlibatan masyarakat dalam rembuk/rapat perencanaan program
5. Jelaskan apa saja yang direncanakan oleh masyarakat penerima yang tergabung dalam kelompok KSM
6. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terkait program
7. Jelaskan lembaga-lembaga yang terlibat mengelola bantuan program sanitasi.
8. Bagaimana penerimaan masyarakat dalam program tersebut.

B. TAHAP PELAKSANAAN

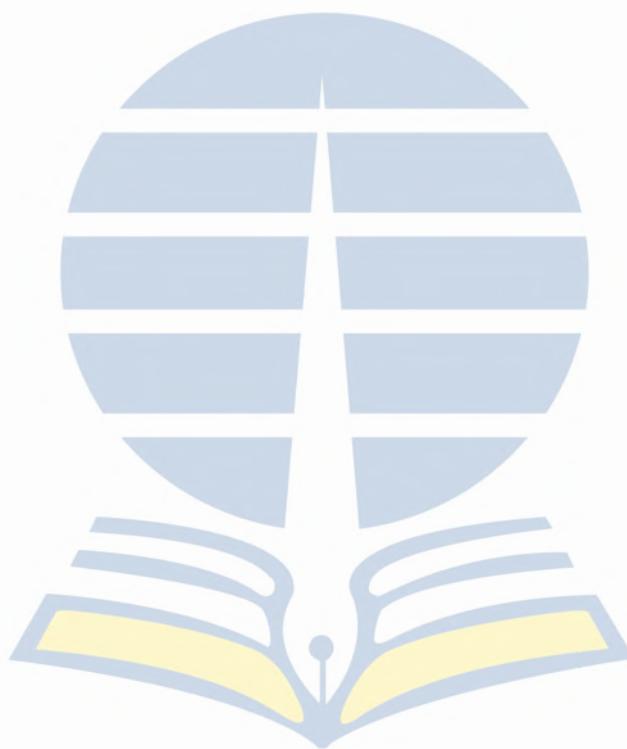
1. Jelaskan pelaksanaan Program sanitasi di kabupaten Sukamara?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program?
3. Apa saja bantuan yang diberikan oleh masyarakat dalam mendukung program
4. Jelaskan sumber tenaga kerja dari mana saja dalam mendukung pelaksanaan program
5. Jelaskan dukungan sarana apa saja yang tidak dapat dipenuhi penerima manfaat

C. TAHAP PEMANFAATAN

1. Apakah masyarakat penerima manfaat program telah menggunakan sarana sanitasi, jelaskan
2. Alasan warga penerima bantuan yang tidak menggunakan sarana sanitasi
3. Bagaimana kebiasaan masyarakat BABS, apakah sudah berubah, jelaskan.
4. Apakah sarana sanitasi yang disalurkan ada yang rusak, apa penyebabnya.
5. Apakah sarana sanitasi tersebut telah dirawat dan dijaga sesuai ketentuan.

D. TAHAP EVALUASI

1. Bagaimana kemampuan aparat dalam pelaksanaan tugas
2. Bagaimana keterlibatan dan keaktifan warga dalam rapat, dalam bentuk apa.
3. Jelaskan keterlibatan kaum perempuan dalam program
4. Jelaskan peran serta tokoh masyarakat dalam program
5. Bagaimana penilaian saudara terhadap partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program.
6. Apakah pernah masyarakat melaporkan keadaan sarana sanitasi yang rusak, jelaskan
7. Apakah setiap tahapan pekerjaan pihak pemerintah selalu memantau/mengawasi? jelaskan



PEDOMAN WAWANCARA

DATA SUBYEK PENELITIAN: APARATUR PEMERINTAH

- | | |
|------------------|---|
| a. Nama | : DADANG, SH. |
| b. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| c. Jabatan | : Lurah Padang |
| d. Instansi | : Kelurahan Padang, Kec. Sukamara, Kabupaten Sukamara |

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Jelaskan program-program apa saja yang digulirkan pemerintah dalam rangka pembangunan sanitasi.
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi program,
3. Siapa saja hadir dalam kegiatan tersebut dan dimana diselenggarakan
4. Jelaskan mengenai keterlibatan masyarakat dalam rembuk/rapat perencanaan program
5. Jelaskan apa saja yang direncanakan oleh masyarakat penerima yang tergabung dalam kelompok KSM
6. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terkait program
7. Jelaskan lembaga-lembaga yang terlibat mengelola bantuan program sanitasi.
8. Bagaimana penerimaan masyarakat dalam program tersebut.

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Jelaskan pelaksanaan Program sanitasi di kabupaten Sukamara?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program?
3. Apa saja bantuan yang diberikan oleh masyarakat dalam mendukung program
4. Jelaskan sumber tenaga kerja dari mana saja dalam mendukung pelaksanaan program
5. Jelaskan dukungan sarana apa saja yang tidak dapat dipenuhi penerima manfaat

C. TAHAP PEMANFAATAN

1. Apakah masyarakat penerima manfaat program telah menggunakan sarana sanitasi, jelaskan
2. Alasan warga penerima bantuan yang tidak menggunakan sarana sanitasi
3. Bagaimana kebiasaan masyarakat BABS, apakah sudah berubah, jelaskan.
4. Apakah sarana sanitasi yang disalurkan ada yang rusak, apa penyebabnya.
5. Apakah sarana sanitasi tersebut telah dirawat dan dijaga sesuai ketentuan.

D. TAHAP EVALUASI

1. Bagaimana kemampuan aparat dalam pelaksanaan tugas
2. Bagaimana keterlibatan dan keaktifan warga dalam rapat, dalam bentuk apa.
3. Jelaskan keterlibatan kaum perempuan dalam program
4. Jelaskan peran serta tokoh masyarakat dalam program
5. Bagaimana penilaian saudara terhadap partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program.
6. Apakah pernah masyarakat melaporkan keadaan sarana sanitasi yang rusak, jelaskan
7. Apakah setiap tahapan pekerjaan pihak pemerintah selalu memantau/mengawasi? jelaskan



PEDOMAN WAWANCARA

DATA SUBYEK PENELITIAN: APARATUR PEMERINTAH

- | | |
|------------------|---|
| a. Nama | : BAMBANG. |
| b. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| c. Jabatan | : Ketua Lembaga Masyarakat Desa (LMD) Sei. Cabang Barat |
| d. Instansi | : Sei. Cabang Barat, Kec. Pantai Lunci |

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Jelaskan program-program apa saja yang digulirkan pemerintah dalam rangka pembangunan sanitasi.
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi program,
3. Siapa saja hadir dalam kegiatan tersebut dan dimana diselenggarakan
4. Jelaskan mengenai keterlibatan masyarakat dalam rembuk/rapat perencanaan program
5. Jelaskan apa saja yang direncanakan oleh masyarakat penerima yang tergabung dalam kelompok KSM
6. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terkait program
7. Jelaskan lembaga-lembaga yang terlibat mengelola bantuan program sanitasi.
8. Bagaimana penerimaan masyarakat dalam program tersebut.

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Jelaskan pelaksanaan Program sanitasi di kabupaten Sukamara?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program?
3. Apa saja bantuan yang diberikan oleh masyarakat dalam mendukung program
4. Jelaskan sumber tenaga kerja dari mana saja dalam mendukung pelaksanaan program
5. Jelaskan dukungan sarana apa saja yang tidak dapat dipenuhi penerima manfaat

C. TAHAP PEMANFAATAN

1. Apakah masyarakat penerima manfaat program telah menggunakan sarana sanitasi, jelaskan
2. Alasan warga penerima bantuan yang tidak menggunakan sarana sanitasi
3. Bagaimana kebiasaan masyarakat BABS, apakah sudah berubah, jelaskan.
4. Apakah sarana sanitasi yang disalurkan ada yang rusak, apa penyebabnya.
5. Apakah sarana sanitasi tersebut telah dirawat dan dijaga sesuai ketentuan.

D. TAHAP EVALUASI

1. Bagaimana kemampuan aparat dalam pelaksanaan tugas
2. Bagaimana keterlibatan dan keaktifan warga dalam rapat, dalam bentuk apa.
3. Jelaskan keterlibatan kaum perempuan dalam program
4. Jelaskan peran serta tokoh masyarakat dalam program
5. Bagaimana penilaian saudara terhadap partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program.
6. Apakah pernah masyarakat melaporkan keadaan sarana sanitasi yang rusak, jelaskan
7. Apakah setiap tahapan pekerjaan pihak pemerintah selalu memantau/mengawasi? jelaskan



TRANSKRIP WAWANCARA
PERTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM SANITASI
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SUKAMARA

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
1	<p>A. TAHAP PERENCANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data subyek penelitian berasal dari masyarakat 2. Data subyek penelitian berasal dari Aparatur Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 2. Kabid Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. setiap program pemerintah yang akan diluncurkan, sebelumnya akan diadakan sosialisasi dulu kepada masyarakat. Hal ini dilakukan selain merupakan sebagai sarana komunikasi efektif yang memberikan pemahaman, pengetahuan pentingnya program, juga menghindari penolakan atas program oleh masyarakat. Kegiatan diadakan pada waktu ada kegiatan masyarakat dan juga sesuai dengan anggaran di tiap instansi. (Wawancara tanggal 18 April 2018) 2. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan mengetahui program pemerintah yang akan masuk di lingkungan mereka. Masyarakat diajak untuk dapat mendukung program tersebut sehingga kualitas output program akan berdampak positif bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk waktunya lebih baik kalau ada kegiatan warga misalnya yasinan warga atau kegiatan musrenbang.

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
		3. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3. Kabupaten Sukamara merupakan salahsatu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat sasaran proyek sanitasi. Untuk itu kami bersama instansi teknis lainnya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara memberikan informasi kepada masyarakat diwilayah yang terkena sasaran program. Sosialisasi di lakukan dengan mengundang aparatur kecamatan, kelurahan/desa, kelompok sasaran dan juga keluarga penerima manfaat dalam rangka menyatukan visi dan misi program yang melibatkan peran serta aktif masyarakat. Dalam pelaksanaannya terkadang menimbulkan pertanyaan dari elemen masyarakat yang tidak terkena dampak namun menginginkan bantuan tersebut, dan melalui forum tersebut dijelaskan mengenai jumlah bantuan yang diberikan sangat terbatas dan bertahap, maka melalui sosialisasi ini pemahaman dan dukungan masyarakat diharapkan berguna untuk mengurangi ketidakpuasan dan kecemburuan. (Wawancara, 20 April 2018)
		4. Ketua Lembaga Masyarakat Desa (LMD) Cabang Barat	4. sebagai warga masyarakat penerima manfaat, kami mengikuti program pada setiap tahapan dan akan memberitahukan kepada setiap warga agar bersedia menerima program tersebut, karena kami yakin setiap program yang digulirkan oleh pemerintah dapat meningkatkan taraf kehidupan, buktinya warga yang bekerja sehari-hari sebagai nelayan, petani maupun buruh dengan kerelaan hati mengikuti sosialisasi program sampai selesai, yang tidak bisa maka diwakilkan oleh anggota rumah tangga biasanya isterinya. (Wawancara, 14 April 2018)

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
		5. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5. mengenai program sanitasi dan penyehatan lingkungan sudah dilaksanakan mulai tahun 2015 dan terus berjalan sampai saat ini tahun 2018 telah tercapai 30% dan diharapkan pencapaian target sampai tahun 2019 sebesar 50% dan tahun 2022 sebesar 100%. bantuan yang diberikan ada empat jenis yaitu bantuan sepienk komunal, stimulant perumahan swadaya (BSPS), on site sepienk dan bedah rumah. untuk bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. bantuan sepienk komunal ditujukan kepada kelompok masyarakat yang disebut KSM. Sementara bantuan on site sepienk dan bedah rumah diberikan kepada perorangan bagi keluarga berpenghasilan rendah atau kurang mampu. Dengan bantuan tersebut pola BABS masyarakat dapat berubah dan juga lingkungan masyarakat akan menjadi bersih serta higienis sehingga tercipta kawasan lingkungan yang sehat (wawancara tanggal 11 April 2018)
		6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	6. Kami rasa hal itu sudah dilakukan namun hanya sebagai sosialisasi saja, artinya belum sampai kepada mengikutkan mereka secara aktif atau secara penuh didalam kegiatan sanitasi dan penyehatan lingkungan". Maksud kami adalah mengikutkan lembaga atau organisasi tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pengawasannya. (Sukamara, 18 April 2018)

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
		7. Kepala Bidang Cipta Karya	7. Kami dari Bidang Cipta Karya, memandang bahwa keterlibatan LMD dalam penyampaian program sanitasi ini perlu sebab mereka adalah organisasi formal yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa yang juga sekaligus sebagai representasi keberadaan masyarakat pada lembaga yang ada di desa. Lewat LMD kami berharap bahwa program ini dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat, selain itu pula biasanya pihak LMD sebelum sosialisasi dilaksanakan sebagian masyarakat sudah mengetahui melalui pamlet atau iklan yang ditempelkan pada papan pengumuman yang ada ditempat keramaian misalnya balai desa maupun ditempat umum lainnya (Sukamara, 15 April 2018)
		8. Kabid Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan	8. iya saya kira langkah dan strategi yang telah diambil oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah tepat ya,,begini maksud saya,,dengan pelibatan LMD yang nota bene adalah lembaga formal yang ada di desa cukup baik,,sebab apa,,sebab mereka (LMD) ini adalah dari masyarakat juga anggotanya,,jadi menurut saya strategi ini dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat". (Sukamara, 18 April 2018).
		9. Kepala Bidang Cipta Karya	9. Iya, betul selama ini kami sudah ada melibatkan lembaga atau organisasi seperti LMD untuk ikut serta dalam melaksanakan program sanitasi dan penyehatan lingkungan. Tetapi terus terang kegiatan itu belum sepenuhnya kami lakukan". (Sukamara, 15 April 2018)
		10. Ketua LMD (Bapak Bambang)	10. Ada partisipasi lembaga dan organisasi, namun hanya sebatas menyampaikan keinginan saja, lebih dari itu secara aktif misalnya didalam perencanaan atau pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi. Dengan demikian apa yang diprogramkan oleh pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat pengguna dari program tersebut. Kalau demikian, kami akan pasti mendukung penuh semua program yang bermanfaat bagi masyarakat" (Sukamara, 13 April 2018)

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
		11. H. Suri	11. saya mengetahui program ini dari mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah beberapa bulan yang lalu. Pada waktu rapat dan sosialisasi tersebut kami langsung didata dan diminta persetujuan mengenai letak sepijing dan masuk dalam kelompok penerima bantuan". (wawancara, 14 April 2018).
		12. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12. Salahsatu program yang diluncurkan oleh pemerintah adalah bantuan Sepiteng komunal dimana pada setiap kelompok berjumlah 50 rumah tangga dalam satu kelurahan/desa dibantu kucuran dana sebesar 450 juta. Bantuan langsung tersebut digunakan secara swadaya oleh masyarakat untuk membangun penyediaan tempat menampung limbah BAB secara terpadu atau terintegrasi dalam suatu lahan yang sudah dibebaskan haknya untuk kepentingan masyarakat, maka melalui rapat tersebut setiap masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merencanakan, menerima, melaksanakan dan memutuskan setiap persoalan menyangkut setiap tahapan program."
		13. Yadi	13. pada kegiatan sosialisasi program kami diminta membentuk kelompok yang dipandu oleh aparat pemerintah. Setiap warga membuat pernyataan yang blangkonya sudah disiapkan oleh bapak-bapak dari dinas perkim, isinya mengenai kesanggupan menjalankan program dari mulai perencanaan sampai memanfaatkan, semua pekerjaan ini kami dibantu dengan tulus dari dinas perkim." (wawancara, 14 April 2018)
		14. Yadi	14. kami mengerjakan perencanaan mengenai pembangunan sanitasi berupa sepijing bersama, rencana penggunaan dana, operasional dan pemeliharaan sesuai petunjuk dari dinas perkim. Juga menentukan warga yang akan mendapat bantuan sesuai hasil rapat yang melibatkan aparat kelurahan dan kecamatan. (Wawancara, 15 April 2018)

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
		15. Lurah Padang	15. Salah satu tugas lurah adalah mengawasi segala kegiatan yang ada di wilayahnya masing-masing, seperti juga program sanitasi ini. Kelompok masyarakat penerima di tetapkan dengan keputusan lurah dan diketahui oleh Camat, hal ini untuk menjamin ketepatan sasaran program pada masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah kami”.
		16. Tokoh Masyarakat Desa Sei. Cabang Barat	16. Selaku masyarakat kami selalu dilibatkan dalam setiap rapat. Pada waktu itu ada usulan-usulan dan masukan dari warga kami untuk mengatasi masalah misalnya waktu menentukan lokasi tempat sepihing yang dikuasai salah satu warga, pembebasan lahan tersebut harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ganti rugi yang diberikan pastilah dengan harga yang dibawah standar karena menyesuaikan dengan bantuan yang diberikan, namun alhamdulillah semuanya berjalan lancar-lancar saja. Sepertinya kesadaran warga cukup tinggi untuk memberikan lahannya demi kepentingan orang banyak. setelah beres urusan dari bawah semua persyaratan administrasi dibawa ke dinas perkim untuk ditindaklanjuti, biasanya kalau tahun ini diusulkan, pada tahun berikutnya bantuan terealisasi”(wawancara, 15 April 2018)
		17. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17. sebenarnya masyarakat sudah dapat memutuskan sendiri setiap permasalahan yang ada melalui rapat-rapat baik diadakan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri, karena tidak ada yang dirugikan malah menguntungkan masyarakat. Untuk mempermudah persyaratan administrasi kami sudah menyiapkan contoh-contoh blangko surat pernyataan, surat perjanjian dan bentuk-bentuk SPJ, hal ini dilakukan semata-mata untuk akuntabilitas penyelenggaraan program. Selanjutnya setiap usulan yang telah disepakati bersama warga masyarakat maka akan kami teruskan kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada tahap ini pemerintah provinsi meneruskan pada tingkat kementerian, proses ini memakan waktu satu tahun, selain itu pula Badan Pemeriksa Keuangan juga akan memverifikasi secara teknis administrasinya, apakah benar-benar telah melalui tahapan usulan dari masyarakat atau tidak”(wawancara , 11 April

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
2.	<p>B. TAHAP PELAKSANAAN</p> <p>1. Data subyek penelitian berasal dari masyarakat</p> <p>2. Data subyek penelitian berasal dari Aparatur Pemerintah</p>	<p>18. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>19. H. Suri</p> <p>20. Yadi</p> <p>21. Tokoh Masyarakat Desa Sei. Cabang Barat</p> <p>22. H. Suri</p>	<p>2018)</p> <p>18. sosialisasi program yang melibatkan masyarakat penerima manfaat dilaksanakan sekaligus dengan mematangkan perencanaan dari bawah biasanya berjalan setahun sampai realisasi, anggaran langsung ke rekening KSM penerima manfaat. Maka setelah realisasi tersebut dimulailah pekerjaan fisik atau konstruksi yang pelaksanaannya langsung dilaksanakan oleh KSM” (Wawancara, 11 April 2018).</p> <p>19. betul sekali pak, dana yang kami terima langsung digunakan sesuai rencana, namun untuk pencairannya secara bertahap”. (wawancara, 15 April 2018)</p> <p>20. pencairan dana bantuan septiteng komunal sebesar 450 juta ditransfer ke rekening kami sesuai dengan rencana, artinya apa yang kita kerjakan dulu pencairan pertama 40 persen dari nilai kontrak, misalnya dana pembebasan lahan terlebih dahulu, pembelian pipa, semen dan seluruh bahan yang diperlukan sampai upah tukang, baru setelah selesai maka pencairan tahap kedua 30 persen dari nilai kontrak dikururkan pada saat kemajuan pekerjaan tahap pertama sudah mencapai 20 persen, selanjutnya tahap ketiga sebesar 30 persen dari nilai kontrak dan kemajuan pekerjaan tahap kedua sudah mencapai 50 persen, demikianlah setelah pencairan tahap ketiga seluruh pekerjaan selesai 100 persen sesuai batas waktu yang direncanakan, biasanya lebih cepat.” (wawancara, 16 April 2018)</p> <p>21. Yang kami ketahui bahwa pengajuan sesuai rencana dicairkan pada tahun berikutnya adalah berdasarkan termin, ada pencairan tahap pertama, kedua dan ketiga, sesuai dengan rencana dan penggunaan dana minimal 90 persen pada setiap terminnya” (wawancara, 17 April 2018)</p> <p>22. seluruh pekerjaan konstruksi dilakukan secara swadaya, dukungan materiil berupa penyediaan lahan, membuat dinding wc closet menyediakan listrik, air, gayung, ember, sikat lantai pada tiap rumah keluarga yang menerima bantuan merupakan kesepakatan yang telah ditandatangani setiap warga</p>

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
			masyarakat penerima di Kelurahan Mendawai. Akan tetapi banyak juga warga yang tidak memenuhinya.” (wawancara, 16 April 2018)
		23. Yadi	23. sesuai kesepakatan masyarakat penerima manfaat sepatutnya mendukung kegiatan tersebut dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan misalnya perlengkapan wc, sumber air, listrik,dinding wc dan juga berupa sumbangan tenaga ketika diadakan pembuatan sepingting maupun penyambungan pipa dari tipa rumah warga, dari pengamatan kami selama melaksanakan kegiatan ini seluruh warga ikut serta menyumbangkan tenaganya, yang laki-laki kerja mengangkut batu, mengaduk semen, dan pekerjaan konstruksi lainnya, sedangkan warga yang perempuan menyediakan air minum dan makanan secara bergiliran sesuai pembagian kelompok, namun rata-rata yang menerima bantuan belum menyiapkan dinding wc” (Wawancara, 16 April 2018)
		24. Dodi	24. Iya bujur,,mun proyek itu swakelola buhan kami ini ada ja yang bantu-bantu,,kadang bahan nang kurang di tambahi oleh kades,,kadang jua ibu-ibunya tuh membawa wadai pake kami gotong royong dan ada iuran untuk pemeliharaan yang tidak memberatkan” <i>Terjemahan : iya benar, jika proyek itu swakelola maka kami ini ada juga yang membantu, kadang bahan yang kurang ditambahi oleh pak kades, kadang juga ibu-ibu membawa jajanan untuk kami gotong royong, dan untuk pemeliharaan diadakan iuran menyesuaikan kemampuan warga (Sukamara, 12 April 2018).</i>
		25. Masyarakat Pengguna	25. Ulun sudah menyiapkan peralatan pendukung, ember, sikat dan gayung apabila nanti wc telah dimanfaatkan, kalau untuk dinding sementara memakai kain,atau plastic berhubung belum ada dana untuk itu, akan kami pikirkan supaya rapi lah.” (Wawancara, 21 April 2018)

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
		26. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	26. rata-rata warga masyarakat cukup aktif berpartisipasi membantu pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik kepala rumah tangga maupun ibu-ibu yang termasuk dalam organisasi PKK, dengan tenaga pekerja yang berasal dari masyarakat lebih murah, kecuali ada beberapa bagian konstruksi yang kami bantu datangkan tenaga dari luar dengan biaya upah sesuai RAB. Dalam beberapa kunjungan kami ternyata masih banyak rumah tangga yang tidak memasang dinding pada wc yang sudah dipasang, kalau dihitung mencapai 60 persen” (Wawancara, 11 April 2018)
		27. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	27. setiap kepala keluarga mempunyai peran yang sama dalam mendukung pelaksanaan program, warga masyarakat bersemangat memberikan bantuan secara fisik membantu pekerjaan konstruksi, dilain pihak sebagian yang lain menyediakan kudapan ala kadarnya, kesulitan yang dialami warga masyarakat yang baru memulai pemakaian wc yang berada dalam rumah hanya menutupi lokasi sekitar wc dengan kain penutup alias tidak memakai pintu dan dinding” (wawancara, 12 April 2018)
		28. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28. Itu jika sudah dalam taraf pelaksanaan, menurut pantauan kami di lapangan bantuan dari masyarakat selalu ada jika proyek kami tersebut sifatnya swakelola namun jika murni proyek dari kami ya tidak ada „eee,, jika semisal swakelola itu ya kadang ada partisipasi masyarakat berupa bantuan tambahan material terus tanaman-tanaman di sekitar sebagai pemanis,,kadang juga di gotong royong kan,,yang intinya adalah bantuan masyarakat itu”. (Sukamara, 15 April 2018).

3.	C. TAHAP PEMANFAATAN 1. Data subyek penelitian berasal dari masyarakat 2. Data subyek penelitian berasal dari Aparatur Pemerintah	29. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	29. Menurut pengamatan kami di lapangan,,eee..program ini belum mendapat respon yang seimbang dari masyarakat...eee..pada beberapa tempat kami masih menemukan masyarakat yang belum merubah pola kebiasaannya untuk membuang “hajat” pada tempat yang telah kami sediakan/bangun,,kemungkinan besar ini karena pola dan budaya mereka ya ” (Sukamara, 15 April 2018).
No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
		30. Masyarakat Pengguna	30. Kami sangat berterimakasih kepada pemkab lewat dinas terkait yang telah mau untuk membangun,,eeee,,fasilitas ini,,tapi ya mau gimana lagi,,masih ada banyak masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas ini, karena faktanya memang masyarakat kami ini beragam pola pikir dan pemahamannya terhadap kesehatan ” (Sukamara, 10 April 2018).
		31. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	31. untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan cara pemanfaatan fasilitas sanitasi berupa seipitenn communal, on site seipitenn maupun bantuan sanitasinya telah diadakan kegiatan sosialisasi tentang teknik dan pola pemanfaatan dengan melibatkan perangkat desa dan organisasi masyarakat formal yang ada di desa, namun kami menemukan kenyataan bahwa fasilitas yang telah kami bangun ternyata tidak/belum dimanfaatkan optimal oleh masyarakat (tidak digunakan dan tidak dirawat). Kami membuktikan dengan mengukur kedalaman tinja dengan alat ukur dan ternyata pembuangan tinja masih belum ada, kami juga heran atas fakta ini,,apa ada yang salah ya dengan ajakan kami untuk berperilaku hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat” (Sukamara, 16 April 2018)
		32. Masyarakat Pengguna	32. jadi kaya apa pak lah,,memang am itu fasilitas (sanitasi) sudah dibangun dengan pemerintah,,tapi oleh kami ini sudah biasa segala cuci berak di jamban tu nah” <i>Terjemahan : “bahwa memang benar sanitasi sudah dibangun oleh pemerintah, tetapi masyarakat sudah terbiasa mencuci dan buang air besar di jamban yang berada di sungai (Sukamara, 10 April 2018).</i>

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
		33. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	33. Masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program ini,,pengalaman kami selama ini untuk melaksanakan sosialisasi memang terasa ada kendala, diantaranya adalah sebagian masyarakat bekerja pada siang hari, sehingga sulit untuk menghadirkan mereka dalam sosialisasi. Meskipun demikian tingginya pengabdian para petugas, hal ini dapat dilaksanakan meskipun terkadang pada waktu malam hari, setelah masyarakat pulang kerja, namun memang dalam pelaksanaan di lapangan kami masih menemukan masyarakat yang belum merubah pola kebiasaannya untuk membuang "hajat" pada tempat yang telah kami sediakan/bangun,,kemungkinan besar ini karena pola dan budaya mereka ya" (Sukamara, 15 April 2018).
		34. Nanang	34. Kami sangat salut kepada petugas yang memberikan sosialisasi program sanitasi dan penyehatan lingkungan, mereka mengerti kami bekerja siang. Jadi kegiatan mereka lakukan pada malam hari, bila kami sudah datang dari kerja, namun memang fakta di lapangan berkata lain" (Sukamara,10 April 2018).
		35. Masyarakat Pengguna	35. jadi kaya apa pak lah ,memang am itu fasilitas (sanitasi) sudah dibangun dengan pemerintah,,tapi oleh kami ini sudah biasa segala cuci berak di jamban tu nah" fasilitas (sanitasi) sudah dibangun pemerintah, tapi karena kebiasaan masyarakat untuk cuci dan berak di jamban (Sukamara, 10 April 2018)



	36. H. Suri	36. masyarakat yang menerima manfaat dari fasilitas sanitasi kurang begitu paham dan mengerti tentang penggunaan koset berhubung jarang membaca petunjuk, langsung eksekusi saja..hehe. (wawancara, 10 april 2018)
--	-------------	--

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
		37. Masyarakat Pengguna	37. keluarga kami langsung menggunakan koset yang sudah selesai pembangunannya, memang sudah ada sosialisasi penggunaan dari pemerintah, tapi belum sepenuhnya kami mengerti, terlebih lagi keluarga di rumah. kadang-kadang salah menggunakan ketika bab tidak langsung kelubangnya, selain itu untuk menjaga kebersihan dilakukan seminggu sekali lantai koset disikat/dibersihkan menggunakan sabun rinso. (wawancara, 10 April 2018)
		38. Masyarakat Pengguna	38. Ulun sering menyikat lantai wc menggunakan rinso bekas tapasan, daripada mubajir maka ulun gunakan, biasanya mun ada tegerak hati hanyar ulun bersihkan.” <i>Terjemahan : saya sering menyikat lantai koset dengan menggunakan air detergen bekas cucian pakaian untuk menghemat, kalau membersihkan wc bila ada keinginan saja. (wawancara, 10 April 2018)</i>
		39. Tati	39. biasanya saya yang membersihkan wc, sangat jarang bapaknya. Berhubung sebagai ibu rumah tangga menjadi pekerjaan kami sehari-hari membersihkan wc, dibanding sebelum ada bantuan sanitasi, kalau buang air kami merasa nyaman karena tidak perlu keluar rumah lagi, kami berupaya merawat wc dengan menyikat, tidak membuang kesaluran koset dengan pembalut atau menyiram dengan air detegen karena menurut anjuran dalam sosialisasi beberapa waktu lalu tidak dibolehkan sebabnya dapat menghambat saluran.” (wawancara, 10 April 2018)

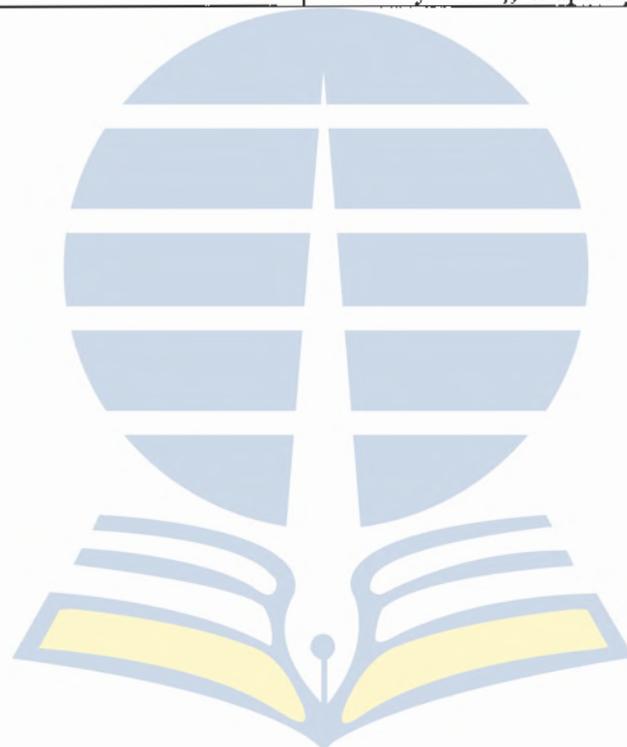
		40. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	40. karena tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa program ini terkadang diterima dan juga kadang tidak diterima oleh masyarakat, akhirnya kembali kepada masing-masing masyarakat bagaimana memandang seberapa perlu dan tidak perlunya fasilitas tersebut ada,,dan sering kami jumpai di lapangan bahwa banyak yang apatis,,sebab apa,,dari proyek yang murni dari kami banyak yang tidak dirawat apalagi digunakan” (Sukamara, 15 April 2018).
--	--	---	---

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
		41. Kepala Bidang Cipta Karya	41. masyarakat yang menerima manfaat dari fasilitas sanitasi kurang begitu paham dan mengerti tentang penggunaan koset berhubung jarang membaca petunjuk, langsung eksekusi saja.hehe. (wawancara, 10 april 2018) berdasarkan pengamatan kami di lapangan masih banyak kendala yang ditemui dengan adanya proyek ini,,seperti penjelasan saya sebelumnya masih ada masyarakat yang enggan menerima proyek ini,,lain halnya jika swakelola” (Sukamara, 16 April 2018).
4.	D. TAHAP EVALUASI 1. Data subyek penelitian berasal dari masyarakat 2. Data subyek penelitian berasal dari Aparatur Pemerintah	42. Kabid Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan	42. Iya saya sebagai Kadinkes Sukamara tentu sangat mendukung adanya program sanitasi ini,,sebab ini adalah salah satu upaya untuk mengajak masyarakat berperilaku hidup sehat dengan tidak mandi cuci berak tidak disembarang tempat,,tetapi memang merubah pola pikir masyarakat ini bukan sesuatu yang ibarat kata semudah membalik telapak tangan,,saya kira faktor ekonomi, faktor pemahaman masyarakat dan faktor kebiasaan masyarakat yang masih perlu digenjut untuk dapat mengajak mereka berperilaku hidup sehat”. (Sukamara, 18 April 2018).
		43. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	43. Kami selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan serta program pemerintah dengan maksud agar mereka mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan mereka. Semua ini dimaksudkan agar program sanitasi dan penyehatan lingkungan dapat berjalan

			lancar mencapai tujuan atau sasaran yang tepat". Sebab kalau tidak begitu, kami kuatir akan muncul kendala yang tidak kita harapkan dikemudian hari. Pengecekan sarana sanitasi dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan cara mengukur kedalaman tinja pada sepienk, melihat kondisi jamban dan dari pengamatan kami ada sarana sanitasi belum dimanfaatkan dengan baik". (Sukamara, 15 April 2018).
--	--	--	--

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
		44. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	44. bersama tim kami melakukan inspeksi guna mengetahui apakah sarana sanitasi telah difungsikan atau tidak, dan kami coba mencari tahu apa penyebabnya. Hasil pengamatan kami bahwa sebagian besar sarana sanitasi telah digunakan dengan baik, Cuma ada beberapa warga yang belum menggunakan hal ini terkait dengan kebiasaan dan kesulitan dengan penggunaan air yang biasanya didapat langsung di sungai, namun pada masyarakat yang belum sepejuh terjangkau air bersih PDAM, menggunakan sarana sanitasi air dari tandon yang disediakan oleh pemerintah." (wawancara tanggal, 18 April 2018)
		45. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	45. Dalam setiap pelaksanaan sosialisasi kami selalu berusaha untuk menggali informasi dari masyarakat tentang apa-apa saja yang diinginkan,,eee,,terus lokasi yang tepat bagi pembangunan fasilitas tersebut,,kami menanyakannya pada saat sosialisasi baik ke masyarakat maupun tokoh-tokohnya". (Sukamara, 15 April 2018).
		46. Dodi	46. dari pertemuan yang dilaksanakan oleh dinas, kami peserta ini ,selalu ditakuni tentang kaya apa biar program ini berhasil" <i>Terjemahan : dari pertemuan yang dilaksanakan oleh dinas, kami peserta selalu ditanyakan tentang seperti apa agar program ini berhasil (Sukamara, 12 April 2018).</i>

	47. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	47. kami dari Dinas dalam setiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat selalu berusaha menggali informasi yang diperlukan, hal tersebut kami lakukan agar program ini tepat sasaran serta juga mengakomodir keinginan masyarakat, harapannya program ini berhasil” (Sukamara, 15 April 2018).
--	---	--



No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
		48. Ketua LMD Desa Sei. Cabang Barat	48. Iya Benar, pada setiap pertemuan yang kami lakukan dibalai desa dan bisa juga dirumah warga yang agak luas. Sebagian warga tidak hadir dan diwakilkan dengan alasan tertentu. Dan ditempat itulah pihak pemerintah menanyakan kepada kami tentang apa yang harus dipenuhi dari program sanitasi dan penyehatan lingkungan ini". (Sukamara, 10 April 2018).
		49. Kepala Bidang Cipta Karya	49. iya saya selalu menekankan kepada saudara Kabid,,agar jeli dalam menangkap aspirasi masyarakat,,sebab apa,,sebab pengguna atau user dari program ini,,iya,,masyarakat itu sendiri,,aspirasi itu ditangkap dengan selalu aktif menanyakan dan meminta masukan kepada masyarakat dan tokoh-tokohnya" (Sukamara,16 April 2018).
		50. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50. dalam kegiatan sosialisasi selalu kami temukan adanya masyarakat yang tidak bisa menerima adanya program sanitasi ini,,ecccc,,sebab mereka beralasan sudah terbiasa dengan keadaan saat ini serta pula,,eee,,mereka menganggap bahwa dengan dibangunnya fasilitas ini mereka tidak bisa bebas menggunakan sebab harus berbagi dengan orang lain,,namun masih ada juga sebagian masyarakat yang menerima,,saya duga mereka yang mau menerima ini sudah pernah minimal mengetahui kabar-kabar tersebut dari berita-berita yang ada" (Sukamara, 15 April 2018).
		51. Masyarakat Pengguna	51. Kami masyarakat ini kan beragam pola pikir dan pemahamannya terhadap kesehatan,,jadi dalam pertemuan itu memang ada yang terima tapi ada jua yang kada terima,, mungkin oleh sidan tuh belum paham nah <i>Terjemahan : jadi dalam pertemuan itu memang ada yang terima tapi ada juga yang tidak menerima, mungkin karena mereka belum paham" (Sukamara,10 April 2018).</i>

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
		52. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	52. dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Sanitasi saya selalu minta laporan, seperti apa pelaksanaan di lapangan, nah saudara Kabid menyampaikan ke saya, ada yang terima ada yang tidak terima karena alasan sarana-prasarana pendukung belum ada. Padahal dalam kesepakatan awal pada tahapan perencanaan sudah disepakati bahwa masyarakat menyediakan dukungan agar sarana sanitasi berfungsi dengan baik” (Sukamara, 16 April 2018).
		53. Masyarakat	53. sejujurnya keadaan ekonomi kami bergantung dengan pekerjaan sehari-hari sebagai buruh kasar di pasar, paling banyak penghasilan 150 ribu perhari, tambahan mungkin didapat dari berjualan minyak dan makanan ringan untuk anak-anak didepan rumah dapat membantu perekonomian kami sekeluarga. Untuk mendukung sarana sanitasi dirumah tetap kami usahakan, untuk yang kecil-kecil seperti gayung, ember, listrik dapat dipenuhi, namun untuk dinding yang memerlukan dana besar sementara belum dapat dipenuhi, selain itu untuk kegiatan rapat kami cukup percaya dengan pengurus”. (wawancara 10 April 2018)
		54. Anang	54. gawian sehari-hari mencari iwak, mun banyak kulihan iwak kawalah mendukung menukar gayung, ember dan sikat wc, mun sedikit dapat kada kawa am. mun hadir rapat diwakili oleh bini dirumah karena ulun uyuh seharian bagawi” <i>Terjemahan : pekerjaan sehari-hari mencari ikan (nelayan), kalau banyak dapat ikan hasilnya dapat mendukung sarana sanitasi, kalau dapat sedikit tidak dapat mendukung, untuk kehadiran rapat banyak diwakilkan oleh isteri berhubung mencari nafkah sehari-hari (wawancara, 10 April 2018)</i>
		55. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	55. menurut ketentuan pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya menerima hibah sarana sanitasi maka wajib menyediakan dana pendamping sebesar 5 sampai 10 persen dari dana yang dikucurkan, yang nantinya digunakan dalam mendukung pelaksanaan dan pemeliharaan, misalnya beberapa bulan yang lalu ada warga yang melapor bahwa ada kerusakan berat pada sarana sanitasi maka langsung dapat ditangani oleh kami.” (wawancara, 15 April 2018)

No	Subyek Penelitian	Informan	Jawaban Informan
		56. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	56. pada rapat terakhir dengan warga dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM), dana BLM yang tersisa dipergunakan untuk pemeliharaan dan memperluas jangkauan ke warga yang tidak terkena dampak. Kelihatannya warga cukup percaya dengan pengelola, terbukti setiap rapat tidak ada yang protes. Namun ada juga warga yang mempertanyakan tentang penggunaan dana tersebut, dan dapat memahami laporan pertanggungjawaban keuangan yang kami sampaikan” (wawancara, 10 April 2018)



DOKUMENTASI RISET



Photo 1.
Wawancara Dengan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
(18 April 2018)



Photo 2.
Wawancara Dengan
Kepala Bidang Promkes Dinas Kesehatan
(15 April 2018)



Photo 3
Wawancara Dengan
Kepala Bidang Promkes Dinas Kesehatan
(15 April 2018)



Photo 4
Wawancara Dengan
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
(15 April 2018)



Wawancara Dengan
Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
(15 April 2018)



Photo 5
Sosialisasi Sarana Air Limbah



Photo 6
Sosialisasi Sarana Air Limbah

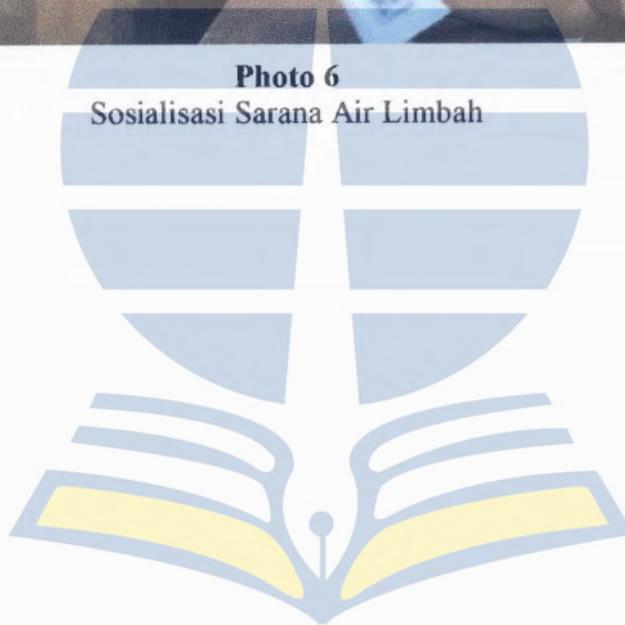




Photo 7
Jamban Di Kompleks Perumahan warga

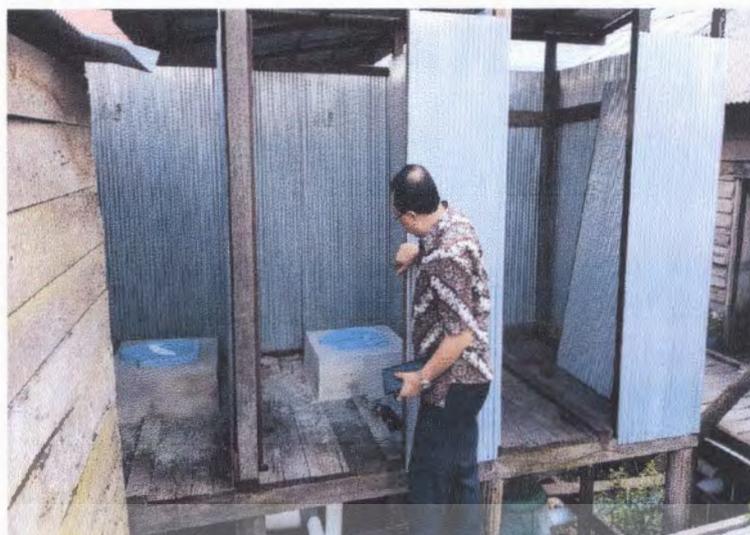
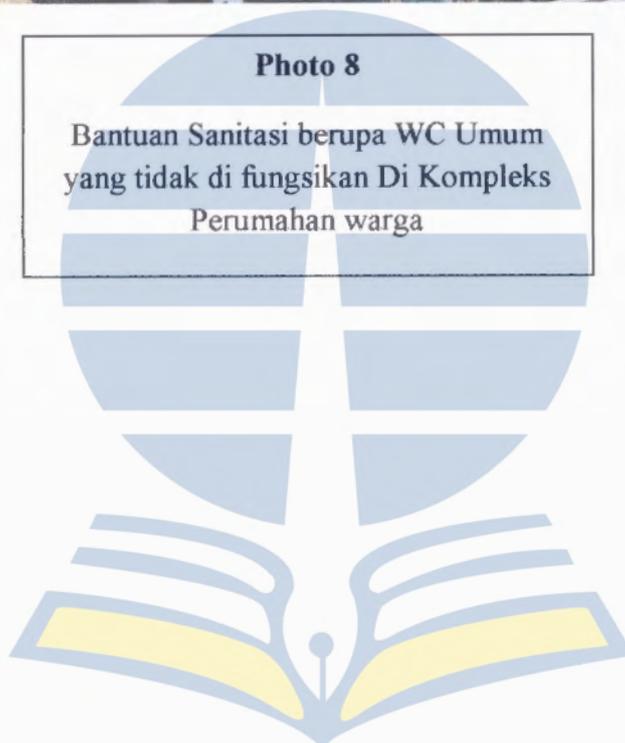


Photo 8

Bantuan Sanitasi berupa WC Umum
yang tidak di fungsikan Di Kompleks
Perumahan warga



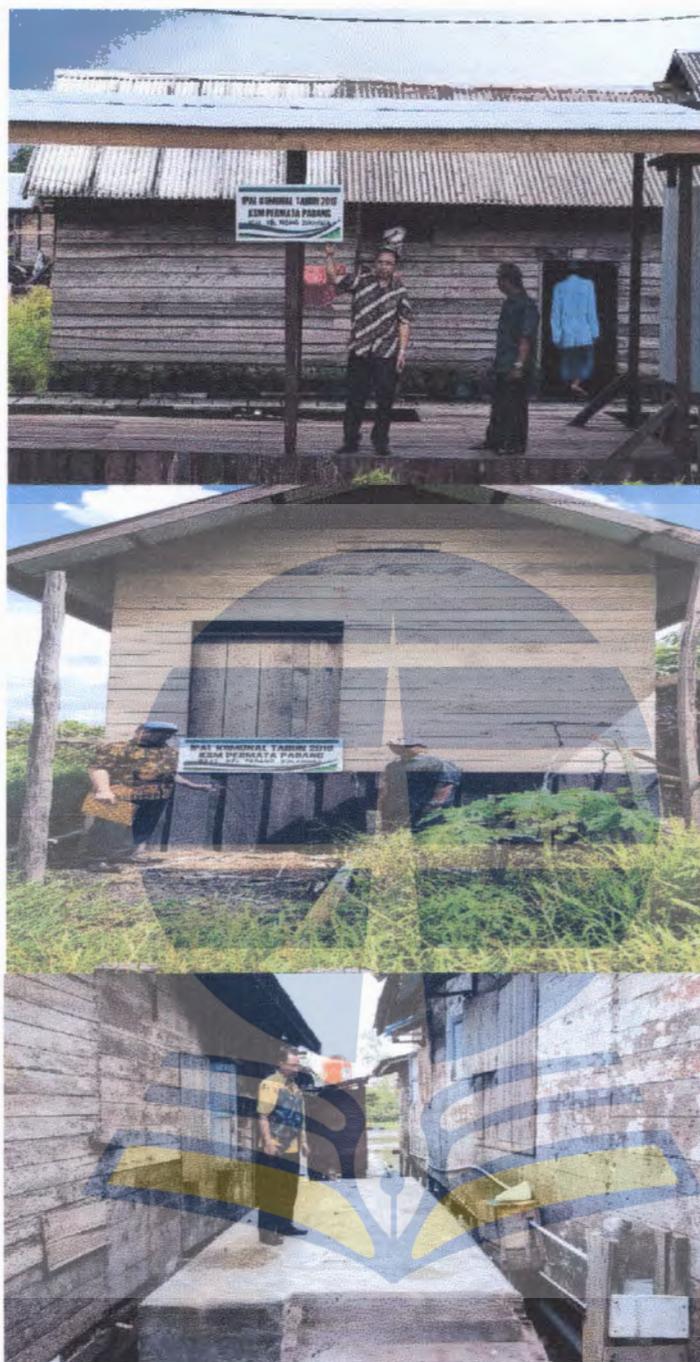


Photo 9

Bantuan Sanitasi berupa IPAL Komunal
di Kompleks pemukiman warga



Photo 10

Wawancara dengan beberapa warga
penerima bantuan sanitasi



Photo 11

Wawancara dengan Lurah Padang,
Tokoh masyarakat dan beberapa warga
penerima bantuan sanitasi